

**LAPORAN
KINERJAINSTANSI
PEMERINTAH (LAKIP)
TAHUN 2023**



**PEMERINTAH KABUPATEN TANAH LAUT
KECAMATAN PANYIPATAN
Jl. Sungai Paring No. 01 RT. 10 Desa Panyipatan**

KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadirat Allah SWT atas limpahan Rahmat, Taufik dan Hidayah-Nya sehingga penyusunan Laporan Kinerja Kecamatan Panyipatan Tahun 2023 dapat terselesaikan dengan baik,serta tetap berpedoman pada Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah dan Surat Keputusan Bupati Tanah Laut Nomor 188.45/ 886 -KUM/2023 Tanggal 7 Juli 2023 tentang Sistematika Laporan Kinerja Perangkat Daerah Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Tanah Laut .

Dengan berpedoman pada ketentuan – ketentuan diatas dan dengan didasari keinginan yang luhur guna mewujudkan *good governance* maka disusunlah Laporan Kinerja yang merupakan uraian pertanggungjawaban pelaksanaan tugas dan fungsi dalam rangka pencapaian visi dan misi Kabupaten Tanah Laut serta penjabarannya.Selain itu Laporan Kinerja Kecamatan Panyipatan disusun sebagai perwujudan pertanggung jawaban atas penyelenggaraan pemerintahan dalam mencapai tujuan dan sasaran Kecamatan Panyipatan sebagaimana tercantum dalam Rencana Strategis Kecamatan Panyipatan Tahun 2019–2023.

Dengan disusunnya laporan ini diharapkan pelaksanaan kegiatan pada Kecamatan Panyipatan sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan dapat tersusunnya Laporan Kinerja Kecamatan Panyipatan tahun 2023 ini, kami menyampaikan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada semua pihak baik yang secara langsung maupun tidak langsung telah membantu hingga tersusunnya laporan ini.

Akhirnya semoga dapat bermanfaat bagi kita semua, Amin.

Panyipatan, Februari 2024

CAMAT PANYIPATAN,

Muhammad Hadiat Wicaksono, SSTP, M.I.P

NIP. 19870617 200602 1 001

IKHTISAR EKSEKUTIF



Kecamatan Panyipatan merupakan salah satu dari 11 Kecamatan yang dibentuk di Kabupaten Tanah laut yang memiliki 10 Desa dengan beragam kehidupan ekonomi dan kultur masyarakatnya.

Laporan Kinerja Pemerintah Kecamatan Panyipatan Tahun 2023 merupakan wujud Akuntabilitas Kinerja Kecamatan Panyipatan kepada publik/pemberi mandat yang sekaligus memberikan gambaran mengenai keberhasilan dalam melaksanakan urusan yang menjadi kewenangannya sesuai dengan Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, serta pelaksanaan Penetapan/Perjanjian Kinerja tahun 2023 yang merupakan penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kecamatan Panyipatan Tahun 2018-2023 sebagaimana ditetapkan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 2 Tahun 2019.

Laporan Kinerja ini merupakan laporan kinerja keempat RPJMD 2018 – 2023. Selain media pertanggungjawaban kinerja kepada publik/pemberi mandat, Laporan Kinerja ini juga merupakan instrumen untuk mengevaluasi pencapaian Kinerja Kecamatan Panyipatan Kabupaten Tanah Laut yang dapat dijadikan umpan balik bagi perbaikan kinerja di tahun-tahun yang akan datang Sebagai perwujudan Akuntabilitas Kinerja Kecamatan Panyipatan kepada publik/pemberi mandat yang sekaligus memberikan gambaran mengenai keberhasilan kecamatan Panyipatan dalam melaksanakan urusan yang menjadiKewenangannyasebagaimana yang telah ditetapkan dalam Penetapan/Perjanjian Kinerja tahun 2023.

Dari evaluasi dan analisis atas pencapaian Sasaran, Indikator Kinerja Utama,Indikator kinerja program yang sudah diuraikan dalam Bab III Akuntabilitas Kinerja dapat dilihat bahwa rata-rata capaian kinerja seluruh indikator adalah 85,80 dengan rincian 35 (Tiga puluh Lima) indikator dengan tingkat capaian kinerja berkategori **Baik**.

Pencapaian Kinerja Pemerintah Kecamatan Panyipatan Tahun 2023 ini belum sepenuhnya memenuhi harapan. Namun pada tahun 2023 dan seterusnya akan terus di tingkatkan akselerasinya dengan melakukan upaya yang lebih keras, cerdas dan terarah melalui percepatan pembangunan manusia dari aspek pendidikan, kesehatan dan kemampuan ekonomi, dengan berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Pemerintah Kabupaten Tanah Laut Tahun 2018 - 2023.

Penyusunan Laporan Kinerja Kecamatan Panyipatan Tahun 2023 ini diharapkan dapat mendorong penyelenggaraan tugas pemerintahan dan pembangunan secara baik dan benar (*good governance*), mendorong perbaikan yang akuntabel, beroperasi secara efisien, efektif, dan responsif terhadap aspirasi masyarakat dan lingkungannya, serta menghasilkan umpan balik bagi pemerintah daerah sebagai dasar untuk pengambilan keputusan dan peningkatan kinerja instansi pemerintah yang bermuara pada peningkatan kepercayaan masyarakat kepada Pemerintah Kabupaten Tanah Laut.

Akhirnya, kepada semua pihak yang telah menyumbangkan pikiran dan tenaganya dalam penyusunan Laporan Kinerja Kecamatan Panyipatan Tahun Anggaran 2023 ini, kami mengucapkan terima kasih.

Panyipatan, 07 Februari 2023

Camat Panyipatan,



Muhammad Hadiat Wicaksono, SSTP, M.I.P

NIP. 19870617 200602 1 001

DAFTAR ISI

Halaman

KATA PENGANTAR	i
IKHTISAR EKSEKUTIF	ii
DAFTAR ISI	iv
Tabel – Tabel	vi
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Struktur Organisasi Tugas dan Fungsi	2
C. Isu strategis	18
D. Produk dan layanan	19
E. Sistematika Penyajian	22
BAB II PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA	24
A. Visi RPJMD Kabupaten Tanah laut Tahun 2018 - 2023	24
B. Misi RPJMD	27
C. Tujuan dan sasaran strategis	29
D. Indikator Kinerja Utama (IKU)	32
E. Perjanjian Kinerja Tahun 2023	34
F. Program dan Kegiatan	41
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA	43
A. Akuntabilitas Kinerja Organisasi	43
1. Sasaran RPJMD	45
2. Eselon III (Camat)	51
3. Eselon III (Sekretaris)	60
4. Eselon IV (Kepala Subbagian/Seksi)	66
B. Akuntabilitas Keuangan	143
1. Anggaran dan Realisasi APBD Tahun 2023	143
2. Anggaran dan Realisasi menurut Sasaran dan Program	149
3. Perbandingan Program dan Kegiatan Tahun 2022 dan tahun 2023	152
BAB IV PENUTUP	156
A. Simpulan	156
B. Strategi Peningkatan Kinerja	156

TABEL – TABEL

	Halaman
Tabel 1 : Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Kecamatan Panyipatan Tahun 2019-2023	31
Tabel 2 : Indikator Kinerja Utama (IKU) Kecamatan Panyipatan	34
Tabel 3 : Perjanjian Kinerja Seluruh Pejabat Struktural, baik Eselon II, Eselon III dan Eselon IV Kecamatan Panyipatan Tahun 2023	36
Tabel 4 : Anggaran Penunjang Sasaran Strategis Kantor Kecamatan Panyipatan Tahun 2023	38
Tabel 5 : Skala Pengukuran Kinerja Laporan Kinerja Instansi Pemerintah	44
Tabel 6 : Realisasi Target dan Capaian Sasaran Strategis dan Indikator Kecamatan Panyipatan Tahun 2023	46
Tabel 7 : Perbandingan Target dan Realisasi Indikator Kinerja Utama Tahun 2021 dan Tahun 2022	48
Tabel 8 : Perbandingan capaian realisasi nilai Sakib Kabupaten se Kalimantan Selatan	49
Tabel 9 : Nilai Persepsi, Interval IKM, Interval Konversi IKM, Mutu Pelayanan dan Unit pelayanan	52
Tabel 10 : Realisasi Sasaran Strategis dan Indikator Kinerja Utama Kecamatan Panyipatan Tahun 2022-2023	53
Tabel 11 : Realisasi Sasaran Strategis dan Indikator Kinerja Utama Kecamatan Panyipatan Tahun 2023	57
Tabel 12 : Realisasi Program Penunjang pada Kecamatan Panyipatan Tahun Anggaran 2023	60
Tabel 13 : Realisasi Nilai SAKIP Kecamatan Panyipatan Tahun 2023.....	61
Tabel 14 : Realisasi Nilai RB Kecamatan Panyipatan Tahun 2022 Berdasarkan komponen penilaian	62

Tabel 15 : Realisasi Program Penunjang Sekretariat pada Kecamatan Panyipatan Tahun Anggaran 2023.....	64
Tabel 16 : Realisasi Target Sasaran, indikator Program dan Kegiatan Seksi Tata Pemerintahan Tahun Anggaran 2023.....	66
Tabel 17 : Realisasi anggaran Program Penunjang Kasi Tata Pemerintahan pada Kecamatan Panyipatan Tahun Anggaran 2023.....	73
Tabel 18 : Realisasi Target Sasaran, indikator Program dan Kegiatan Seksi Pemberdayaan Masyarakat Desa Tahun Anggaran 2023	74
Tabel 19 : Realisasi Program Penunjang pada Kasi PMDK Kecamatan Panyipatan Tahun Anggaran 2022.....	81
Tabel 20 : Realisasi Target Sasaran, indikator Program dan Kegiatan Seksi Kemasyarakatan Ta. 2023	84
Tabel 21 : Jumlah Penerima Bansos Di Kecamatan Panyipatan Tahun 2023	87
Tabel 22 : Realisasi Program Penunjang Kasi Kemasyarakatan pada Kecamatan Panyipatan Tahun Anggaran 2022	98
Tabel 23 : Realisasi Target Sasaran, indikator Program dan Kegiatan Seksi Trantib Tahun .2023	100
Tabel 24 : Realisasi Program Penunjang Kasi Tantib pada Kecamatan Panyipatan Tahun Anggaran 2023.....	107
Tabel 25 : Realisasi Target Sasaran, indikator Program dan Kegiatan Seksi Pelayanan	110
Tabel 26 : Realisasi Pelayanan Kecamatan Panyipatan Tahun 2023.....	113
Tabel 27 : Realisasi program penunjang kasi pelayanan pada kecamatan panyipatan tahun 2023	117
Tabel 28 : Realisasi Target Sasaran, indikator Program dan Kegiatan Sub Bagian Umum dan kepegawaian Tahun 2023	119

Tabel 29 : Realisasi Program Penunjang Kasubbag Umum dan kepegawaian pada Kecamatan Panyipatan	
Tahun Anggaran 2023 124
Tabel 30 : Realisasi Target Sasaran, indikator Program dan Kegiatan Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan	
Ta. 2023 126
Tabel 31 :Realisasi Program Penunjang Kasubbag Perencanaan dan Keuangan pada Kecamatan Panyipatan	
Tahun Anggaran 2023 133
Tabel 32 : Realisasi Target Indikator Kinerja eselon IV tahun 2023 135
Tabel 33 : Anggaran dan Realisasi Berdasarkan Program Dan Kegiatan Yang Dilaksanakan Kantor Kecamatan Panyipatan Tahun 2023 140
Tabel 34 : Anggaran dan Realisasi Belanja Kecamatan Panyipatan Tahun 2023 144
Tabel 35 : Anggaran dan Realisasi Belanja Pegawai kecamatan panyipatan Tahun 2023 145
Tabel 36 : Anggaran dan Realisasi Belanja Barang dan Jasa kecamatan panyipatan Tahun 2023 146
Tabel 37 : Anggaran dan Realisasi Belanja Hibah kecamatan panyipatan Tahun 2023 148

Tabel 38 : Anggaran dan Realisasi Belanja Pegawai kecamatan Panyipatan Tahun 2023	149
Tabel 39 : Anggaran dan Realisasi Berdasarkan Program Dan Kegiatan Yang Dilaksanakan Kantor Kecamatan Panyipatan Tahun 2023	149
Tabel 40 : Perbandingan Program dan Kegiatan Serta Pagu Anggaran Kecamatan Panyipatan Tahun 2022-2023.....	153
Tabel 41 : Perbandingan Realisasi Belanja Langsung pada Kecamatan Panyipatan Tahun 2022-2023	155

LAMPIRAN- LAMPIRAN

1. IKU
2. Pernyataan Perjanjian Kinerja Tahun 2023 bertandatangan
3. Cascading / Pohon Kinerja
4. Capaian Per Triwulan
5. Matrik Keselarasan
6. Pernyataan Hasil Reviu RB dan LAKIP

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) merupakan bentuk akuntabilitas dari pelaksanaan tugas dan fungsi yang dipercayakan kepada setiap instansi pemerintah atas pengguna anggaran. Hal terpenting yang diperlukan dalam penyusunan LAKIP adalah pengukuran kinerja dan evaluasi serta pengungkapan secara memadai hasil analisis terhadap pengukuran kinerja.

LAKIP juga berperan sebagai alat kendali, alat penilai kinerja dan alat pendorong terwujudnya *Good Governance and Clean Governance*. Dalam perspektif yang lebih luas, maka LAKIP berfungsi sebagai media mempertanggungjawabkan kepada publik. Semua itu memerlukan dukungan dan peran aktif seluruh lembaga pemerintah pusat dan daerah serta partisipasi masyarakat.

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Tanah Laut (Lembar Daerah Kabupaten Tanah Laut Tahun 2016 Nomor 6), Kecamatan adalah wilayah kerja camat sebagai Perangkat Daerah bahwa dalam rangka meningkatkan kelancaran pelaksanaan tugas dan fungsi kecamatan di lingkungan Pemerintah Kabupaten Tanah Laut sebagaimana yang telah ditetapkan dengan Peraturan Bupati Tanah Laut Nomor 57 Tahun 2017. Adapun pentingnya disusunnya LAKIP adalah:

1. Menyampaikan laporan kegiatan yang telah dilaksanakan baik di bidang pemerintahan, pembangunan, pemberdayaan masyarakat, pemberian pelayanan kepada masyarakat, ketentraman dan ketertiban umum selama 1 (satu) tahun.
2. Memberikan informasi kepada Bupati Tanah Laut tentang pencapaian kinerja Camat serta hambatan dan permasalahan yang dihadapi selama Tahun Anggaran 2023.
3. Sebagai alat control masyarakat terhadap tolak ukur kinerja kecamatan selama satu tahun.

4. Bahan evaluasi sampai sejauh mana manfaat yang telah dicapai dalam pelaksanaan kegiatan Tahun Anggaran 2023.

Penyusunan LAKIP Kecamatan Panyipatan Tahun Anggaran 2023 di dasari atas:

1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin dan Daerah Tingkat II Tabalong (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2756) dengan mengubah Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820) tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
3. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
4. Undang-undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan

- peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
 7. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
 8. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/09/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah;
 9. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/20/M.PAN/11/2008 tentang Pedoman Penyusunan Indikator Kinerja Utama;
 10. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
 11. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
 12. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Laut Tahun 2016 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 25);

B. Struktur Organisasi, Tugas dan Fungsi

Organisasi Pemerintah Kecamatan Panyipatan di Kabupaten Tanah Laut didasarkan dan berlandaskan pada :

1. Peraturan Pemerintah No.19 tahun 2018 tentang Kecamatan;
2. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 06 Tahun 2016 tentang Satuan Organisasi Perangkat Daerah ; dan
3. Peraturan Bupati Nomor 114 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Fungsi dan Tata Kerja Perangkat Daerah..

Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Kecamatan, kedudukan tugas dan fungsi kecamatan Panyipatan adalah sebagai berikut :

1. Kedudukan

Kecamatan dipimpin oleh Camat yang berkedudukan dibawah Sekertaris Daerah dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah. Camat diangkat dari Pegawai Negeri Sipil yang menguasai pengetahuan teknis pemerintahan dan memenuhi persyaratan kepegawaian sesuai dengan ketentuan dan peraturan perundang undangan.

2. Tugas dan fungsi

Tugas Kecamatan adalah melaksanakan kewenangan pemerintahan yang dilimpahkan oleh Bupati untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah.

Fungsi Kecamatan adalah;

- a. Pengkoordinasian kegiatan pemberdayaan masyarakat.
- b. Pengkoordinasian upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum.
- c. Pengkoordinasian penerapan dan penegakan peraturan perundang undangan.
- d. Pengkoordinasian pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum.
- e. Pengkoordinasian penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di tingkat kecamatan.
- f. Pembinaan penyelenggaraan pemerintahan desa dan / atau kelurahan.
- g. Pelaksanaan tugas pelayanan masyarakat yang menjadi ruang lingkup tugasnya dan/ atau yang belum dapat dilaksanakan pemerintahan desa dan kelurahan.

3. Struktur organisasi

Struktur organisasi Kecamatan Panyipatan disusun berdasarkan Peraturan Bupati Tanah Laut Nomor 114 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Fungsi dan Tata Kerja Perangkat Daerah..Untuk melaksanakan tugas pokoknya

Kecamatan Panyipatan Kabupaten Tanah Laut, disusun dengan struktur organisasi yang terdiri dari :

- a. Camat
- b. Sekretaris Camat
- c. Kasubbag Perencanaan dan Keuangan
- d. Kasubbag Umum dan Kepegawaian
- e. Kasi Tata Pemerintahan
- f. Kasi Ketentraman dan Ketertiban
- g. Kasi Kemasyarakatan
- h. Kasi Pemberdayaan Masyarakat dan Desa / Kelurahan
- i. Kasi Pelayanan

Kecamatan atau sebutan lain adalah wilayah kerja Camat sebagai Perangkat Daerah Kabupaten/Kota. Kecamatan merupakan Perangkat Daerah Kabupaten/Kota sebagai pelaksana teknis kewilayahan yang mempunyai wilayah kerja tertentu dan dipimpin oleh Camat. Camat berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati/Walikota melalui Sekretaris Daerah.

1. Uraian tugas Camat sebagai berikut:

- a.) Menetapkan perencanaan strategis kecamatan berdasarkan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), Rencana Pembangunan Jangka Pendek Daerah (RPJPD) Pemerintah Kabupaten Tanah Laut dan program kerja tahun lalu sebagai pedoman kerja;
- b.) Mengoordinasikan, membina, mengawasi dan mengendalikan kegiatan dalam bidang pemerintahan di wilayah kecamatan sesuai dengan kebijakan daerah dan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku
- c.) Mengoordinasikan, membina, mengawasi dan mengendalikan kegiatan dalam bidang ketentraman dan ketertiban umum di wilayah kecamatan sesuai dengan kebijakan daerah dan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku
- d.) Mengoordinasikan, membina, mengawasi dan mengendalikan kegiatan dalam bidang pemberdayaan masyarakat dan desa di kecamatan sesuai dengan kebijakan daerah dan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang

berlaku;

- e.) Mengoordinasikan, membina, mengawasi dan mengendalikan kegiatan dalam bidang pembangunan dan kemasyarakatan di wilayah kecamatan sesuai dengan kebijakan daerah dan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku
- f.) Mengoordinasikan membina dan mengawasi kegiatan dalam bidang kesejahteraan rakyat di wilayah kecamatan sesuai dengan kebijakan Daerah dan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku
- g.) Mengoordinasikan, membina, mengawasi dan mengendalikan kegiatan pelayanan umum dan masyarakat di kecamatan sesuai dengan kebijakan daerah dan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku
- h.) Mengoordinasikan, membina, mengawasi dan mengendalikan penyelenggaraan pelayanan perizinan yang dilimpahkan kepada kecamatan;
- i.) Mengoordinasikan kegiatan dalam bidang penerapan dan penegakkan peraturan perundang-undangan daerah di wilayah kecamatan;
- j.) Mengoordinasikan, membina, mengawasi dan mengendalikan pemeliharaan prasarana, sarana dan fasilitas pelayanan umum di wilayah kecamatan;
- k.) Mengoordinasikan penyelenggaraan tugas pemerintahan, pembinaan keagrariaan, dan pembinaan politik dalam negeri;
- l.) Mengoordinasikan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan yang dilakukan oleh Perangkat Daerah di tingkat kecamatan;
- m.) Membina dan mengawasi penyelenggaraan kegiatan kelurahan;
- n.) Melaksanakan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan kabupaten yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja Pemerintahan Daerah yang ada di kecamatan;
- o.) Mengendalikan pengelolaan urusan kesekretariatan;
- p.) Mengendalikan, mengevaluasi dan melaporkan pelaksanaan tugas kecamatan;

- q.) Membuat laporan hasil pelaksanaan tugas kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah sebagai bahan pertanggungjawaban dan bahan masukan;
- r.) Melaksanakan tugas lain yang diperintahkan oleh peraturan perundang-undangan
- s.) Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsi serta kewenangannya.

2. Uraian tugas Sekretariat sebagai berikut:

Sekretariat mempunyai tugas menyelenggarakan urusan kesekretariatan, mengoordinasikan pelaksanaan kegiatan perencanaan program dan anggaran, administrasi umum dan kepegawaian, serta ketatausahaan.

Sekretariat mempunyai fungsi :

- a. Pengkoordinasian penyelenggaraan tugas Kecamatan;
- b. Pemberian pelayanan administrasi kepada seksi-seksi lain di lingkungan Kecamatan;
- c. Pengkoordinasikan penyusunan rencana program kerja dan anggaran belanja Kecamatan;
- d. Penyiapan Peraturan Perundang-undangan di bidang layanan sesuai dengan norma, standar dan prosedur yang ditetapkan oleh Pemerintah;
- e. Penyelenggaraan urusan tata usaha, rumah tangga/penataan barang;
- f. Pelaksanaan urusan kepegawaian, pengelolaan keuangan serta penataan barang;
- g. Penyelenggaraan kehumasan dan keprotokolan;
- h. Pengkoordinasian pelaksanaan, pengumpulan dan penyusunan data, penilaian, pemantauan evaluasi dan analisa data hasil pelaksanaan tugas, penyiapan dan penyusunan laporan pelaksanaan program kerja dan penyusunan statistik dan dokumentasi di lingkungan Kecamatan;

- i. Pengkoordinasian urusan kedinasan yang menyangkut tata persuratan, pendataan dan pengumpulan bahan pelaporan kedinasan;
- j. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh camat sesuai dengan tugasnya; dan
- k. Pemberian saran-saran dan pertimbangan kepada Camat tentang langkah-langkah dan tindakan yang perlu diambil dalam bidang tugasnya

Untuk melaksanakan tugas-tugas dan fungsi dimaksud Sekretariat Kecamatan Panyipatan ini dilengkapi dengan 2 (Dua) Sub Bagian yaitu:

a. Subbag Perencanaan dan Keuangan

1. Menyiapkan bahan dan melaksanakan penyusunan program, rencana kegiatan dan anggaran Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan
2. Menyiapkan bahan dan menyusun program, rencana kegiatan anggaran kecamatan
3. Menyiapkan bahan dan melaksanakan kerjasama penyusunan rencana strategis
4. Menyiapkan bahan dan menyusun pedoman teknis pelaksanaan kegiatan tahunan
5. Menyiapkan bahan dan menyusun satuan biaya, daftar isian pelaksanaan anggaran, petunjuk operasional kegiatan, revisi anggaran
6. Melaksanakan pengumpulan, pengolahan dan Menyiapkan bahan dan melaksanakan penyusunan laporan kinerja, Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD), Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) dan laporan sejenis sesuai dengan tugas dan fungsinya penyajian data dan statistik kecamatan
7. Menyiapkan bahan dan menyusun petunjuk teknis pengelolaan keuangan
8. Menyiapkan bahan dan melaksanakan penyusunan kegiatan rutin
9. Melaksanakan urusan akuntansi dan verifikasi keuangan

10. Melaksanakan urusan perbendaharaan, pengelolaan penerimaan Negara bukan pajak, pengujian dan penerbitan surat perintah membayar
11. Melaksanakan urusan gaji pegawai
12. Melaksanakan administrasi keuangan
13. Melaksanakan penyiapan pertanggungjawaban dan pengelolaan dokumen keuangan
14. Melaksanakan penyusunan laporan keuangan dan laporan sejenis sesuai dengan tugas dan fungsinya
15. Melaksanakan penyiapan bahan pemantauan tindak lanjut laporan hasil pengawasan dan penyelesaian tuntutan perbendaharaan dan ganti rugi
16. Menyiapkan bahan dan melaksanakan evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan kecamatan
17. Melaksanakan pemantauan, evaluasi penyusunan laporan dan pendokumentasian kegiatan Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan
18. Melaksanakan tugas lain sesuai bidang tugas dan kewenangannya

b. Subbag Umum dan Kepegawaian

1. Menyiapkan bahan dan melaksanakan penyusunan program, rencana kegiatan dan anggaran Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
2. Melaksanakan urusan rencana kebutuhan dan usulan pengembangan pegawai
3. Melaksanakan urusan mutasi, tanda jasa, kenaikan pangkat, pemberhentian dan pensiun pegawai
4. Melaksanakan urusan tata usaha kepegawaian, disiplin pegawai dan evaluasi kinerja pegawai
5. Melaksanakan urusan tata usaha kearsipan
6. Menyiapkan bahan dan melaksanakan fasilitasi penilaian kinerja pegawai

7. Menyiapkan bahan dan mengelola data, dokumen dan informasi kepegawaian
8. Menyiapkan bahan dan menyampaikan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) dan Laporan Harta Kekayaan Aparatur Sipil Negara (LHKASN)
9. Melaksanakan urusan rumah tangga, keamanan dan kebersihan
10. Melaksanakan urusan kerjasama, hubungan masyarakat dan protocol
11. Melaksanakan evaluasi kelembagaan dan ketatalaksanaan
12. Melaksanakan telahan, penyiapan dan penyusunan peraturan perundang-undangan
13. Melaksanakan penyusunan Rencana Kebutuhan Barang (RKBU) dan Rencana Pemeliharaan Barang Unit (RPBU)
14. Melaksanakan penyiapan bahan penatausahaan dan inventarisasi barang
15. Melaksanakan penyiapan bahan administrasi pengadaan, penyaluran, penghapusan dan pemindahan barang
16. Melaksanakan pemantauan, evaluasi penyusunan laporan dan pendokumentasian kegiatan Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
17. Melaksanakan tugas lain sesuai bidang tugas dan kewenangannya

3. Seksi Tata Pemerintahan

Seksi Tata Pemerintahan dipimpin oleh seorang Kepala Seksi mempunyai tugas sebagai berikut :

- a. Menyusun program kerja Seksi Tata Pemerintahan berdasarkan petunjuk teknis dan ketentuan sebagai pedoman kerja untuk kelancaran pelaksanaan tugas.
- b. Menghimpun dan mengolah data kegiatan penyelenggaraan pemerintahan umum tingkat kecamatan, desa dan kelurahan

- c. Menyiapkan bahan dan petunjuk teknis pembinaan pemerintahan desa dan kelurahan.
 - d. Melaksanakan sebagian tugas dalam hal pajak bumi dan bangunan
 - e. Menyiapkan bahan dan melaksanakan tugas bidang pertanahan di Kecamatan
 - f. Melakukan penataan dan pengembangan wilayah kecamatan, desa dan kelurahan
 - g. Melaksanakan fasilitasi dan koordinasi administrasi kependudukan
 - h. Mengumpulkan, mengolah dan menganalisa data kependudukan di wilayah kecamatan
 - i. Menyiapkan bahan dan memproses pelayanan administrasi kependudukan
 - j. Menyiapkan bahan dan melaksanakan kegiatan pembinaan dalam rangka peningkatan dan pemeliharaan sarana dan prasarana pelayanan umum
 - k. Mengoordinasikan kegiatan pengumpulan bahan dan fasilitasi penyelenggaraan pemilu lingkup kecamatan meliputi pemilihan kepala desa dan penjarangan aparat desa
 - l. Menyiapkan bahan dalam rangka koordinasi instansi di daerah, fasilitasi penyelenggaraan pemilu dan pilkada
 - m. Mengoordinasikan persiapan dalam rangka pelaksanaan peringatan hari-hari besar nasional/daerah
 - n. Menyiapkan bahan dan memfasilitasi perselisihan antar desa bidang pemerintahan
 - o. Melaksanakan pemantauan, evaluasi, penyusunan laporan dan pendokumentasian kegiatan Seksi Tata Pemerintahan
 - p. Melaksanakan tugas lain sesuai bidang tugas dan kewenangannya
4. Seksi Ketentraman dan Ketertiban

Seksi Ketentraman dan Ketertiban dipimpin oleh seorang Kepala Seksi dan mempunyai tugas adalah sebagai berikut :

- a. Membantu Camat dalam merumuskan kebijakan, pelaksanaan evaluasi dan pelaporan urusan Ketentraman dan ketertiban;
- b. Melaksanakan pembinaan ketentraman dan ketertiban dalam wilayah kecamatan; dan
- c. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Camat sesuai dengan bidang tugasnya.

5. Seksi Pemberdayaan Masyarakat dan Desa/ Kelurahan

Seksi Pemberdayaan Masyarakat dan Desa/Kelurahan dipimpin oleh seorang Kepala Seksi dan mempunyai tugas adalah sebagai berikut :

- a. Menyusun program kerja Seksi Pemberdayaan Masyarakat dan Desa berdasarkan petunjuk teknis dan ketentuan sebagai pedoman kerja untuk kelancaran pelaksanaan tugas.
- b. Menyusun dan melaporkan data monografi kecamatan serta profil desa dan kelurahan.
- c. Menyiapkan bahan perumusan rencana pembangunan kecamatan (musbang).
- d. Mengoordinasikan, memfasilitasi dan memberikan pelayanan administrasi Izin Mendirikan Bangunan (IMB) yang dilimpahkan ke Kecamatan.
- e. Mengoordinasikan pembinaan, pengawasan dan pelaporan kegiatan penanggulangan pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup
- f. Menyiapkan bahan dan melaksanakan fasilitasi pembinaan dan pengembangan kegiatan perekonomian
- g. Melaksanakan dan mengoordinasikan penyuluhan usaha kecil, mikro dan menengah kepada masyarakat lingkup kecamatan

- h. Melaksanakan dan mengoordinasikan penyuluhan usaha kecil, mikro dan menengah kepada masyarakat lingkup kecamatan
- i. Melaksanakan dan mengoordinasikan penyuluhan usaha kecil, mikro dan menengah kepada masyarakat lingkup kecamatan
- j. Menyiapkan bahan dan memproses rekomendasi perizinan dalam bidang perekonomian, pemberdayaan masyarakat dan desa
- k. Menyiapkan bahan dan melaksanakan fasilitasi pembinaan dan pengembangan swadaya dan pemberdayaan masyarakat
- l. Menyiapkan bahan dan melaksanakan fasilitasi pembinaan dan pengembangan kegiatan perekonomian
- m. Mengoordinasikan dan memfasilitasi pelaksanaan pungutan atas pajak dan retribusi Daerah di wilayah kecamatan
- n. Menyiapkan bahan dan memfasilitasi penyelenggaraan kerjasama antar desa dan penyelesaian perselisihan antar desa bidang perekonomian, pemberdayaan masyarakat dan Desa
- o. Menyiapkan bahan dan menyelenggarakan lomba/penilaian desa/kelurahan tingkat kecamatan
- p. Melaksanakan pemantauan, evaluasi, penyusunan laporan dan pendokumentasian kegiatan Seksi Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
- q. Melaksanakan tugas lain sesuai bidang tugas dan kewenangannya.

6. Seksi Kemasyarakatan

Seksi Kemasyarakatan dipimpin oleh seorang Kepala Seksi dan mempunyai tugas adalah sebagai berikut :

- a. Menyusun program kerja Seksi Kemasyarakatan berdasarkan petunjuk teknis dan ketentuan sebagai pedoman kerja untuk kelancaran pelaksanaan tugas;

- b. Menyiapkan bahan perumusan kebijakan dan menyusun petunjuk teknis pembinaan dan pengembangan kesejahteraan rakyat;
- c. Menyiapkan bahan dan memproses rekomendasi perizinan dalam bidang kemasyarakatan
- d. Mengoordinasikan dan memfasilitasi pembinaan dan pengembangan pendidikan, generasi muda, keolahragaan, kebudayaan, kepramukaan dan peranan wanita.
- e. Mengumpulkan, mengolah data dan informasi, menginventarisasi permasalahan serta melaksanakan pemecahan permasalahan yang berkaitan dengan pembinaan kemasyarakatan
- f. Menyusun program kerja pelaksanaan pembinaan pelayanan dan bantuan sosial, peranan wanita, pembinaan kepemudaan serta olah raga termasuk pengentasan kemiskinan
- g. Mengumpulkan dan menyiapkan bahan penyaluran bantuan sosial terhadap bencana alam dan bencana lainnya
- h. Mengumpulkan, mengolah, menganalisa dan menyajikan data kesejahteraan rakyat di wilayah kecamatan
- i. Menyiapkan bahan dan memfasilitasi pembinaan lembaga adat dan komunitas adat terpencil serta organisasi sosial/kemasyarakatan dan lembaga swadaya masyarakat
- j. Menyiapkan bahan dan memfasilitasi penanggulangan masalah sosial, pencegahan dan penanggulangan bencana dan pengungsi
- k. Menyiapkan bahan dan memfasilitasi kegiatan pembinaan dan pengawasan pelaksanaan program pengembangan dan peningkatan kesehatan masyarakat, penyediaan sarana dan prasarana penyelenggaraan pelayanan kesehatan dan keluarga berencana

- l. Mengoordinasikan kegiatan pengawasan, pencegahan dan penanggulangan penyalahgunaan NAPZA (narkotika, psikotropika, zat aditif) obat dan bahan berbahaya lainnya
- m. Mengoordinasikan dan memfasilitasi pembinaan dan pengembangan ketenagakerjaan dan perburuhan
- n. Melaksanakan pemantauan, evaluasi, penyusunan laporan dan pendokumentasian kegiatan Seksi Kemasyarakatan
- o. Melaksanakan tugas lain sesuai bidang tugas dan kewenangannya

7. Seksi Pelayanan

Seksi Pelayanan mempunyai tugas :

- a. Menyusun program, mengatur, mengendalikan dan mengevaluasi pelaksanaan kegiatan Seksi Pelayanan sesuai prosedur untuk kelancaran pelaksanaan tugas;
- b. Menyiapkan bahan penyusunan pedoman dan petunjuk teknis penyelenggaraan pelayanan;
- c. Melaksanakan koordinasi dan kerjasama dengan instansi pemerintah dan instansi lainnya yang berkaitan dengan pembinaan pelayanan di wilayah Kecamatan.
- d. Menyelenggarakan pelayanan administrasi kecamatan
- e. Menyiapkan bahan dan melaksanakan inovasi-inovasi pelayanan
- f. Memeriksa dokumen/berkas pemohon pelayanan administrasi kecamatan
- g. Menyusun dan mengevaluasi laporan penyelenggaraan pelayanan administrasi kecamatan
- h. Mengadministrasikan pelayanan penyelenggaraan pelayanan administrasi kecamatan
- i. Menyerahkan dokumen layanan administrasi kecamatan
- j. Mengumpulkan, mengolah, menganalisis dan menyajikan data dan informasi pelayanan administrasi kecamatan
- k. Melaksanakan administrasi, fasilitasi dan upaya pemecahan masalah pengaduan, informasi, dan konsultasi layanan administrasi kecamatan

- l. Melaksanakan pemantauan, evaluasi, penyusunan laporan dan pendokumentasian kegiatan Seksi Pelayanan
- m. Melaksanakan tugas lain sesuai bidang tugas dan kewenangannya

C. SUMBER DAYA MANUSIA

Dalam mendukung tugas dan fungsinya Kecamatan Panyipatan memiliki sumberdaya manusia berjumlah 24 orang yang terdiri dari :

- 1. PNS : 14 orang
- 2. PTT : 10 orang

Jumlah PNS Kecamatan Panyipatan berdasarkan kualifikasi pendidikan, pangkat dan golongan dan jumlah Pejabat Struktural dan fungsional pada Tahun 2023 adalah:

- 1. Berdasarkan Kualifikasi Pendidikan :

NO.	PENDIDIKAN	JUMLAH ORANG	KETERANGAN
1.	Pasca Sarjana / Strata 2 / S2	1	
2.	Sarjana / Strata 1 / S1	6	
3.	D 3	2	
4.	D 2	0	
5.	SLTA / Sederajat	5	
6.	SLTP / Sederajat	0	
JUMLAH		14	

2. Berdasarkan Pangkat dan Golongan :

NO.	PANGKAT	URAIAN		JUMLAH (ORANG)	KET
1.	Pembina	Golongan	IV / a	1	
2.	Penata Tk. I	Golongan	III / d	2	
3.	Penata	Golongan	III / c	3	
4.	Penata Muda Tk.I	Golongan	III / b	2	
5.	Penata Muda	Golongan	III / a	0	
6.	Pengatur Tk. I	Golongan	II / d	3	
7.	Pengatur	Golongan	II / c	1	
8.	Pengatur Muda Tk.I	Golongan	II / b	2	
JUMLAH				14	

3. Berdasarkan Pejabat Struktural

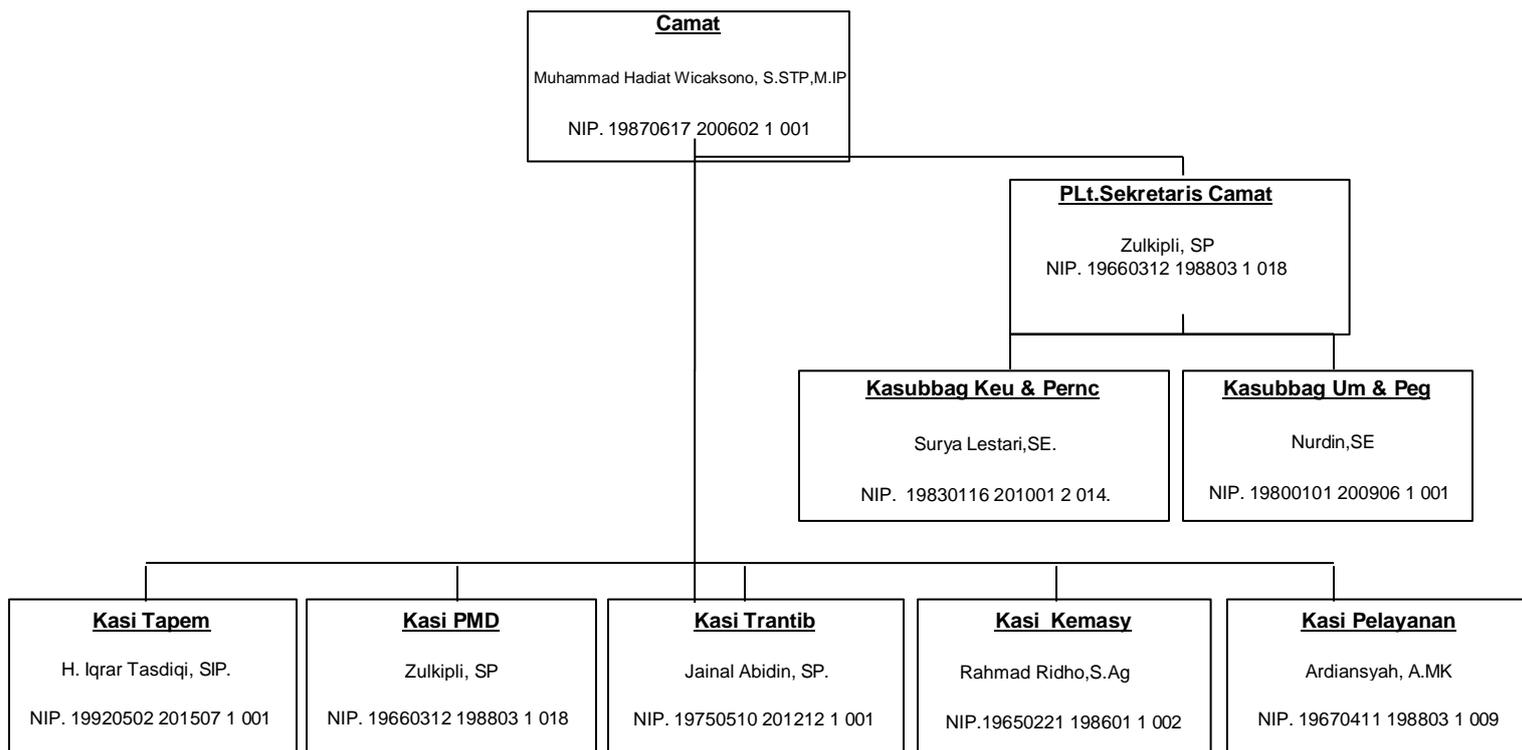
- a. Eselon IIIa : 1 orang
- b. Eselon IIIb : 0 orang
- c. Eselon IVa : 4 orang
- d. Eselon IVb : 2 orang
- e. Staf Kecamatan : 7 orang

4. Berdasarkan Pejabat Fungsional

- a. Tidak ada

Bagan struktur SOPD Kecamatan Panyipatan berdasarkan peraturan Bupati Tanah laut Nomor 114 tahun 2021 adalah sebagai berikut:

Bagan Struktur SKPD Kecamatan Panyipatan



C. Isu Strategis

Kecamatan Panyipatan sebagai satuan organisasi di lingkungan Pemerintahan Kabupaten Tanah Laut dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya serta perkembangan organisasinya dipengaruhi oleh lingkungan yang bersifat strategis.

Strategi disusun dengan melihat potensi yang dimiliki baik potensi internal maupun eksternal yang mengacu pada kekuatan dan pemanfaatan peluang yang ada serta mempertimbangkan kelemahan dan ancaman bagi organisasi. Strategi mencapai tujuan dan sasaran merupakan strategi unit kerja yang berisi rencana secara menyeluruh dan terpadu tentang upaya-upaya organisasi dalam mencapai tujuan.

Adapun Isu strategi yang dapat mempengaruhi penyelenggaraan tugas dan fungsi pada Kantor Kecamatan Panyipatan antara lain:

1. Kurangnya koordinasi dan kolaborasi dengan SKPD terkait.
2. Kurangnya pemahaman aparat akan tugas pokok dan fungsinya.
3. Kurangnya pendayagunaan aparatur kecamatan dan desa dalam rangka terciptanya pelayanan yang baik.

4. Kurangnya fasilitasi kepada masyarakat serta rumitnya sistem dan kualitas pelayanan kepada masyarakat yang kurang memadai.

Adapun strategi yang dijalankan untuk melaksanakan misi ini adalah :

1. Meningkatkan koordinasi dan kolaborasi dengan SKPD terkait.
2. Memperkuat pemahaman aparat akan tugas pokok dan fungsinya.
3. Mendayagunakan aparatur kecamatan dan desa dalam rangka terciptanya pelayanan yang baik.
4. Memberikan fasilitasi kepada masyarakat dengan menyederhanakan dan mempercepat sistem dan kualitas pelayanan kepada masyarakat.

Untuk melihat rencana strategi dapat berjalan dengan baik maka perlu disusun suatu kebijakan arah pembangunan dalam menjabarkan program dan kegiatan yang disusun, yaitu :

1. Melakukan koordinasi yang intensif.
2. Mengikutsertakan aparatur dalam diklat-diklat maupun pelatihan - pelatihan.
3. Memberikan pemahaman kepada aparat kecamatan dan desa mengenai tugas pokok dan fungsinya melalui arahan ataupun diklat formal dan non formal.
4. Melakukan pendekatan secara persuasif kepada masyarakat dalam rangka meningkatkan pelayanan publik yang baik.

D. Produk Dan Layanan

Produk dan layanan yang dihasilkan oleh Kantor Kecamatan Panyipatan berdasarkan subbagian masing- masing adalah sebagai berikut:

1. Sekretariat

Produk yang dihasilkan dari Sekretariat Kecamatan terbagi dalam 2 (dua) subbagian yaitu:

- a) Subbagian Umum dan Kepegawaian

Produk dan layanan yang dihasilkan oleh Subbagian Umum dan Kepegawaian yaitu:

- 1) Kenaikan Pangkat Aparatur Kecamatan Panyipatan

2) Pendidikan dan Pelatihan Aparatur

3) Hukuman Disiplin

4) Cuti

5) Pensiun

6) Mutasi

b) Subbagian Perencanaan dan Keuangan

Produk dan layanan yang dihasilkan oleh subbagian Perencanaan dan Keuangan yaitu:

1) Rencana Strategis (Renstra)

2) Rencana Kerja (Renja)

3) Rencana Kerja Anggaran (RKA)

4) Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA)

5) Rencana Anggaran Kas

6) Laporan Keuangan Bulanan

7) Laporan Keuangan Semesteran

8) Laporan Keuangan Tahunan (LRA, Neraca, CALK)

9) LKPJ dan LPPD

10) Laporan Kinerja/ Lakip

11) Laporan Monitoring dan Evaluasi per triwulan, dan

12) Laporan Belanja Langsung

2. Seksi- Seksi

a) Seksi PMD/K

Produk dan layanan yang dihasilkan oleh Seksi PMD/K yaitu:

1. Fasilitasi pengelolaan keuangan Desa dan pendayagunaan Aset Desa
2. Pembinaan Aparatur Desa terkait pemberdayaan masyarakat desa dan pengelolaan ADD

b) Seksi Tata Pemerintahan

Produk dan layanan yang dihasilkan oleh Seksi Tata Pemerintahan yaitu:

- 1) Pelayanan KTP dan KK
- 2) Perekaman E-KTP
- 3) Surat Keterangan pindah domisili
- 4) Legalisasi KTP dan KK
- 5) Surat Keterangan Ahli Waris

c) Seksi Kemasyarakatan

Produk dan layanan yang dihasilkan oleh Seksi Kemasyarakatan yaitu:

- 1) Surat Keterangan Tidak Mampu (SKTM)
- 2) Rekomendasi Nikah
- 3) Usulan proposal dari masyarakat

d) Seksi Ketentraman dan Ketertiban

Produk dan layanan yang dihasilkan oleh Seksi Ketentraman dan Ketertiban yaitu:

- 1) Surat Keterangan Catatan Kepolisian (SKCK)
- 2) Surat izin Keramaian
- 3) Surat Kehilangan
- 4) Surat Keterangan Ghoib

5) Fasilitasi keluhan/ laporan masyarakat masalah keamanan.

e) Seksi Pelayanan

1) Dokumen Indeks Kepuasan Masyarakat

E. Sistematika Penyajian

Dalam pembuatan Laporan Kinerja Kecamatan Panyipatan Kabupaten Tanah Laut untuk tahun 2023 ini tim penyusun membagi dalam beberapa pokok bahasan sebagai berikut, yaitu :

Ringkasan

Eksekutif Daftar

Isi

BAB I Pendahuluan

- A. Latar Belakang
- B. Struktur Organisasi Tugas dan Fungsi
- C. Isu Strategis
- D. Produk Layanan
- E. Sistematika Penyajian

BAB II Perencanaan dan Perjanjian Kinerja

- A. Visi RPJMD
- B. Misi RPJMD
- C. Tujuan dan Sasaran Strategis
- D. Indikator Kinerja Utama
- E. Perjanjian Kinerja
- F. Program dan Kegiatan

BAB III Akuntabilitas

Kinerja

A. Akuntabilitas Kinerja Organisasi

- 1. Sasaran RPJMD
- 2. Eselon III (Sekertaris/ Kepala Bagian) A

- 1) Eselon IV (Kasubbag/ Kasubbid) A.1
- 2) Eselon IV (Kasubbag/ Kasubbid) A.2
3. Eselon III (KepalaBidang) B
 - 1) Eselon IV (Kasubbag/ Kasubbid) B.1
 - 2) Eselon IV (Kasubbag/ Kasubbid) B.2
- B. Akuntabilitas Keuangan
 1. Anggaran dan Realisasi APBD 2023
 2. Anggaran dan Realisasi Menurutsasaran dan Program
 3. Perbandingan Program dan Kegiatan Tahun 2021 dan 2022

BAB IV Penutup

- A. Kesimpulan
- B. Strategi Peningkatan Kinerja Lampiran

Lampiran :

1. IKU
2. Pernyataan Hasil Reviu
3. Pernyataan Perjanjian Kinerja Tahun 2023 bertandatangan
4. Cascading/ Pohon Kinerja
5. Capaian Kinerja Per Triwulan (1-4)
6. Monev Renstra
7. Matrik Keselarasan

BAB II

PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA

A. Visi RPJMD Kabupaten Tanah Laut Tahun 2018 - 2023

RPJMD Kabupaten Tanah Laut ini telah menjadi acuan dalam penyusunan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) dan Rencana Strategis SKPD untuk tahun 2018 sampai dengan 2023 yang memuat visi, misi, tujuan, sasaran, indikator sasaran serta target selama periode tersebut.

Dalam melaksanakan program pembangunan Kabupaten Tanah Laut tahun 2018-2023 sebagaimana ditetapkan dalam Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2019 memiliki Motto : Kerja Keras, Cerdas, Tuntas, Berkualitas, dan Ikhlas.

**“Terwujudnya Tanah Laut Yang BERINTERAKSI:
BERKARYA, INOVASI, TERTATA, RELIGIUS, AKTUAL,
DAN SINERGI”**

Visi adalah suatu gambaran jauh kedepan, kemana suatu organisasi/lembaga hendak dibawa. Untuk mewujudkan hal tersebut, maka dibarengi dengan **Visi** pembangunan daerah tahun 2018-2023 yaitu sebagai berikut :

Visi diatas dimaksudkan untuk menjadi dasar Kecamatan Panyipatan sebagai instansi pemerintah daerah yang berkompeten dan profesional dalam pelayanan publik kepada masyarakat serta dapat menciptakan hal-hal baru dalam pelayanan yang pada akhirnya mampu bersinergi dengan masyarakat untuk mencapai kesejahteraan tetap memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku sehingga terciptanya Indeks Kepuasan Masyarakat yang lebih baik.

Kata “BERINTERAKSI” pada Visi di atas merupakan singkatan dari frasa: “Berkarya, Inovasi, Tertata, Religius, Aktual, dan Sinergi”. Penjabaran makna dari Visi Daerah Kabupaten Tanah Laut Tahun 2018-2023 adalah sebagai berikut:

Berkarya

Maknanya adalah bahwa selama periode 2018-2023, para pelaku pembangunan di Daerah Kabupaten Tanah Laut, secara bersama-sama, berkarya diwujudkan dengan meningkatkan kualitas sumberdaya manusia dan pelayanan masyarakat yang berbasis teknologi, yang pada gilirannya nanti meningkatkan pembangunan ekonomi, social dan budaya di Daerah Kabupaten Tanah Laut

Inovasi

Inovasi dalam penyelenggaraan pelayanan publik, yang dilaksanakan seluruh perangkat Daerah Kabupaten Tanah Laut, harus semakin ditingkatkan dalam rangka percepatan peningkatan taraf kesejahteraan rakyat. Inovasi ini berupa terobosan jenis pelayanan yang mampu memberikan manfaat bagi masyarakat, baik secara langsung maupun tidak langsung diwujudkan dengan menciptakan inovasi di segala sendi kehidupan masyarakat dan pengembangan industri kreatif.

Tertata

Aspek administrasi dan aspek substansi diatur secara tertib dalam sebuah siklus atau proses perencanaan yang semakin berkualitas. Dengan demikian, kualitas perencanaan di perangkat daerah, terutama yang berkaitan dengan akuntabilitas kinerja harus semakin ditingkatkan secara berkesinambungan dengan tujuan membangun tata kelola pemerintahan yang baik (Good Governance).

Religius

Peran sektor keagamaan harus semakin ditingkatkan untuk peningkatan produktivitas aparatur dan masyarakat. Aparatur sipil di tiap perangkat daerah harus

menjadi teladan dan menginspirasi upaya peningkatan produktivitas pada semua lini kehidupan kemasyarakatan dengan tujuan meningkatkan kuantitas dan kualitas religiusitas dalam penyelenggaraan pemerintahan Daerah dan kehidupan masyarakat.

Aktual

Penekanan pada aspek aktual ini adalah bahwa pilihan kebijakan serta program dan kegiatan dari perangkat daerah harus relevan secara waktu, relevan secara lokasi, dan relevan dengan pihak yang dilayani, yaitu masyarakat di Daerah Kabupaten Tanah Laut.

Sinergi

Sinergi dimaksudkan untuk penguatan prinsip kegotong-royongan dalam upaya peningkatan kesejahteraan rakyat. Ego sektoral dan ego bidang harus dihapus dan digantikan dengan integrasi, sinkronisasi, dan sinergi baik antardaerah, antarruang, antarwaktu, antarfungsi pemerintah maupun antara pusat dan daerah dengan tujuan membangun sinergitas yang baik antartingkat pemerintahan dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Tagline dari Visi Daerah Kabupaten Tanah Laut tahun 2018-2023 adalah “*DESA DIBINA, KOTA DITATA*”. Sedangkan motto dalam pencapaiannya adalah “*KERJA KERAS, CERDAS, TUNTAS, BERKUALITAS, DAN IKHLAS*”.

Dengan demikian, fokus dari keseluruhan Visi Daerah Kabupaten Tanah Laut tahun 2018- 2023 adalah Tanah Laut yang *BERINTERAKSI* pada lokus “*DESA DIBINA, KOTA DITATA*” melalui “*KERJA KERAS, CERDAS, TUNTAS, BERKUALITAS, DAN IKHLAS*”. Fokus pada lokus “*DESA DIBINA, KOTA DITATA*” adalah karena pada hakikatnya masyarakat berdomisili di wilayah perdesaan dan perkotaan.

Kondisi yang diharapkan dari pembinaan desa dan penataan kota di seluruh wilayah Kabupaten Tanah Laut adalah karya nyata dalam wujud peningkatan ketahanan sosial, ketahanan ekonomi, dan ketahanan lingkungan di tingkat perdesaan dan perkotaan.

B. Misi RPJMD

Misi merupakan suatu yang harus dilaksanakan agar tujuan Organisasi dapat terlaksana dan berhasil dengan baik sesuai dengan visi yang telah ditetapkan. Dengan adanya misi diharapkan seluruh pegawai dan pihak lain yang berkepentingan dapat mengenal kantor dan mengetahui peran dan program-programnya serta hasil yang akan diperoleh dimasa yang akan datang.

Berdasarkan Visi tersebut di atas, kemudian dijabarkan ke dalam **3 Misi** sebagai berikut :

Rencana Strategis Kecamatan Panyipatan yaitu mendukung Visi dan Misi Kepala Daerah dan mendukung Misi pertama, Misi ketiga dan Misi keempat Kepala Daerah, dengan menetapkan Tujuan dan Sasaran Strategi Kecamatan Panyipatan Kabupaten Tanah Laut serta cara pencapaian tujuan dan Sasaran tersebut akan diuraikan dalam bab ini, kemudian sasaran yang ingin dicapai dalam tahun 2023 yaitu bertepatan dengan tahun ke empat tahun Renstra akan dijelaskan dalam Rencana Kinerja Tahunan 2023 pada pembahasan selanjutnya.

Misi : 1 Meningkatkan akses dan kualitas layanan masyarakat lainnya, Dengan indikator Cakupan Kinerja Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN) .

Misi : 3 Membangun tata kelola pemerintahan yang baik (Good Governance), indikator Nilai SAKIP, Nilai RB

Misi : 5 Meningkatkan aksi social keagamaan, Indikator Cakupan kinerja program aksi keagamaan dan sosial lingkup kecamatan.

Memperhatikan perubahan kondisi yang akan dihadapi pada masayakangan datang dan dalam rangka mewujudkan “**Tanah Laut yang BERINTERAKSI**”, maka misi pembangunan Daerah Kabupaten Tanah Laut pada periode 2018–2023 adalah sebagai berikut:

BERKARYA Diwujudkan dengan meningkatkan kualitas sumber daya manusia dan pelayanan masyarakat yang berbasis teknologi, yang pada gilirannya nanti meningkatkan pembangunan ekonomi, social dan budaya di Daerah Kabupaten Tanah Laut

INOVASI	Diwujudkan dengan menciptakan inovasi di segala sendi kehidupan masyarakat dan pengembangan industri kreatif
TERTATA	Diwujudkan dengan membangun tatakelola pemerintahan yang baik (<i>Good Governance</i>)
RELIGIUS	Diwujudkan dengan meningkatkan kuantitas dan kualitas religiusitas dalam penyelenggaraan pemerintahan Daerah dan kehidupan masyarakat
AKTUAL dan SINERGI	Diwujudkan dengan membangun sinergitas yang baik antar tingkat pemerintahan dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat

C. Tujuan dan Sasaran Strategis

1). Tujuan

Dengan menitik beratkan pada visi dan misi yang telah diuraikan diatas maka Sasaran Kecamatan Panyipatan merupakan penjabaran dari tujuan yang mengacu pada renstra Kecamatan Panyipatan Tahun 2018-2023 diuraikan sebagai berikut:

1. Meningkatkan kualitas pelayanan publik bidang Pemerintahan, Kemasyarakatan, Pemberdayaan Masyarakat Desa, Keamanan dan Ketertiban serta bidang Pelayanan.
2. Meningkatkan kualitas perencanaan, pelaporan kinerja dan pelaporan keuangan
3. Meningkatkan tata kelola administrasi perkantoran Kecamatan Panyipatan yang akuntabel.

Pernyataan tujuan Kecamatan Panyipatan di atas, mengandung makna adanya tekad yang kuat untuk menjadikan Kecamatan Panyipatan berkualitas intelektual dan profesional baik dibidang pelayanan publik bidang Pemerintahan, Kemasyarakatan, Pemberdayaan Masyarakat Desa, Keamanan dan Ketertiban serta bidang Pelayanan, karena bukan pekerjaan mudah untuk memenuhi kepuasan Pelayanan kepada Masyarakat. Melalui tujuan tersebut diharapkan Kecamatan Panyipatan menjadi teladan bagi Kecamatan lainnya dilingkungan Pemerintah Kabupaten Tanah Laut dalam mewujudkan apa yang menjadi visi Pemerintah Kabupaten Tanah Laut.

Tujuan yang telah ditetapkan Kecamatan Panyipatan merupakan implementasi dari pernyataan organisasi yang akan dicapai dan dilaksanakan dari kurun waktu 1 (satu) tahun hingga 5 (lima) tahun sehingga memudahkan bagi Camat beserta jajarannya untuk mencapai kinerja yang diinginkan sesuai dengan visi dan misi Kepala Daerah.

2). Sararan

Sasaran strategis yang telah dirumuskan Kecamatan Panyipatan Kabupaten Tanah Laut sebagaimana sasaran Renstra adalah sebagaimana berikut:

- 1) Meningkatnya kualitas pelayanan publik kepada masyarakat;
- 2) Meningkatnya Tata Kelola Pemerintahan yang baik di SKPD;
- 3) Meningkatkan kualitas layanan administrasi umum, kepegawaian dan perencanaan.

Sasaran merupakan bagian integral dari proses perencanaan organisasi. Penjabaran dari tujuan secara lebih spesifik dan terukur dirumuskan lebih lanjut ke dalam sasaran. Oleh karena itu sasaran haruslah terinci dan dapat diukur. Uraian dari tujuan dan sasaran jangka panjang yang akan di capai oleh Kecamatan Panyipatan Kabupaten Tanah Laut sehubungan dengan visi dan misi yang ditetapkan. Konsep dasar strategi adalah memberdayakan kekuatan untuk mencapai suatu keadaan yang diinginkan, jadi merupakan cara atau langkah mencapai tujuan dan sasaran yang dijabarkan ke dalam kebijakan-kebijakan dan progam/kegiatan. Berdasarkan tujuan dan sasaran Kecamatan Panyipatan, maka strategi dan kebijakan yang akan dilakukan periode 2018-2023.

Adapun tujuan dan sasaran jangka menengah Kecamatan Panyipatan Tahun 2019 – 2023 (target 5 tahun) pada renstra disajikan dalam table berikut:

Tabel. 1

Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Kecamatan Panyipatan Tahun 2019-2023

No	Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Target Kinerja Tujuan/Sasaran Pada Tahun ke-				
					2019	2020	2021	2022	2023
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
1	Terwujudnya kualitas pelayanan publik di kecamatan	IKM	Meningkatnya kualitas pelayanan publik kepada masyarakat	Tingkat Kepuasan Masyarakat terhadap pelayanan umum yang ada dikecamatan	B	B	Baik (87)	Baik (90)	Baik (90)
2	Terwujudnya Implementasi tata kelola pemerintahan yang baik	Indek RB	Meningkatnya Implementasi Reformasi Birokrasi dan Akuntabilitas Kinerja	Nilai RB			60 (Cukup)	70 (Baik)	70 (Baik)
				Nilai SAKIP	B	B	75 (Baik)	75 (Baik)	75 (Baik)
3	Terwujudnya tata kelola administrasi yang tertib, efektif dan efisien	Presentase pengelolaan administrasi perkantoran dan kepegawaian Perencanaan keuangan yang tertib	meningkatnya kualitas layanan administrasi umum dan kepegawaian	Persentase layanan administrasi umum dan kepegawaian yang tertib	100%	100%	100%	100%	100%

Penjelasan Tabel :

1. Meningkatkan kualitas pelayanan publik kepada masyarakat; dengan indikator Tingkat Kepuasan masyarakat terhadap pelayanan umum yang ada di Kecamatan (Indeks Kepuasan Masyarakat).
2. Meningkatkan akuntabilitas kinerja pengelolaan administrasi pemerintahan kecamatan serta Peningkatan kualitas pelayanan administrasi umum dan kepegawaian; dengan indikator sasaran ada dua yaitu Nilai saki dan Nilai RB dengan Target Nilai.

Presentase pengelolaan perencanaan dan Keuangan yang baik Sasaran strategi ini merupakan tanggungjawab Kecamatan Panyipatan secara keseluruhan, sehingga Sasaran ini beserta indikatornya akan diturunkan ke seksi- seksi penanggungjawab yang ada di kecamatan.

D. Indikator Kinerja Utama (IKU)

Berdasarkan visi dan misi serta kriteria pengukuran kinerja Pemerintah Kabupaten Tanah Laut di atas, Pemerintah Kabupaten Tanah Laut menetapkan tujuan yang merupakan hasil yang diharapkan sebagai penjabaran atau operasionalisasi dari pernyataan visi dan misi yang bersangkutan yang wajib dijadikan pegangan dalam pelaksanaan tugas seluruh aparat Pemerintah Kabupaten Tanah Laut, yang antara lain terdiri dari:

- 1) Peningkatan layanan bidang pendidikan dan pelatihan yang berkualitas, merata dan terjangkau bagi seluruh masyarakat.
- 2) Peningkatan layanan bidang kesehatan yang berkualitas, merata dan terjangkau bagi seluruh masyarakat.
- 3) Peningkatan kualitas layanan masyarakat lainnya secara merata dan terjangkau untuk mendukung pembangunan ekonomi, sosial dan budaya.
- 4) Peningkatan Inovasi dalam Pelayanan Publik.
- 5) Peningkatan Inovasi di masyarakat dan Pengembangan Industri Kreatif.
- 6) Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih serta layanan publik yang berkualitas berbasis teknologi informasi.

- 7) Mewujudkan masyarakat yang berakhlak mulia.
- 8) Meningkatkan kesejahteraan sosial.
- 9) Terwujudnya pembangunan Infrastruktur Sosial dan Ekonomi yang berkualitas.
- 10) Peningkatan kinerja unit usaha sektor unggulan daerah.
- 11) Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup.
- 12) Peningkatan Upaya Membina Desa dan Menata Kota.

Dan sebagai bentuk pertanggungjawaban kepada publik atas kinerja pemerintah, maka diperlukan suatu pengukuran kinerja untuk menunjukkan apakah sasaran atau kegiatan telah berhasil dicapai, yang kemudian dituangkan dalam Indikator Kinerja. Agar sasaran kegiatan dan program berjalan efektif, efisien dan optimal maka ditetapkan suatu pengukuran Indikator Kinerja strategis yang menjadi prioritas di setiap Instansi pemerintah sebagai suatu bentuk penajaman sasaran sehingga diharapkan tujuan visi dan misi organisasi dapat tercapai sesuai dengan perencanaan yang tertuang dalam RPJMD, RENSTRA maupun RENJA, yang telah ditetapkan.

Penetapan Indikator Kinerja Utama Kecamatan Panyipatan disusun dengan maksud dan tujuan :

1. Untuk memperoleh informasi kinerja yang penting dan diperlukan dalam menyelenggarakan manajemen kinerja secara baik.
2. Untuk memperoleh ukuran keberhasilan dari pencapaian suatu tujuan dan sasaran strategis organisasi yang digunakan untuk perbaikan kinerja dan peningkatan akuntabilitas kinerja.

Indikator Kinerja Utama adalah ukuran keberhasilan dari suatu tujuan dan sasaran strategis operasional. Setiap lembaga atau Instansi pemerintah wajib merumuskan Indikator Kinerja Utama sebagai suatu prioritas program dan kegiatan yang mengacu pada sasaran strategis dalam RPJMD dan RENSTRA Satuan Kerja Perangkat Daerah. IKU Kecamatan Panyipatan dapat dilihat pada berikut ini :

Tabel 2.

Indikator Kinerja Utama (IKU) Kecamatan Panyipatan

NO.	Sasaran Sterategis	Indikator Kinerja	Penjelasan Rumus	Penanggung Jawab
1.	Meningkatnya kualitas Pelayanan Publik kepada masyarakat.	Tingkat kepuasan Masyarakat terhadap pelayanan Umum yang ada di kecamatan.	Hasil survey	Semua Seksi di kecamatan

E. Perjanjian Kinerja

Perjanjian kinerja adalah lembar/dokumen yang berisikan penugasan dari pimpinan instansi yang lebih tinggi kepada pimpinan instansi yang lebih rendah, untuk melaksanakan program/kegiatan yang disertai dengan indikator kinerja. Melalui perjanjian kinerja, terwujudlah komitmen penerima amanah dan kesepakatan antara penerima dan pemberi amanah atas kinerja terukur tertentu berdasarkan tugas, fungsi dan wewenang serta sumber daya yang tersedia.

Dokumen Perjanjian Kinerja sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Negara Pedayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang petunjuk teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Review atas Laporan atas Kinerja Instansi Pemerintah, merupakan suatu Dokumen pernyataan Kinerja/Kesepakatan kinerja/ Perjanjian Kinerja antara atasan dan bawahan untuk mewujudkan target kinerja tertentu berdasarkan sumber Daya yang dimiliki instansi, Kinerja yang di sepakati tidak dibatasi pada kinerja yang dihasilkan atas kegiatan tahun bersangkutan, tetapi termasuk kinerja (Outcome) yang seharusnya terwujud akibat kegiatan tahun tahun sebelumnya, sehingga kinerja setiap tahunnya menjadi berkesinambungan.

Penetapan Kinerja Kecamatan Panyipatan Tahun 2023 ditetapkan mengacu pada Sasaran Strategis Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), untuk mencapai Sasaran Strategis RPJMD Kabupaten Tanah Laut, Kecamatan Panyipatan Menetapkan Indikator Kinerja Utama (IKU), IKU tersebut di ukur dengan beberapa Indikator Kegiatan untuk Mencapai Sasaran Strategis, yang mana Sasaran Strategis

Kecamatan Panyipatan ditetapkan untuk mendukung pencapaian sasaran RPJMD Kabupaten Tanah Laut, Perjanjian Kinerja Kecamatan Panyipatan Tahun 2023 dan Indikator Kinerja yang mengacu pada Tujuan dan Sasaran Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang telah disepakati baik oleh Camat , Pejabat Eselon III dan Pejabat Eselon IV Dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 3.

Perjanjian Kinerja Seluruh Pejabat Struktural, baik Eselon III dan Eselon IV Kecamatan Panyipatan Tahun 2023.

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET	PROGRAM/KEGIATAN	ANGGARAN
1	2	3	4	5
Camat : 1. Meningkatnya kualitas pelayanan publik kepada masyarakat	1. Tingkat Kepuasan Masyarakat terhadap pelayanan umum yang ada dikecamatan	Baik (90)	5 Program / 9 Kegiatan	Rp. 4.882.698.330
Sekcam : 1. Meningkatnya Implementasi Reformasi Birokrasi dan Akuntabilitas Kinerja	1. Nilai RB	70 (Cukup)	1 Program / 5 Kegiatan	Rp. 3.517.305.795
	2. Nilai SAKIP	75(Baik)		
2. Meningkatnya kualitas layanan administrasi umum dan kepegawaian	2. Persentase layanan administrasi umum dan kepegawaian yang tertib	100 %		
Kasubbag Umpeg : 1. Menyediakan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah.	1. Jumlah Orang yang terlayani Administrasi Kepegawaiannya	26 Orang	1 Program / 3 Kegiatan	Rp. 599.290.204
2. Menyediakan pelayanan Administrasi Umum Perangkat Daerah.	2. Jumlah kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah.	8 Kegiatan		

3. Menyediakan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	3. Jumlah Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah.	2 Kegiatan		
4. Menyelenggarakan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	4. Jumlah kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	3 kegiatan		
5. Memberi pelayanan administrasi umum dan kepegawaian.	5. Jumlah Dokumen Administrasi Kepegawaian	11 Dokumen		
Kasubbag Perencanaan dan Keuangan:				
1. Menyusun Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	1. Jumlah Tersusunnya Dokumen Perencanaan, dan Penganggaran.	6 Dokumen	1 Program / 2 Kegiatan	Rp. 2.918.015.591,-
2. Mengkoordinasi dan Menyusun Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	2. Jumlah Tersusunnya Dokumen Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	2 Dokumen		
3. Menyusun Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	3. Jumlah Tersusunnya Dokumen LKPJ dan LPPD Perangkat Daerah	1 Dokumen		
4. Melakukan Implementasi Reformasi Birokrasi.	4. Jumlah Refom penilaian mandiri Reformasi Birokrasi .	8 Refom		
5. Menyediakan Gaji dan Tunjangan ASN	5. Terbayaran Gaji dan Tunjangan Serta Tambahan Penghasilan ASN	12 Bulan		

6. Mengkoordinasi dan Menyusun Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	6. Jumlah Tersusunnya Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 Laporan		
7. Mengkoordinasi dan Menyusun Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulan/ Semesteran SKPD	7. Jumlah Tersusunnya Dokumen Laporan Keuangan Bulanan / Triwulan/ Semesteran SKPD	18 laporan		
8. Memberi pelayanan administrasi Keuangan	8. Jumlah Layanan Administrasi Keuangan	6 layanan		
Kasi Tata Pemerintahan :				
1. Memfasilitasi , Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa.	1. Jumlah Desa yang terfasilitasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahannya.	10 Desa	2 Program / 2 Kegiatan	Rp. 99.996.230
2. Memfasilitasi penyelenggaraan pemilu, pilkada, dan pemilihan kepala desa serta penjaringan aparat desa dan BPD.	2. Jumlah desa yang di fasilitasi dengan baik pada penyelenggara npemilu, pilkada, dan pemilihan kepala desa serta penjaringan aparat desadan BPD	5 Desa		
3. Monitoring penyusunan laporan kependudukan	3. Jumlah desa yang data kependudukannya terverifikasi dengan akurat	10 Desa		
4. Membina Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhineka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	4. Jumlah Peserta Paskibra yang mengikuti kegiatan HUT RI di Kecamatan	1 Kegiatan		

Kasi PMD :				
1. Memberikan Pembinaan tentang penyusunan monografi kecamatan serta profil desa yang akurat.	1. Jumlah desa yang berhasil menyusun profil desa dengan baik.	10 Desa	2 Program / 2 Kegiatan	Rp. 58.376.050
2. Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	2. Jumlah Desa yang terfasilitasi , Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa.	10 Desa		
3. Meningkatkan Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	3. Jumlah Kegiatan Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	10 Desa		
Kasi Kemasyarakatan :				
1. Memberikan Pembinaan Kepada kelompok organisasi masyarakat di bidang kemasyarakatan.	1. Jumlah Pembinaan kelompok organisasi masyarakat di bidang kemasyarakatan .	12 kelompok	1 Program / 1 Kegiatan	Rp. 1.151.754.962
2. Membina Kerukunan Antar Suku dan Intrasuku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional	1. Jumlah Kegiatan pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intrasuku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional	3 Kegiatan		
3. Fasilitasi Penyaluran Bantuan Sosial di kecamatan	2. Jumlah masyarakat tidak mampu yang di fasilitasi penyaluran bantuannya	3.678 KPM		
Kasi Trantib :				
1. Memfasilitasi penanganan gangguan ketentraman dan ketertiban masyarakat di Kecamatan	1. Jumlah kegiatan penanganan gangguan dan ketertiban masyarakat di kecamatan yang di fasilitasi	1 Kegiatan	1 Program / 1 Kegiatan	Rp.51.094.053

2. Membina kelompok masyarakat di bidang ketentraman dan ketertiban	2. Jumlah kelompok masyarakat di bidang ketentraman dan ketertiban yang aktif	2 Kelompok		
3. Monitoring penanganan gangguan ketentraman dan ketertiban masyarakat di kecamatan	3. Jumlah penanganan gangguan dan ketertiban masyarakat di kecamatan yang di monitoring.	6 kali		
4. Meningkatkan Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	4. Jumlah kegiatan Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	4 Kegiatan		
Kasi Pelayanan :				
1. Memfasilitasi Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan.	1. Jumlah Kegiatan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan.	1 Kegiatan	1 Program / 1 Kegiatan	Rp. 4.171.240
2. Memberikan Pelayanan Administrasi terpadu kecamatan (PATEN)	2. Jumlah produk Pelayanan Masyarakat Pelayanan Terpadu Kecamatan sesuai SOP	16 Produk		
3. Menyusun data informasi Pelayanan Administrasi terpadu kecamatan (PATEN)	3. Jumlah data informasi Pelayanan Administrasi terpadu kecamatan (PATEN)	2 dokumen		

F. Program dan Kegiatan

Rencana strategis Kecamatan Panyipatan Tahun 2023 memuat 5 (Lima) Program dan 9 (Sembilan) Kegiatan, dan 22 (dua puluh dua) Sub Kegiatan yang mana Pelaksanaan program dan kegiatan di Kecamatan Panyipatan sesuai dengan tugas dan fungsinya dilaksanakan oleh Sekretariat dan Seksi-Seksi, yang mana arah program dan kegiatannya berpedoman kepada Renstra Kecamatan Panyipatan Tahun 2018 – 2023. Sedangkan tujuannya untuk dapat menjabarkan dari visi dan misi yang telah disepakati, seimbang dengan sarana yang ingin dicapai yaitu pelayanan yang sebaik – baiknya, sehingga tercapai Pemerintahan yang baik.

Program dan Kegiatan Kecamatan Panyipatan tahun 2023 berikut merupakan Rencana Kerja Tahun Anggaran 2023 Murni dan Rencana Kerja Perubahan Tahun Anggaran 2023 dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 4.
Anggaran Penunjang Sasaran Strategis Kantor Kecamatan Panyipatan Tahun 2023

No	SasaranStrategis	Program	Anggaran (Rp)	Kegiatan	Anggaran (Rp)
1	Meningkatnya Implementasi Reformasi Birokrasi dan Akuntabilitas Kinerja	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA	3.286.830	Administrasi Umum Perangkat Daerah	235.842.844
				Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	277.597.360
				Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	85.850.000
				Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	3.286.830
				Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	2.914.728.761
2	Meningkatnya kualitas layanan administrasi umum dan kepegawaian	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	4.171.240	Kegiatan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	4.171.240
		PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	48.439.400	Kegiatan Koordinasi kegiatan Pemberdayaan Desa	48.439.400
		PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	1.302.845.245	Kegiatan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	1.302.845.245
		PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	9.936.650	Kegiatan Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	9.936.650
JUMLAH			4.882.698.330		4.882.698.330

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

Akuntabilitas diartikan sebagai kemampuan untuk menjawab atas mandat yang diberikan kepada pengemban amanat, sedangkan kinerja diartikan sebagai prestasi kerja pengemban amanat atas pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya. Sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah serta Peraturan Pemerintah Nomor 8 tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah, laporan ini mengungkapkan capaian kinerja sasaran dan hasil (*outcome*) yang dicapai dalam tahun 2023 Kabupaten Tanah Laut.

Akuntabilitas Kinerja juga diartikan sebagai rangkaian sistematis dari berbagai aktivitas, alat, dan prosedur yang dirancang untuk tujuan penetapan dan pengukuran, pengumpulan data, pengklasifikasian, pengikhtisaran, dan pelaporan kinerja pada instansi pemerintah, dalam rangka pertanggungjawaban dan peningkatan kinerja instansi pemerintah.

Sistem Akuntabilitas Kinerja merupakan integrasi dari sistem perencanaan, sistem penganggaran dan sistem pelaporan kinerja, yang selaras dengan pelaksanaan sistem akuntabilitas keuangan. Pelaksanaan Sistem Akuntabilitas Kinerja digunakan dalam rangka penyusunan Laporan Kinerja yang disusun oleh setiap Instansi Pemerintah.

Laporan Kinerja tahun 2023 ini merupakan laporan kinerja ketiga RPJ-PD 2024 - 2026 dan menyajikan pengukuran capaian indikator kinerja sasaran, output, dan hasil sebagaimana yang dituangkan dalam dokumen Penetapan Kinerja. Penetapan indikator kinerja dan targetnya merupakan prasyarat mutlak agar mekanisme suatu pengukuran kinerja dapat diterapkan sehingga capaian kinerja suatu instansi dapat diketahui tingkat keberhasilannya.

Metode pengukuran kinerja yang digunakan adalah membandingkan antara rencana kinerja (*performance plan*) yang diinginkan dengan realisasi kinerja (*performance result*) yang telah dicapai. Dalam hal ini perbandingan tersebut dilakukan terhadap indikator kinerja, baik indikator kinerja hasil dari indikator kinerja sasaran sebagaimana ditetapkan dalam dokumen Penetapan Kinerja maupun kinerja tahun berjalan terhadap tahun sebelumnya. Terhadap terjadinya celah kinerja (*performance gap*), dilakukan analisis penyebab terjadinya celah kinerja tersebut, serta tindakan-tindakan perbaikan apa yang

diperlukan untuk meningkatkan kinerja dimasa mendatang.

A. Akuntabilitas Kinerja Organisasi

Pengukuran kinerja digunakan untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program, sasaran yang telah ditetapkan dalam rangka mewujudkan misi dan visi instansi pemerintah. Pengukuran kinerja dilaksanakan sesuai dengan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Review atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Capaian indikator kinerja utama (IKU) diperoleh berdasarkan pengukuran atas indikator kerjanya masing-masing, sedangkan capaian kinerja sasaran diperoleh berdasarkan pengukuran atas indikator kinerja sasaran strategis, cara penyimpulan hasil pengukuran kinerja pencapaian sasaran strategis dilakukan dengan membuat capaian rata-rata atas capaian indikator kinerja sasaran.

Dalam rangka memberikan kesimpulan pengukuran kinerja, Pemerintah Kabupaten Tanah laut menetapkan kategorisasi pencapaian kinerja sesuai dengan Peraturan Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi RI Nomor 88 Tahun 2021 Tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah berdasarkan capaian rata-rata atas indikator kinerja menjadi tujuh kategori sebagai berikut :

Tabel 5

Skala Pengukuran Kinerja Laporan Kinerja Instansi Pemerintah

Urutan	Rentang Capaian	Kategori Capaian
I	Lebih dari 90%	Sangat Memuaskan
II	Diatas 80% sampai dengan 90	Memuaskan
III	Diatas 70 sampai dengan 80	Sangat Baik
IV	Diatas 60 sampai dengan 70	Baik
V	Diatas 50 sampai dengan 60	Cukup
VI	Diatas 30 - 50	Kurang
VII	Kurang dari 30	Sangat Kurang

1. Sasaran RPJMD

Pada Tahun 2023 ke 5 (lima) pelaksanaan Renstra Kecamatan Panyipatan Kabupaten Tanah Laut 2023-2026, Kecamatan Panyipatan menetapkan Sasaran Strategis yaitu mendukung Visi dan Misi Kepala Daerah dan mendukung Misi ke-satu, Misi ke- tiga dan Misi ke- empat Kepala Daerah, dengan menetapkan Tujuan dan Sasaran Strategi Kecamatan Panyipatan Kabupaten Tanah Laut serta cara pencapaian tujuan dan Sasaran tersebut akan diuraikan dalam bab ini, kemudian sasaran yang ingin dicapai dalam tahun 2023 yaitu bertepatan dengan tahun ke pertama tahun Renstra akan dijelaskan dalam Rencana Kinerja Tahunan 2023 pada pembahasan selanjutnya.

Misi 1 : Meningkatnya akses dan kualitas layana masyarakat lainnya, dengan indikator Cakupan Kinerja Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN) .

Misi 3 : Membangun tata kelola pemerintahan yang baik (Good Governance), indikator Nilai SAKIP, Nilai RB

Misi 4 : Meningkatnya aksi sosial keagamaan, Indikator Cakupan kinerja program aksi keagamaan dan sosial lingkup kecamatan.

Adapun capaian kinerja Sasaran strategis Kecamatan Panyipatan Tahun 2023 terhadap target sebagai berikut :

Tabel 6.
Realisasi Target dan Capaian Sasaran Strategis dan Indikator Kecamatan Panyipatan
Tahun 2023

No	Sasaran Strategis	Indikator	Tahun 2023		
			Target	Realisasi	Persentase Capaian
Misi 1	Meningkatnya puasan publik terhadap pelayanan di kecamatan				
1.	Meningkatnya kualitas Pelayanan Publik kepada masyarakat.	Tingkat kepuasan Masyarakat terhadap pelayanan Umum yang ada di kecamatan.	Baik (87)	Baik (85,86)	98,68 %
Misi 3	Membangun Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik (Good Governance)				
2.	Meningkatnya Implementasi Reformasi Birokrasi dan Akuntabilitas Kinerja	Nilai RB	Baik (70)	Sangat Baik (85,18)	122 %
		Nilai SAKIP	75(Baik)	73,7(Baik)	98,26 %
3.	Meningkatnya kualitas layanan administrasi umum dan kepegawaian	Persentase layanan admnistrasi umum dan kepegawaian yang tertib	100 %	100 %	100 %
Misi 4	Meningkatnya kegiatan keagamaan, sosial dan kebudayaan di masyarakat				
4.	Fasilitasi kegiatan dibidang sosial, keagamaan Kebudayaan dan olahraga ditingkat kecamatan	Jumlah kegiatan dibidang sosial, keagamaan, kebudayaan dan olahraga yang sesuai SOP	1 Kegiatan	1 Kegiatan	100%

Rencana Strategis Kecamatan Panyipatan yaitu mendukung Visi dan Misi Kepala Daerah dan mendukung Misi ke- 1, Misi ke- 3 dan Misi ke-4 Kepala Daerah, dengan menetapkan Tujuan dan Sasaran Strategi Kecamatan Panyipatan Kabupaten Tanah Laut serta cara pencapaian tujuan dan Sasaran tersebut akan diuraikan dalam bab ini, kemudian sasaran yang ingin dicapai dalam tahun 2023 yaitu bertepatan dengan tahun ke Lima atau tahun terakhir Renstra yang dijelaskan dalam Rencana Kinerja Tahunan 2023 pada pembahasan selanjutnya.

Misi 1 : Meningkatnya akses dan kualitas layana masyarakat lainnya, dengan indikator Cakupan Kinerja Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN) .

Misi 3 : Membangun tata kelola pemerintahan yang baik (Good Governance), indikator Nilai SAKIP, Nilai RB

Misi 4 : Meningkatnya aksi sosial keagamaan, Indikator Cakupan kinerja program aksi keagamaan dan sosial lingkup kecamatan.

Untuk menggambarkan tabel realisasi capaian sasaran strategis beserta analisa capaian pada kecamatan panyipatan yang memiliki sebanyak 3 sasaran strategis dengan 3 indikator sasaran dapat dibandingkan dengan tahun tahun sebelumnya dalam pembahasan ini akan dibandingkan selama 2 (dua) tahun yaitu pada tahun 2022 dengan 2023 sehingga tergambar capaian kinerja per sasaran serta penanggungjawabnya secara lebih rinci dengan penjelasan sebagai berikut :

Tabel .7

Perbandingan Target dan Realisasi Indikator Kinerja Utama Tahun 2022 dan Tahun 2023

No	Tujuan	Sasaran Strategis	Indikator sasaran strategis	Satuan	Target tahun 2022	Realisasi tahun 2022	Capaian %	Target tahun 2023	Realisasi tahun 2023	Capaian %	Ket
1.	Terwujudnya kualitas pelayanan publik di kecamatan	Meningkatnya kualitas pelayanan publik kepada masyarakat	Tingkat Kepuasan Masyarakat terhadap pelayanan umum yang ada di kecamatan	Nilai	Sangat Baik (87)	Baik (90,43)	103 %	Sangat Baik (87)	Baik (85,86)	98,68 %	
2.	Terwujudnya Implementasi tata kelola pemerintahan yang baik	Meningkatnya Implementasi Reformasi Birokrasi dan Akuntabilitas Kinerja	Nilai RB	Nilai	Baik (70)	Baik (85,18)	121,6 %	Baik (70)	*)	*)	
			Nilai SAKIP	Nilai	Baik (60)	Baik (73)	84,1 %	Baik (75)	*)	*)	
3.	Terwujudnya tata kelola administrasi yang tertib, efektif dan efisien	meningkatnya kualitas layanan administrasi umum dan kepegawaian	Persentase layanan administrasi umum dan kepegawaian yang tertib	%	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	
4.	Meningkatnya kegiatan keagamaan, sosial dan kebudayaan di masyarakat	Fasilitasi kegiatan dibidang sosial,keagamaankebudayaan dan olahraga ditingkat kecamatan	Jumlah kegiatan dibidang sosial, keagamaan, kebudayaan dan olahraga yang sesuai SOP	%	1 Kegiatan	1 Kegiatan	100 %	1 Kegiatan	1 Kegiatan	100 %	

Tabel.8

Perbandingan capaian Realisasi Nilai Sakip Kabupaten se Kalimantan Selatan

No	Indikator Kinerja	Kota / Kabupaten	Realisasi		Kenaikan / Penurunan
			Nilai Sakip 2022	Nilai Sakip 2023	
1.	Nilai SAKIP Kabupaten	Kabupaten Hulu Sungai Selatan	81.50	82.08	0.58
2.	Nilai SAKIP Kabupaten	Provinsi Kalimantan Selatan	80.24	81.21	0.97
3.	Nilai SAKIP Kabupaten	Kota Banjarmasin	71.20	72.73	1.53
4.	Nilai SAKIP Kabupaten	Kabupaten Balangan	67.04	70.17	3.13
5.	Nilai SAKIP Kabupaten	Kabupaten Tapin	68.93	69.02	0.09
6.	Nilai SAKIP Kabupaten	Kabupaten Barito Kuala	68.94	68.53	-0.41
7.	Nilai SAKIP Kabupaten	Kabupaten Hulu Sungai Tengah	67.91	68.33	0.42
8.	Nilai SAKIP Kabupaten	Kabupaten Banjar	68.03	68.10	0.07
9.	Nilai SAKIP Kabupaten	Kabupaten Tanah Laut	67.28	67.52	0.24
10.	Nilai SAKIP Kabupaten	Kabupaten Tabalong	68.37	67.48	-0.89
11.	Nilai SAKIP Kabupaten	Kota Banjarbaru	66.74	67.02	0.28
12.	Nilai SAKIP Kabupaten	Kabupaten Tanah Bumbu	67.49	66.04	-1.45
13.	Nilai SAKIP Kabupaten	Kabupaten Hulu Sungai Utara	64.20	64.40	0.20
14.	Nilai SAKIP Kabupaten	Kabupaten Kotabaru	60.96	61.26	0.30

1) Perbandingan Realisasi dengan Target;

Pencapaian realisasi dari target tahun 2023 sebesar 87 dan dengan target realisasi tahun 2022 sebesar 87 maka pencapaian target 2022 mencapai 103 %. terjadi penurunan realisasi nilai IKM dari Tahun 2022 ke Tahun 2023 sebesar 4,32 %, sehingga mempengaruhi persentase capaian juga menurun. Hal ini dikarenakan kurang Nilai hasil Surve IKM pertriwulan yang dilakukan di Kecamatan Panyipatan sehingga mempengaruhi pembagi pada laporan IKM Tahunan.

2) Perbandingan Realisasi dengan Realisasi Terkait

- a. Realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun 2022 dengan tahun 2023 terjadi penurunan yaitu dari 90,43 menjadi 85,86;
- b. Realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun 2023 sebesar 85,86 dibandingkan tahun 2022 sebesar 90,43 terjadi penurunan dibandingkan penetapan target capaian kinerja yang telah ditetapkan tahun 2022, capaian kinerja 2023 belum dapat capaian 100%.
- c. Realisasi kinerja sampai dengan tahun ini dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis kecamatan panyipatan Indeks Kepuasan Masyarakat Kecamatan Panyipatan tahun 2023 terealisasi 85,86 dari perbandingan target rensta pada yang ditentukan tahun 2023 yaitu sebesar 87 dengan capaian 98,68 %.
- d. Perbandingan Realisasi Kinerja yaitu Nilai SAKIP seluruh Kabupaten yang ada di Provinsi Kalimantan Selatan kabupaten Tanah Laut pada Tahun 2022 sebesar 67.28 sedangkan pada Tahun 2023 Nilai Sakip realisasi sebesar 67.52 artinya mengalami kenaikan sebesar 0,24 atau mencapai peringkat 9 dari 14 Kabupaten / Kota.

3.) Analisis Peningkatan dan Penurunan Kinerja.

Secara umum kualitas pelayanan pada SKPD/unit pelayanan di lingkungan Pemerintah Kecamatan Panyipatan pada tahun 2023 dipersepsikan “Baik” oleh masyarakat penggunanya. Hal ini dapat dilihat dari indeks kepuasan masyarakat yang diperoleh yaitu 85,86 (Kategori B = Baik) berdasarkan hasil survey kepuasan masyarakat di Lingkungan Kecamatan Panyipatan. Terjadi penurunan dibandingkan tahun 2022 yaitu 90,43 (Kategori A = Sangat Baik). Dari tahun 2020 indeks kepuasan masyarakat sudah

berkategori Baik, peningkatan indeks kepuasan masyarakat dari tahun ke tahun dapat dilihat pada grafik di bawah ini.

Pencapaian realisasi dari target tahun 2023 sebesar 87 dan dengan target realisasi tahun 2022 sebesar 87 maka pencapaian target 2023 mencapai 98,68 %. terjadi penurunan realisasi nilai IKM dari 2022 ke 2023, sehingga mempengaruhi persentase capaian juga menurun. Hal ini dikarenakan kurang Nilai hasil Survei IKM pertriwulan yang dilakukan di Kecamatan Panyipatan sehingga mempengaruhi pembagi pada laporan IKM Tahunan.

2. Eselon III (Camat)

Dalam rangka penguatan akuntabilitas kinerja Kecamatan Panyipatan ditetapkan indikator Kinerja Utama (IKU) sebagai dasar pengukuran keberhasilan pencapaian suatu tujuan dan sasaran strategis yang telah ditetapkan.

Indikator Kinerja ini telah dilaksanakan pada tahun 2023 sesuai dengan Renstra Kecamatan Panyipatan Kabupaten Tanah Laut periode 2018 - 2023 melaksanakan ketiga misi. Kecamatan Panyipatan pada tahun 2023 melakukan survey dengan mengirim kuisioner kepada 150 (seratus lima puluh) masyarakat dilingkup Kecamatan Panyipatan (10 desa) selaku pengguna Layanan Publik dengan indeks penilaian dalam persen baik secara on line maupun pengisian kuisioner secara langsung.

Indikator Kinerja Utama Kecamatan Panyipatan terdiri dari 1 (satu) indikator, yaitu tingkat kepuasan masyarakat terhadap pelayanan umum yang ada di Kecamatan. Berdasarkan pengolahan Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) per responden dan per unsur pelayanan berupa 150 (seratus lima puluh) lembar kuisioner yang dibagikan, terhadap 9 (sembilan) unsur pelayanan berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggara Pelayanan Publik yang memuat unsur pelayanan yang harus diukur, yaitu :

1. Kesesuaian Persyaratan dengan Pelayanan
2. Prosedur Pelayanan
3. Kecepatan Pelayanan
4. Kewajaran Biaya Pelayanan
5. Kesesuaian Produk Pelayanan dengan SOP
6. Kompetensi Kemampuan Petugas Pelayanan
7. Kesopanan dan Keramahan Petugas
8. Penanganan Pengaduan Pengguna Pelayanan
9. Kualitas Sarana dan Prasarana Pelayanan

Adapun interval penilaian kategorisasi mutu pelayanan yang sudah dikonversi dengan nilai indeks IKM dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel. 9
 Nilai Persepsi, Interval IKM, Interval Konversi IKM, Mutu Pelayanan dan Unit pelayanan

Nilai Persepsi	Nilai Interval IKM	Nilai Interval Konversi IKM	Mutu Pelayanan	Kinerja Unit Pelayanan
1	1,00 - 2,5996	25 - 64,9	D	Tidak Baik
2	2,6 - 3,064	65 – 76,6	C	Kurang Baik
3	3,0644 – 3,532	76,61 – 88,3	B	Baik
4	3,264 – 4,00	88,31 - 100	A	Sangat Baik

Pada Tahun 2023 Kecamatan Panyipatan menetapkan target nilai IKM sebesar 87, sementara berdasarkan hasil survey kepuasan masyarakat tahun 2023 diperoleh realisasi nilai IKM 85,86 Mutu Pelayanan (Baik) terhadap 9 (Sembilan) unsur pelayanan. Hal ini menunjukkan bahwa menurunnya tingkat pelayanan yang diberikan dari target yang telah ditentukan dan seyogyanya ini dapat dijadikan bahan evaluasi terhadap tingkat pelayanan untuk mendapatkan kepuasan Masyarakat di wilayah kecamatan panyipatan umumnya, diharapkan untuk tahun kedepan realisasi target yang akan dicapai agar ditingkatkan lebih tinggi lagi dari realisasi tahun sebelumnya. Pada tahun 2023 Nilai IKM yang dicapai hanya tercapai sebesar 98,68 % dari target IKM 100 % yang telah ditetapkan.

Dari Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) didapat nilai untuk IKM Tahun 2023 adalah 85,86 dari target 87, dengan nilai capaian sebesar 98,68 % berdasarkan Pengelompokan Capaian Kinerja, IKM Kecamatan Panyipatan Tahun 2023 termasuk kategori **Baik**. Nilai capaian realisasi IKM tahun 2023 sebesar 85,86 bila dibandingkan dengan capaian IKM Tahun 2022 dengan nilai 90,43 dengan target IKM 87 mengalami penurunan sebesar 4,32 %.

Target Indikator Kinerja Utama (IKU) Kecamatan Panyipatan pada tahun 2023 yang telah ditetapkan adalah juga merupakan Perjanjian kinerja Camat Panyipatan tahun 2023. Adapun realisasi tingkat kepuasan masyarakat terhadap pelayanan umum yang ada di kecamatan Panyipatan dari tahun 2018-2022 terjadi peningkatan seiring bertambahnya sarana prasarana menunjang kegiatan. Diantaranya dengan Fasilitas Gedung kantor yang baru dan juga aplikasi SIAP yang mempermudah pelayanan terutama dalam hal dokumen kependudukan serta aplikasi – aplikasi lainnya yang menunjang pelayanan di kantor Kecamatan Panyipatan. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel. 10

Realisasi Sasaran Strategis dan Indikator Kinerja Utama Kecamatan Panyipatan Tahun 2022- 2023

No	Indikator Kinerja	Satuan	Tahun 2022			Tahun 2023			Capaian 2023 terhadap target RPJMD
			Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian	
1.	Tingkat Kepuasan Masyarakat terhadap pelayanan umum yang ada dikecamatan	Nilai	Baik (87)	Sangat Baik (90,43)	103 %	Sangat Baik (87)	Baik (85,86)	98,68 %	98,68 %
Rata –Rata Capaian Kinerja					103 %			98,68 %	98,68 %

Berdasarkan tabel tersebut diatas, diperoleh penjelasan sebagai berikut:

1) Perbandingan Realisasi dengan Target;

Pencapaian realisasi dari target tahun 2023 sebesar 90 dan dibandingkan dengan target realisasi tahun 2022 87 maka pencapaian target 2022 mencapai 103 %. terjadi penurunan realisasi nilai IKM dari 2022 ke 2023, sehingga mempengaruhi persentase capaian juga menurun. Hal ini dikarenakan kurang Nilai hasil Surve IKM pertriwulan yang dilakukan di Kecamatan Panyipatan sehingga mempengaruhi pembagi pada laporan IKM Tahunan.

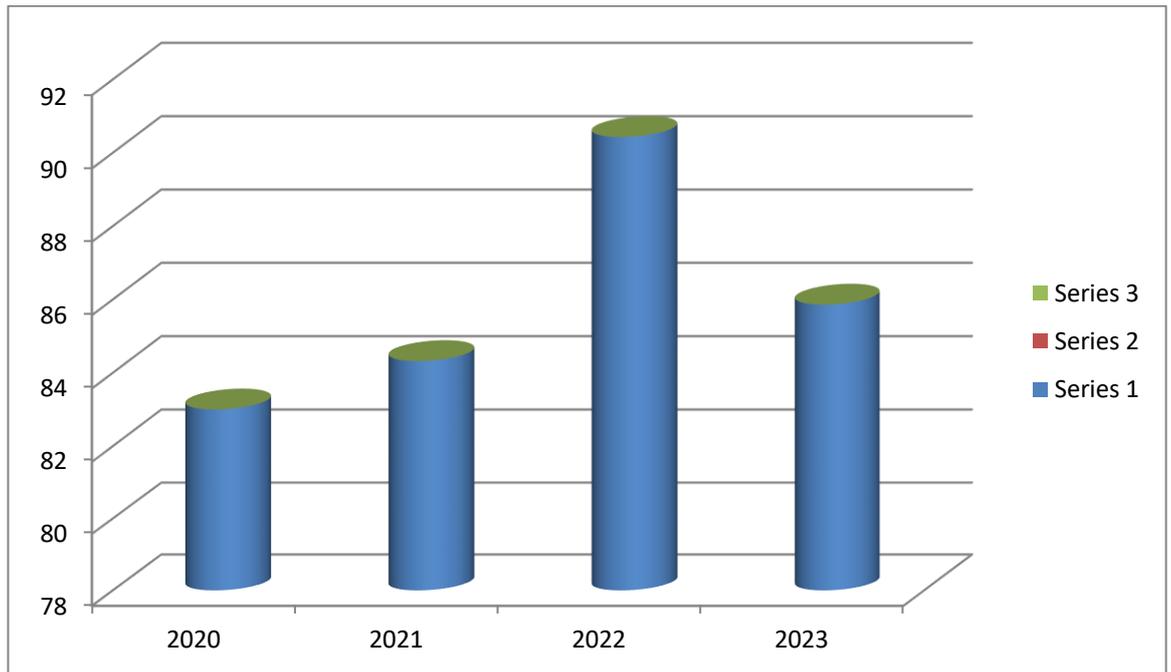
2) Perbandingan Realisasi dengan Realisasi Terkait

- a. Realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun 2023 dengan tahun 2022 terjadi penurunan yaitu dari 90,43 menjadi 85,86;
- b. Realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun 2023 sebesar 98,68 % dibandingkan tahun 2022 sebesar 103 % terjadi penurunan dibandingkan penetapan target capaian kinerja yang telah ditetapkan tahun 2022, capaian kinerja 2023 belum dapat melampau capaian 100%.
- c. Realisasi kinerja sampai dengan tahun ini dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis kecamatan panyipatan Indeks Kepuasan Masyarakat Kecamatan Panyipatan tahun 2023 terealisasi 85,86 dari perbandingan target renstra yang ditentukan pada tahun 2023 yaitu 87 dengan capaian 98,68 %.

4.) Analisis Peningkatan dan Penurunan Kinerja.

Secara umum kualitas pelayanan pada SKPD/unit pelayanan di lingkungan Pemerintah Kecamatan Panyipatan pada tahun 2023 dipersepsikan “**Baik**” oleh masyarakat penggunaanya. Hal ini dapat dilihat dari indeks kepuasan masyarakat yang diperoleh yaitu 85,86 (Kategori B = Baik) berdasarkan hasil survey kepuasan masyarakat di Lingkungan Kecamatan Panyipatan. Terjadi penurunan dibandingkan tahun 2022 yaitu 90,43 (Kategori A = Sangat Baik). Dari tahun 2020 indeks kepuasan masyarakat sudah berkategori Baik, peningkatan indeks kepuasan masyarakat dari tahun ke tahun dapat dilihat pada grafik di bawah ini.

Grafik 1 : Indeks Kepuasan Masyarakat Kecamatan Panyipatan 2020 -2022



Sumber: diolah

Adapun kendala yang menghambat peningkatan kualitas pelayanan kepada masyarakat antara lain:

1. Kurangnya kualitas pelayanan serta kenyamanan lingkungan.
2. Kurangnya kesesuaian biaya pelayanan pada SKPD/Unit pelayanan agar memperhatikan kebutuhan dan harapan masyarakat.
3. Kurangnya kedisiplinan dan rasa tanggung jawab petugas Pelayanan.
4. Kurangnya tingkat kemudahan layanan terhadap pelanggan dalam mengajukan keluhan.
5. Rendahnya tingkat kepercayaan pelanggan terhadap petugas dalam memberikan pelayanan.
6. Tidak adanya pemberian penghargaan terhadap pegawai yang berprestasi.
7. Lemahnya tekik penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat.

Upaya yang dilakukan kedepan untuk lebih meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat antarlain:

1. mempertahankan kualitas pelayanan yang sudah baik, dengan melakukan upaya- upaya peningkatan kualitas pelayanan secara konsisten terutama mempertahankan kejelasan dan kepastian petugas pelayanan serta kenyamanan lingkungan.
2. meningkatkan kualitas pelayanan yang masih kurang baik, agar tingkat kepuasan masyarakat terhadap kesesuaian biaya pelayanan pada SKPD/Unit pelayanan dapat lebih baik lagi dengan memperhatikan kebutuhan dan harapan masyarakat.
3. meningkatkan kedisiplinan dan rasa tanggung jawab petugas melalui pemberian pelatihan untuk meningkatkan keterampilan dan etos kerja atau motivasi petugas dan menetapkan standarisasi internal mengenai sikap layanan serta disiplin kerja.
4. diperlukan upaya untuk meningkatkan kemudahan pelanggan dalam mengajukan keluhan melalui pembentukan Pelayanan Terpadu yang berfungsi menerima dan memproses keluhan pelanggan serta menyediakan media yang mudah diakses oleh pelanggan seperti layanan bebas pungli, sms, email, dan atau kotaksaran.
5. diperlukan upaya untuk meningkatkan kepercayaan pelanggan terhadap petugas dalam memberikan pelayanan. Hal-hal yang dapat dilakukan adalah:
 - a. memberikan pelatihan untuk meningkatkan kompetensi petugas,
 - b. memberikan informasi secara komunikatif kepada pelanggan.
6. perlunya pemberian penghargaan terhadap pegawai yang berprestasi dan terus memotivasi untuk mendapatkan prestasi di masa yang akan datang serta mempertimbangkan kesejahteraan petugas pelayanan dalam bentuk insentif khusus.
7. kegiatan penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat dapat terus dilaksanakan sebagai salah satu cara untuk mempertahankan kualitas pelayanan publik dengan membandingkan Survei Kepuasan Masyarakat terdahulu secara berkala, survei bisa dilakukan secara periodik setiap triwulan secara berkelanjutan, sehingga dapat dilakukan perubahan tingkat kepuasan masyarakat terhadap pelayanan publik.

5.) Analisis Program/Kegiatan Penunjang Kinerja

Dalam mencapai sasaran meningkatnya Tingkat kepuasan masyarakat terhadap pelayanan umum yang ada di kecamatan, Kantor Kecamatan Panyipatan di dukung oleh 5 (Lima) program, 9 (sembilan) kegiatan dan 23 (dua puluh tiga) Sub Kegiatan pada Kecamatan Panyipatan Kabupaten Tanah Laut total Pagu Murni sebesar Rp 4.810.331.544.-, kemudian setelah adanya APBD perubahan maka jumlah total APBD Perubahan sebesar Rp 4.882.698.330,-, sampai akhir tahun anggaran realisasi belanja Daerah sebesar Rp. 3.884.623.045,- atau 79,56 %. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel berikut ;

Tabel.11

Realisasi Program Penunjang pada Kecamatan Panyipatan Tahun Anggaran 2023

No	Program / Kegiatan/Sub Kegiatan	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Capaian %
1	2	3	4	5
I	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	3.517.305.795	2,663,690,725	75.73
1	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	3.286.830	3,059,500	93.08
1.1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2,211,805	1,997,000	90.29
1.2	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1,075,025	1,062,500	98,83
2	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	2,914,728,761	2,090,115,540	71,71
2.1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	2,914,228,761	2,089,763,540	71.71
2.2	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	500,000	352,000	70,40
3	Administrasi Umum Perangkat Daerah	235,842,844	231,009,456	97.95
3.1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	2,968,114	2,908,000	97.97
3.2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	31,343,631	30,589,000	97.59
3.3	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	4,982,769	4,808,000	96.49
3.4	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	6,559,350	3,548,000	54.09

3.5	Penyediaan Bahan/Material	9,988,980	9,967,000	99.78
3.6	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	180,000,000	179,189,456	99.55
4	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	277,597,360	255,381,329	92.00
4.1	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	32,500,000	11,030,250	33.94
4.2	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	245,097,360	244,351,079	99.70
5	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	85,850,000	84,124,900	97.99
5.1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	30,000,000	29,999,600	100
5.2	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	46,000,000	45,487,300	98.89
5.3	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	9,850,000	8,638,000	87.70
II.	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	4,171,240	4,154,000	99.59
1	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan	4,171,240	4,154,000	99.59
1.1	Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan	4,171,240	4,154,000	99.59
III.	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	48,439,400	39,757,000	82.08
1	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	48,439,400	39,757,000	82.08
1.1	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	48,439,400	39,757,000	82.08
IV.	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	1,302,845,245	1,170,599,320	89.85
1	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	1,302,845,245	1,170,599,320	89.85

1.1	Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	99,996,230	76,717,100	76.72
1.2	Pembinaan Kerukunan Antarsuku dan Intrasuku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional	1,151,754,962	1,044,100,000	90.65
1.3	Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	51,094,053	49,782,220	97.43
V.	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	9,936,650	6,422,000	64.63
1	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	9,936,650	6,422,000	64.63
1.1	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	9,936,650	6,422,000	64.63
1.2	Fasilitasi Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa	-	-	0.00
1.3	Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa	-	-	0.00
	Jumlah	4.882.698.330	3.884.623.045,	79.56

3. Eselon III (Sekretaris)

Adapun Realisasi target dan realisasi Sasaran Strategis dan Indikator Kinerja Utama Sekretariat Kecamatan Panyipatan Tahun 2023 untuk persentase pengelolaan umum dan kepegawaian yang tertib dapat terelaisasi penuh 100%. Lebih Jelasnya dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel.12

Realisasi, Target dan Persentase Capaian Indikator Kinerja Sekretariat Kecamatan Panyipatan Tahun 2023

No	Indikator Kinerja	Tahun 2022			Tahun 2023		
		Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian
1	Nilai RB	Baik (70)	Baik (85,18)	121,6 %	Baik (70)	*)	*)
	Nilai SAKIP	Baik (60)	Baik (73,7)	122 %	Baik (75)	*)	*)
2	Persentase ASN yang terlayani administrasi umum dan kepegawaian sesuai dengan ketentuan yang berlaku	100%	100%	100%	100%	100%	100%

Berdasarkan tabel tersebut diatas, diperoleh penjelasan sebagai berikut:

1) Perbandingan realisasi dengan target;

Realisasi Target nilai SAKIP tahun 2023 sebesar Baik (75) belum bisa dilakukan perbandingan dikarenakan belum dilakukannya penilaian terkait tentang SAKIP. Begitu pula dengan Nilai RB pada tahun 2023 kecamatan panyipatan yang telah menargetkan sebesar Nilai Baik (70) . Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 13.

Realisasi Nilai SAKIP Kecamatan Panyipatan Tahun 2023

No	Komponen Penilaian	Nilai		Ket
		2022	2023	
1.	perencanaan kinerja	22,20	*)	
2.	pengukuran kinerja	24,00	*)	
3.	pelaporan kinerja	12,00	*)	
4.	evaluasi internal	15,50	*)	
5.	pencapaian kinerja	-	*)	
	Jumlah	73,7	*)	

Sumber data : Rekap Hasil Evaluasi SAKIP Tahun 2022

Tabel 14.

Realisasi Nilai RB Kecamatan Panyipatan Tahun anggaran 2022 Berdasarkan komponen penilaian

No	Komponen Penilaian		Nilai 2022		Ket
			Bobot	Persentase	
1.	Komponen Pemenuhan	Manajemen Perubahan	2	100	
		Deregulasi kebijakan	0,75	75	
		Penataan dan Penguatan Organisasi	1	50	
		Penata Tata Laksana	1	100	
		Penata Sistem Manajemen SDM	1,18	84,29	
		Penguatan Akuntabilitas	2,5	100	
		Penguatan Pengawasan	1,62	73,64	
		Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik	2,24	89,60	
2.	Komponen Refom	Manajemen Perubahan	3	100	
		Deregulasi Kebijakan	1,5	75	
		Penataan dan Penguatan Organisasi	1,5	100	
		Penata Tata Laksana	2,26	69,87	
		Penata Sistem Manajemen SDM	1,25	62,50	
		Penguatan Akuntabilitas	3,06	81,60	
		Penguatan Pengawasan	1,95	100	
		Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik	3,37	100	
Jumlah			18,63	85,18	

Sumber data : Rekap Hasil Penilaian RB Kab. Tanah Laut Tahun Anggaran 2022

2.) Perbandingan Realisasi dengan Realisasi Terkait;

- a. Realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun 2022 dengan tahun 2023 untuk Indikator kinerja Persentase pengelolaan administrasi umum dan kepegawaian yang tertib sama 100%; Realisasi Indikator Nilai SAKIP tahun 2022 mencapai nilai 73,7 (baik) dari target yang ditentukan 75 (baik) sedangkan untuk nilai SAKIP tahun 2023 belum ada karena masih dalam proses penilaian.
- b. Realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun 2023 dibandingkan tahun sebelumnya mengalami peningkatan realisasi anggaran maupun capaian kinerja.
- c. Realisasi kinerja sampai dengan tahun 2022 dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis tahun 2023 optimis dapat tercapai dengan melihat hasil realisasi dan capaian kinerja tahun sebelumnya.

3.) Analisis Peningkatan dan Penurunan Kinerja

Realisasi dan capaian kinerja di sekretariat setiap tahunnya diharapkan dapat meningkat dilihat dari realisasi program kegiatan penunjang, nilai SAKIP dan Nilai RB kecamatan Panyipatan. Hal ini ditunjang Sumberdaya Manusia yang ada pada tahun 2023 menjadi 24 orang meskipun beberapa kualitas dan kuantitas masing-masing karyawan/karyawati berbeda serta dengan meningkatnya sarana penunjang yang memadai sehingga realisasi capaian kinerja dapat terus ditingkatkan.

4.) Analisis Program/Kegiatan Penunjang Kinerja

Dalam mencapai sasaran meningkatnya Nilai SAKIP, Nilai RB dan Persentase pengelolaan administrasi umum dan kepegawaian yang tertib Kantor Kecamatan Panyipatan di dukung oleh Program/kegiatan penunjang dengan pagu Rp 3,517,305,795.- dan realisasi sebesar Rp 2,663,690,725.- atau 75.73 %. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel berikut ;

Tabel.15

Realisasi Program Penunjang Sekretariat pada Kecamatan Panyipatan Tahun Anggaran
2023

No	Program / Kegiatan/Sub Kegiatan	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Capaian %
1	2	3	4	5
I	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	3.517.305.795	2,663,690,725	75.73
1	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	3.286.830	3,059,500	93.08
1.1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2,211,805	1,997,000	90.29
1.2	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1,075,025	1,062,500	98,83
2	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	2,914,728,761	2,090,115,540	71,71
2.1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	2,914,228,761	2,089,763,540	71.71
2.2	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	500,000	352,000	70,40
3	Administrasi Umum Perangkat Daerah	235,842,844	231,009,456	97.95
3.1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	2,968,114	2,908,000	97.97
3.2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	31,343,631	30,589,000	97.59
3.3	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	4,982,769	4,808,000	96.49
3.4	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	6,559,350	3,548,000	54.09
3.5	Penyediaan Bahan/Material	9,988,980	9,967,000	99.78
3.6	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	180,000,000	179,189,456	99.55
4	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	277,597,360	255,381,329	92.00
4.1	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	32,500,000	11,030,250	33.94
4.2	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	245,097,360	244,351,079	99.70
5	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	85,850,000	84,124,900	97.99
5.1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	30,000,000	29,999,600	100
5.2	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	46,000,000	45,487,300	98.89
5.3	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	9,850,000	8,638,000	87.70

5.) Analisis Sumber Daya Manusia

Untuk mencapai sasaran strategis sekretaris dalam meningkatkan Nilai SAKIP, Nilai RB dan Persentase pengelolaan administrasi umum dan kepegawaian yang tertib Kantor Kecamatan Panyipatan di dukung oleh dua Kepala Subbagian yaitu subbagian Perencanaan dan Keuangan, dan Subbagian Umum dan kepegawaian, untuk masing – masing sub bagian dibantu staf 2 orang ASN dan 2 orang PTT dibawah subbagian Perencanaan sedangkan untuk disubbagian Umum dan Kepegawiana memiliki 1 orang ASN dan 1 orang PTT.

6.) Analisis Kendala dan rencana aksi

Adapun Kendala yang dihadapi di oleh sekretaris adalah :

1. Adanya dua jabatan eselon kecamatan yang kosong yaitu Sekcam dan Kasi Kemasyarakatan sehingga mempengaruhi kinerja organisasi.
2. Kurangnya sumberdaya manusia yang terdapat di kedua subbagian disekretariat yang mampu mengatasi segala kendala yang ada.
3. Kurangnya tingkat pemahaman sumberdaya manusia yang ada di seretariat
4. Kurangnya Fasilitasi pendukung di sekretariat sehinga menghambat penyelesaian tugas yang diberikan.

Rencana Aksi untuk mengatasi kendala tersebut adalah :

1. Dengan mengajukan pengisian kekurangan pejabat eselon sekcam dan kasi kemasyarakatan ke BKPSDM Kabupaten Tanah Laut.
2. Dengan menambah sumberdaya manusia yang terdapat di kedua subbagian disekretariat demi meningkatkan hasil kinerja yang baik.
3. Memberikan pemahaman kepada sumberdaya manusia yang ada di seretariat melalui bimtek maupun pelatihan – pelatihan terkait kesekretarian.
4. Menambah fasilitasi pendukung di sekretariat terutama leptop/PC,serta printer mengigat apabila saat bersamaan ada beberapa staf yang tidak mendapat fasilitas pendukung untuk menyelesaikan pekerjaannya..

5. Eselon IV (Kepala Subbagian/Seksi)

Kecamatan Panyipatan sudah melaksanakan pelayanan administrasi terpadu kecamatan (PATEN), dengan di dukung oleh Program dan Kegiatan yang dilaksanakan oleh seksi-seksi yang ada di Kecamatan Panyipatan. Ada 4 (Empat) program, 4 (Empat) kegiatan dan 8 (delapan) Sub Kegiatan yang mendukung pelaksanaan pencapaian sasaran strategis pertama Kecamatan Panyipatan. Adapun Target, realisasi dan capaian Kinerja kepala subbagian dan Kepala Seksi lingkup kecamatan Panyipatan sebagai berikut:

1. Kepala Seksi Tata Pemerintahan

Realisasi capaian kinerja Kasi Tata Pemerintahan kecamatan Panyipatan terhadap target rata rata seluruhnya mencapai 100% .Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 16.

Realisasi Target Sasaran, indikator Program dan Kegiatan Seksi Tata Pemerintahan Tahun Anggaran 2023

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Tahun 2022			Tahun 2023		
			Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian
1	Memfasilitasi , Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa.	Jumlah Desa yang terfasilitasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahannya.	10 desa	10 Desa	100%	10 desa	10 Desa	100%
2	Memfasilitasi penyelenggaraan pemilu, pilkada, dan pemilihan kepala desa serta penjaringan aparat desa dan BPD	Jumlah desa yang di fasilitasi dengan baik pada penyelenggaraan pemilu, pilkada, dan pemilihan kepala desa serta penjaringan aparat desadan BPD	10 desa	4 desa	40%	5 desa	5 desa	100%

3	Monitoring penyusunan laporan kependudukan	Jumlah desa yang data kependudukannya terverifikasi dengan akurat	10 desa	10 desa	100%	10 desa	10 desa	100%
4	Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhineka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	Jumlah kegiatan pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhineka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	1 kegiatan	1 kegiatan	100%	1 kegiatan	1 kegiatan	100%

1) Perbandingan realisasi dengan target;

Realisasi Target indikator kinerja kasi Tata Pemerintahan pada tahun 2023 rata – rata mencapai 100 %.

2) Perbandingan realisasi dengan realisasi terkait ;

a. Realisasi Target indikator kinerja kasi Tata Pemerintahan pada tahun 2022 rata – rata mencapai 85 % dikarenakan ada satu target indikator kinerja yang hanya mencapai 40 % hal ini dikarenakan hanya 4 desa yang melakukan pemilihan/ penjaringan aparat desa maupun BPD sedangkan pada tahun 2023 realisasi

indikator kinerja kasi tata pemerintahan rata – rata mencapai 100 %.

- b. Realisasi Target indikator kinerja kasi Tata Pemerintahan pada tahun 2023 dibandingkan tahun sebelumnya mengalami peningkatan dibandingkan tahun sebelumnya.
- c. Realisasi kinerja sampai dengan tahun 2023 dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis dapat tercapai.

3) Analisis Peningkatan dan Penurunan Kinerja

Realisasi dan capaian kinerja Kasi Tata Pemerintahan setiap tahunnya diharapkan dapat meningkat dilihat dari realisasi program yang ada.

Berikut ini adalah uraian Kinerja di Kasi Tata Pemerintahan kecamatan Panyipatan antara lain :

- 1.) Kegiatan fasilitasi penyelenggaraan pemilu, pilkada, dan pemilihan kepala desa serta penjaringan aparat desa dan BPD.

Kegiatan tersebut merupakan salah satu kegiatan yang menunjang sasaran strategis ke kedua yaitu Memfasilitasi penyelenggaraan pemilu, pilkada, dan pemilihan kepala desa serta penjaringan aparat desa dan BPD.

Diantara Kegiatan tersebut yang terlaksana pada tahun 2023 yaitu pengambilan sumpah/janji pengganti antar waktu Anggota Badan Musyawarah Desa Batakan, pengambilan sumpah/janji pengganti antar waktu Anggota Badan Musyawarah Desa Kandangan Baru, Kegiatan Penjaringan dan Penyaringan Perangkat Desa Batu Mulya, Kegiatan Penjaringan dan Penyaringan Staf Administrasi BPD Desa Tanjung Dewa, dan Kegiatan Pemilihan Kepala Desa Serentak untuk Desa Batakan sebagai perwakilan Kecamatan Panyipatan .

Berikut adalah foto Kegiatan fasilitasi penyelenggaraan pemilu, pilkada, dan pemilihan kepala desa serta penjarangan aparat desa dan BPD.



Kegiatan fasilitasi penyelenggaraan pemilu, pilkada, dan pemilihan kepala desa serta penjarangan aparat desa dan BPD

2.) Kegiatan peringatan Hut R1 Yang Ke 78 merupakan salah satu kegiatan penunjang sasaran strategis ke empat yaitu Membina Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhineka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Kegiatan Upacara HUT Kemerdekaan RI ke – 78 pada tanggal 17 Agustus 2023 bertempat di Lapangan Sepak Bola Desa Batu Mulya Kecamatan Panyipatan. Kegiatan ini dilaksanakan upacara pengibaran bendera merah putih pada pagi dan upacara penurunan bendera merah putih pada sore hari dengan biaya pelaksanaan kegiatan dibebankan pada DPA Kantor Kecamatan Panyipatan Tahun 2023.

Adapun petugas pada upacara ini sebagai berikut :

1. Pembina Upacara (pagi)
2. Camat Panyipatan
3. Pembina Upacara (sore)
4. Kapolsek Panyipatan
5. Petugas Upacara

Anggota DPRD Tanah Laut, Pramuka Kwaran Panyipatan, KUA Panyipatan, Personil Polsek Panyipatan dan Posramil Panyipatan, Siswa (i) SMA, dan personil Kecamatan Panyipatan

a. Peserta Upacara

Forkopimcam Kecamatan Panyipatan

ASN / Guru se-Kecamatan Panyipatan

Kepala Desa dan perangkat desa Se-Kecamatan Panyipatan

Perwakilan Badan Permusyawaratan Desa Se-Kecamatan Panyipatan

Perwakilan siswa/siswi SD, SMP, dan SMA.

Kegiatan tersebut dilaksanakan secara yaitu efektif, efisien, dan *value for money* sehingga dapat terealisasi hanya Rp.76.717.100, dengan persentase realisasi anggaran 76,72% dari pagu Rp.99.996.230 anggaran Kecamatan.



Upacara Pengibaran Bendera Merah Putih

3.) Memfasilitasi , Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa.

Pembinaan dan pengawasan pemerintahan Desa adalah usaha, Tindakan, dan kegiatan yang ditujukan untuk menjamin penyelenggaraan Pemerintahan Desa berjalan secara efisien dan efektif sesuai dengan ketentuan peraturan Peraturan Perundang-Undangan.

Kegiatan ini dilaksanakan secara berkala setiap 6 bulan atau sesuai arahan lebih lanjut dari pimpinan. Kegiatan ini melibatkan seluruh pejabat struktural dan staf untuk melaksanakan pembinaan dan pengawasan ke tiap-tiap Desa di Kecamatan Panyipatan.



Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa

4) Analisis Program / Kegiatan Penunjang Kinerja

Dalam mencapai sasaran meningkatkan seluruh sasaran strategis Kasi Tata Pemerintahan kantor Kecamatan Panyipatan didukung oleh Program/Kegiatan penunjang dengan pagu anggaran Rp. 16.991.863 dan realisasi anggaran sebesar Rp. 16.780.000 atau sebesar 98,75 % dari pagu rang ditetapkan, untuk lebih jelasnya dapat dilihat dari tabel berikut:

Tabel.17

Realisasi anggaran Program Penunjang Kasi Tata Pemerintahan pada Kecamatan
Panyipatan Tahun Anggaran 2023

No	Program / Kegiatan/Sub Kegiatan	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Capaian
1	2	3	4	5
1.	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM (sub kegiatan Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhineka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	99.996.230	76.717.100	76,72 %
Jumlah		99.996.230	76.717.100	76,72 %

5) Analisis Sumberdaya Manusia

Untuk mencapai sasaran strategis Kasi Tata Pemerintahan dalam meningkatkan Nilai sasaran strategisnya di dukung oleh staf 1 orang staf ASN dan 1 orang PTT namun lemahnya Sumber daya manusia yang ada di kasi Tata Pemerintahan menjadi penghambat tercapainya seluruh sasaran strategis yang ada.

6) Kendala dan rencana aksi

Adapun Kendala yang dihadapi oleh Kasi Tata Pemerintahan adalah :

1. Kurangnya Pemahaman ASN tentang tugas dan fungsi dibidang Tata Pemerintahan sehingga sering terjadi kesalahan dalam bekerja.
2. Kurangnya fasilitas yang ada di kasi Tata Pemerintahan yaitu hanya terdapat satu PC / komputer saja sehingga memperlambat terselesainya pekerjaan.

Adapun Rencana aksi yang akan dilakukan oleh Kasi Tata Pemerintahan adalah :

1. Menambah Pemahaman ASN tentang tugas dan fungsi dibidang Tata Pemerintahan melalui pelatihan atau bimtek yang sesuai dengan bidang masing - masing.
2. Menambah fasilitas yang ada di kasi Tata Pemerintahan seyogyanya setiap ASN memegang satu PC / komputer dan perangkat tambahan lainnya sehingga mempercepat terselesaikannya seluruh pekerjaan.

2. Kepala Seksi Pemberdayaan Masyarakat Desa

Realisasi capaian kinerja Kasi Pemberdayaan Masyarakat Desa kecamatan Panyipatan terhadap target mencapai 100%, Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel .18

Realisasi Target Sasaran, indikator Program dan Kegiatan Seksi Pemberdayaan Masyarakat Desa Tahun Anggaran 2023

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Tahun 2022			Tahun 2023		
			Target	Realisasi	Capaian (%)	Target	Realisasi	Capaian (%)
1.	Memberikan Pembinaan tentang penyusunan monografi kecamatan serta profil desa yang akurat.	Jumlah desa yang berhasil menyusun profil desa dengan baik	10 Desa	10 Desa	100%	10 Desa	10 Desa	100%
2	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Jumlah Desa yang terfasilitasi , Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa.	10 Desa	10 Desa	100%	10 Desa	10 Desa	100%
3	Meningkatkan Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Jumlah Kegiatan Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	1 Kegiatan	1 Kegiatan	100%	1 Kegiatan	1 Kegiatan	100%

1) Perbandingan realisasi dengan target;

Realisasi Target indikator kinerja Kasi Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan pada tahun 2023 realisasi indikator kinerjanya rata – rata mencapai 100 %..

2) Perbandingan realisasi dengan realisasi terkait ;

- a. Realisasi Target indikator kinerja Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan pada tahun 2023 rata – rata mencapai 100 %, sedangkan pada tahun 2023 realisasi indikator kinerja Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan rata – rata mencapai 100 %
- b. Realisasi Target indikator kinerja kasi Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan pada tahun 2023 dibandingkan tahun sebelumnya mengalami peningkatan dibandingkan dengan tahun sebelumnya.
- c. Realisasi kinerja sampai dengan tahun 2023 dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis dapat tercapai.

3) Analisis Peningkatan dan Penurunan Kinerja

Berikut adalah uraian kegiatan yang menunjang realisasi kinerja di Kasi PMDK kecamatan Panyipatan antara lain :

- 1.) Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa merupakan salah satu kegiatan penunjang sasaran strategis ke dua yaitu :

- a. Kegiatan Musrenbang Kecamatan yaitu Memfasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa.

Pelaksanaan Musrenbang Tingkat Kecamatan yang dilaksanakan di kecamatan Panyipatan dengan mengikut sertakan muspika, ketua IKKD, dan perwakilan utusan masyarakat total keseluruhan yang ikut serta hadir di musrenbang kecamatan, masing - masing kecamatan terdiri dari 8 orang, adapun kecamatan yang mengikuti kegiatan musrenbang yang dilaksanakan di Kecamatan Kurau dengan peserta yaitu kecamatan Takisung, kecamatan, Kecamatan Panyipatan dan Kecamatan Bumi makmur untuk

realisasi anggaran di kecamatan panyipatan untuk kegiatan Musrenbang sebesar Rp. 0 ,dengan pagu anggaran Rp. 9.999.800 atau tercapai 0%.

- b. Pembinaan dan fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa Tahun 2023, yaitu kegiatan Evaluasi rancangan peraturan desa tentang APBDesa. Untuk pelaksanaan kegiatan ini sudah dilaksanakan Evaluasi APBDesa untuk 10 (sepuluh) desa yang ada di Kecamatan Panyipatan dengan Persentase capaian kegiatan sebesar 100 % .Evaluasi APBDes mencakup APBDes murni dan APBDes Perubahan, yang dihadiri oleh Tim Evaluasi beserta Para Pendamping Desa.



Evaluasi APBDes Tahun 2023

c. Kegiatan Pembinaan dan Pengawasan Pelaksanaan APBDes Tahun 2023

Kegiatan Pembinaan dan Pengawasan Pelaksanaan APBDes Tahun 2023 dilakukan pada bulan April 2023 ke seluruh Desa di wilayah kecamatan Panyipatan dengan tujuan untuk pembinaan terhadap pengelolaan dan pelaksanaan APBDes. kegiatan tersebut mencakup pembinaan terkait Pengelolaan Keuangan Desa serta monitoring pelaksanaan kegiatan Fisik yang telah terealisasi . Berikut adalah foto kegiatan BINWAS yang dilaksanakan di kecamatan Panyipatan.



Kegiatan Pembinaan dan Pengawasan Pelaksanaan APBDes Tahun 2023

2.) Meningkatkan Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan merupakan salah satu kegiatan penunjang sasaran strategis ke ketiga yaitu :

- a. Manunggal Tuntung Pandang Dalam kegiatan manunggal tuntung pandang di kecamatan panyipatan selama tahun 2023 dilaksanakan sebanyak 2 kali yaitu di Desa Batu Tungku dan Desa Batakan, adapun Rangkaian kegiatan Manunggal tuntung pandang tersebut diisi dengan sholat Jumat berjamaah, Penyerahan bantuan, Lomba memancing serta kegiatan PKK dalam hal ini diisi dengan lomba kudapan tingkat RT. Serta perayaan ulang tahun Ibu ketua TP.PKK Kabupaten. Untuk penyerahan bantuan sembako yang telah diserahkan sebanyak 15 orang dengan sasaran masyarakat miskin Jompo.

Berikut adalah foto kegiatan Manunggal tuntung pandang yang dilaksanakan di kecamatan Panyipatan.



Kegiatan manunggal Tuntung Pandang di Kecamatan Panyipatan

- 3.) Memberikan Pembinaan tentang penyusunan monografi kecamatan serta profil desa yang akurat merupakan salah satu kegiatan penunjang sasaran strategis ke satu berupa :

Melalui Fasilitasi Kegiatan Bimbingan Teknis Profil desa dan Kelurahan, kegiatan tersebut dilaksanakan di aula kantor kecamatan yang diikuti oleh sekdes dan aparat desa se kecamatan panyipatan. Kegiatan tersebut bertujuan untuk Memberikan Pembinaan tentang penyusunan monografi kecamatan serta profil desa yang akurat.



Kegiatan Bimbingan Teknis Profil desa dan Kelurahan

4) Analisis Program / Kegiatan penunjang Kinerja

Dalam mencapai sasaran meningkatkan seluruh sasaran strategis Kasi Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan kantor Kecamatan Panyipatan didukung oleh Program/Kegiatan penunjang dengan pagu anggaran Rp.58.376.050 dan realisasi anggaran sebesar Rp. 46.179.000 atau sebesar 79,10 % dari pagu rang ditetapkan, untuk lebih jelasnya dapat dilihat dari tabel berikut:

Tabel.19

Realisasi Program Penunjang pada Kasi PMDK Kecamatan Panyipatan Tahun Anggaran 2023

No	Program / Kegiatan/Sub Kegiatan	Anggaran (RP)	Realisasi (RP)	Capaian
1	2	3	4	5
I.	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	48,439,400	39,757,000	82.08
1	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	48,439,400	39,757,000	82.08
1.1	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	48,439,400	39,757,000	82.08
II.	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	9,936,650	6,422,000	64.63
1	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	9,936,650	6,422,000	64.63
1.1	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	9,936,650	6,422,000	64.63
1.2	Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa	-	-	0.00
Jumlah		758.376.050	46.179.000	79,10

5) Analisis Sumberdaya Manusia

Untuk mencapai sasaran strategis Kasi Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan dalam meningkatkan Nilai sasaran strategisnya di dukung oleh staf 1 orang staf ASN dan 1 orang PTT namun lemahnya Sumber daya manusia yang ada di Kasi Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan menjadi penghambat tercapainya seluruh sasaran strategis yang ada.

6) Kendala dan rencana aksi

Adapun Kendala yang dihadapi oleh Kasi Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan adalah :

1. Kurangnya Pemahaman ASN tentang tugas dan fungsi dibidang Kasi Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan sehingga sering terjadi kesalahan dalam bekerja.
2. Kurangnya fasilitas yang ada di Kasi Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan yaitu hanya terdapat satu Leptop dengan kondisi yang sering rusak meskipun sudah dilakukan pemeliharaan sehingga memperlambat terselesainya pekerjaan.

Adapun Rencana aksi yang akan dilakukan oleh Kasi Tata Pemerintahan adalah :

1. Menambah Pemahaman ASN tentang tugas dan fungsi dibidang Tata Pemerintahan Kasi Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan melalui pelatihan atau bimtek yang sesuai dengan bidang masing - masing.
2. Menambah fasilitas yang ada di kasi Kasi Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan seyogyanya setiap ASN memegang satu PC / komputer atau penggantian leptop yang baru sehingga mempercepat terselesaikannya seluruh pekerjaan.

3. Kepala Seksi Kemasyarakatan

Dari tiga sasaran strategis yang telah ditargetkan oleh Kasi Kemasyarakatan kecamatan Panyipatan capaian Realisasi kinerja hanya satu kegiatan dan yang realisasi target mencapai 100%,adapun sasaran strategis yang capaiannya dibawah 100 % adalah:

1. Memberikan Pembinaan Kepada kelompok organisasi masyarakat di bidang kemasyarakatan hanya mencapai 92 % atau hanya 11 kelompok organisasi masyarakat dimana target yang ditetapkan adalah 12 kelompok organisasi masyarakat.
2. Fasilitasi Penyaluran Bantuan Sosial di kecamatan hanya mencapai 93,26 % dari target

3.678 KPM hanya terealisasi sebanyak 3.430 KPM hal ini dikarenakan adanya kebijakan pengurangan penerima bantuan sosial.

3. Kegiatan Membina Kerukunan Antar Suku dan Intrasuku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional terutama sub kegiatan Pembinaan kerukunan antarsuku dan intrasuku, umat beragama, ras, dan golongan lainnya guna mewujudkan stabilitas keamanan lokal, regional dan nasional capaian realisasi anggarannya sebesar Rp. 1.044.100.000 atau 90,65 % dari target anggaran Rp. 1.151.754.962. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 20.

Realisasi Target Sasaran, indikator Program dan Kegiatan Seksi Kemasyarakatan Tahun 2023

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Tahun 2022			Tahun 2023		
			Target	Realisasi	Capaian (%)	Target	Realisasi	Capaian (%)
1	Memberikan Pembinaan Kepada kelompok organisasi masyarakat di bidang kemasyarakatan	Jumlah Pembinaan kelompok organisasi masyarakat di bidang kemasyarakatan	11 Kelompok	9 kelompok	81	12 Kelompok	11 kelompok	92
2	Membina Kerukunan Antar Suku dan Intrasuku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan	Jumlah Kegiatan pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intrasuku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional	3 Kegiatan	3 Kegiatan	100 %	3 Kegiatan	3 Kegiatan	100 %

	Nasional							
3	Fasilitasi Penyaluran Bantuan Sosial di kecamatan	Jumlah masyarakat tidak mampu yang di fasilitasi penyaluran bantuan sosialnya	3.525 KPM	2.360 KPM	66.95	3.678 KPM	3.430 KPM	93,26 %

1) Perbandingan realisasi dengan target;

Realisasi Target indikator kinerja Kasi Kemasyarakatan pada tahun 2023 realisasi indikator kerjanya berbeda – beda, untuk Memberikan Pembinaan Kepada kelompok organisasi masyarakat di bidang kemasyarakatan capaian realisasi kerjanya hanya 92 % hal ini dikarenakan ada 1 kelompok organisasi yang tidak bisa melaksanakan kegiatannya, sedangkan target kinerja Fasilitasi Penyaluran Bantuan Sosial di kecamatan hanya mencapai 66.95 % hal ini dikarenakan adanya penurunan masyarakat yang menira bantuan sosial sebab pemerintah telah menganggap yang terdampak covid 19 sudah mulai pulih. Untuk Target indikator kinerja Membina Kerukunan Antar Suku dan Intrasuku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional sudah terlaksana keseluruhan atau mencapai 100 % dari target kinerja yang telah ditentukan.

2) Perbandingan realisasi dengan realisasi terkait ;

- a. Realisasi Target indikator kinerja Kemasyarakatan pada tahun 2023 rata – rata mencapai 100 % bahkan ada 1 (satu) target indikator kinerja yang tidak mencapai target yaitu Fasilitasi Penyaluran Bantuan Sosial di kecamatan hal ini dikarenakan ada jumlah KPM yang meninggal dunia dan jumlah kpm yang pindah alamat tempat tinggal pemerintah menetapkan kebijakan pemberian bantuan sosial bagi masyarakat.
- b. Realisasi Target indikator kinerja kasi Kemasyarakatan pada tahun 2023 dibandingkan tahun sebelumnya mengalami perbandingan yang sama tahun sebelumnya.
- c. Realisasi kinerja sampai dengan tahun 2023 dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis dapat tercapai.

3) Analisis Peningkatan dan Penurunan Kinerja

Fasilitasi penyaluran bantuan sosial di kecamatan Panyipatan mencapai 3.430 KPM kurang dari target 3.678 KPM yang telah ditentukan. Adapun rincian bantuan sosial yang sudah dilaksanakan dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel .21

JUMLAH PENERIMA BANSOS di KECAMATAN PANYIPATAN TAHUN 2023

No	Jenis Bantuan Sosial	Jumlah Penerima
1.	Bantuan Pangan Nasional Republik Indonesia untuk warga miskin	1.819 KPM/ KK
2.	Bantuan Pangan Non Tunai untuk Masyarakat Indonesia yang memiliki taraf ekonomi rendah / rentan miskin	1.360 KPM/KK
3.	Bantuan Langsung Tunai untuk Lansia dan Disabilitas	251 KPM/KK
JUMLAH		3.430 KPM/KK

Sumberdata : Laporan Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan (TKSK) dan Kasi Kemasyarakatan Tahun 2023

Berikut adalah foto Kegiatan Kegiatan Fasilitasi Penyaluran Bantuan Sosial tahun 2023 :



Gambar 8. Kegiatan penyerahan Bantuan Pangan Nasional Republik Indonesia untuk warga miskin



Kegiatan penyerahan Bantuan Pangan Non Tunai untuk Masyarakat yang memiliki taraf ekonomi rendah / rentan miskin



Kegiatan penyerahan Bantuan Langsung Tunai untuk Lansia dan Disabilitas

a. Kegiatan Penyaluran Bantuan dari Baznas Kabupaten

Fasilitasi salah satu Program Baznas Kabupaten Tanah Laut yaitu Tala Taqwa kepada Kaum / Marbot Masjid se Kabupaten Tanah Laut sebanyak 265 Masjid berupa Paket Ramadhan Bahagia dan untuk Kecamatan Panyipatan sebanyak 20 Paket yang dilaksanakan pada bulan Ramadhan 1444 H, paket tersebut berupa Paket berisi : Kue kering, Minuman Fanta dan Sirup, Biskuit kaleng, Susu kaleng, Gula Pasir, dan Teh. Kegiatan tersebut dilaksanakan pada senin 25 Maret 2023 di kantor Kecamatan Panyipatan.

Berikut adalah foto Kegiatan Kegiatan Penyaluran Bantuan dari Baznas Kabupaten.



Penyaluran Bantuan dari Baznas Kabupaten Tanah Laut

- 2.) Kegiatan Penyerahan Dana Hibah 1 Milyar Merupakan salah satu kegiatan penunjang sasaran strategis ke dua yaitu Membina Kerukunan Antar Suku dan Intrasuku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional.

Berdasarkan Surat Keputusan Bupati Tanah Laut Nomor : 188.45/ 423-KUM/ 2023 tanggal 24 february 2023 tentang Penetapan Daftar Penerima dan Besaran Uang Hibah Dana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Tanah Laut pada Kecamatan Panyipatan Tahun Anggaran 2023, Kecamatan Panyipatan mengelola Dana Hibah tahun anggaran 2023 sebesar Rp1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) untuk 12 Organisasi Masyarakat.

Sebelum penyaluran dana hibah tersebut dilakukan terlebih dahulu penandatanganan Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) bersama ke sembilan lembaga masyarakat yang telah memenuhi syarat dan ketentuan yang berlaku. Penandatanganan dilaksanakan di aula kantor kecamatan panyipatan pada hari selasa 21 juni 2023

Berikut adalah foto Kegiatan Penyerahan Dana Hibah 1 Milyar dikecamatan panyipatan.



Penandatanganan NPHD Hibah 2023

Selanjutnya dilakukan Rapat Tim Evaluasi Dana Hibah Kecamatan tahun 2023 untuk melakukan verifikasi atas Permohonan Pencairan dana hibah terkait kelengkapan dokumen, keabsahan dokumen, pembuatan Rencana Anggaran Biaya (RAB), kesamaan Kop surat dengan cap Organisasi, konsistensi penulisan nama organisasi di semua dokumen kegiatan tersebut dilaksanakan dikantor kecamatan pada hari Jum'at, 05 Mei 2023

Berikut adalah foto Kegiatan rapat verifikasi atas Permohonan Pencairan Dana Hibah 1 Milyar dikecamatan panyipatan.



Kegiatan rapat verifikasi Pencairan Hibah tahun 2023

Untuk kelengkapan syarat pencairan dana hibah kecamatan kasi

kemasyarakatan mengadakan Rapat Koordinasi dengan pengurus Organisasi Kemasyarakatan se Kecamatan Panyipatan calon penerima dana hibah.

Rapat Koordinasi dengan pengurus Organisasi Kemasyarakatan se Kecamatan Panyipatan calon penerima dana hibah tahun 2023 di laksanakan di aula kantor Kecamatan Panyipatan pada hari Jum'at, 05 Mei 2023 untuk menyamakan persepsi tentang Langkah-langkah yang harus dilakukan untuk pencairan dana hibah tahun 2023.

Rapat Koordinasi dipimpin oleh Sekcam selaku Ketua Tim Evaluasi dana hibah Kecamatan dilanjutkan oleh Kasi Kemasyarakatan untuk penjelasan tentang mekanisme pencairan dana hibah seperti pengisian format-format yang digunakan serta kelengkapan yang harus dipenuhi untuk percairan dana hibah tersebut.

Berikut adalah foto Rapat kordinasi tentang tentang mekanisme pencairan dana hibah tahun 2023.



Rapat kordinasi tentang mekanisme pencairan dana hibah tahun 2023.

Pada awal tahun 2023 juga dilakukan Kegiatan Rapat Tim Evaluasi Dana Hibah untuk tahun Anggaran 2024.

Kegiatan rapat dilakukan di kantor kecamatan panyipatan pada hari selasa

tanggal 28 februari 2023 dihadiri oleh seluruh tim evaluasi dana hibah tahun 2024, Rapat Tim bertujuan untuk melakukan evaluasi dan verifikasi keabsahan dan kelengkapan persyaratan hibah atas surat permohonan, proposal, persyaratan administrasi, dan kesesuaian substansi dokumen teknis hibah dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Adapun jumlah Proposal yang diterima sebanyak 12 proposal atau senilai Rp 2.108.941,- namun Proposal yang lulus verifikasi awal sebanyak 12 proposal dengan anggaran senilai Rp 1.000.000.000,

Berikut adalah foto Rapat Tim Evaluasi Dana Hibah tahun 2024.



Rapat Tim Evaluasi Dana Hibah tahun 2024.

3.) Kegiatan Membina Kerukunan Antar Suku dan Intrasuku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional merupakan salah satu penunjang sasaran strategis yang ke dua antara lain :

a. Pada Tahun 2023 Kecamatan Panyipatan Kembali mengikuti Musabaqah Tilawatil Qur'an (MTQ) ke 45 Tingkat Kabupaten Tanah Laut di Kecamatan Kintap, jumlah utusan sebanyak 60 orang terdiri dari 40 peserta lomba (kafilah), 87 official, 7 pelatih dan 6 pendamping, pelaksanaan pada tanggal 07 s.d 09 Juni 2023.

Pada MTQ kali ini Kecamatan Panyipatan meraih sejumlah prestasi sebagai berikut :

1. Nur Qoyyimah Cabang Tilawah Al-Qur'an Murratal Putri Juara Harapan 3
2. Risti Alya Zahra Cabang Tilawah Al-Qur'an Golongan Anak Kategori Putri Juara Harapan 2
3. Uswatun Hasanah Cabang Tilawah Al-Qur'an Golongan Remaja Kategori Putri Juara Harapan 1
4. Patimatul Aliyah Cabang Tilawah Al-Qur'an Golongan Dewasa Kategori Putri Juara 2
5. Ahmad Muzakkir Cabang Tilawah Al-Qur'an Golongan Qiraat Mujawwad Dewasa Kategori Putra Juara Harapan 3
6. Ma'rifah Cabang Tilawah Al-Qur'an Golongan Qiraat Mujawwad Dewasa Kategori Putri Juara 3
7. Hafiz Anshari Gol Qira'ah Sab'ah Murratal Dewasa Putra Juara Harapan 1 Kategori Putri Juara 2
8. Lisa Arliana Gol Qira'ah Sab'ah Murratal Dewasa Putri Juara 3
9. Nispi Zulfiana Gol Qira'ah Sab'ah Murratal Remaja Putri Juara 2
10. Siti Aminah Cabang Fahmil Qur'an Putri Juara Harapan 3
11. Labib Haikal Farouq Cabang Syarhil Qur'an Putra Juara 3
12. Ani Arsinah Cabang Syarhil Qur'an Putri Juara 1
13. Yuli Safitri Gol Dekorasi Putri Juara 3
14. Aulia Azizah Gol Kontemporer Putri Juara Harapan 2
15. Galih Liman Hidayat Hafalan 100 Hadist Putra Juara Harapan 1
16. Nasywa Meirina Hafalan 100 Hadist Putri Juara Harapan 2
17. Rahmad Kartha Pratama Hafalan 500 Hadist Putra Juara 1
18. Norlina Hafalan 500 Hadist Putri Juara 2

Berikut adalah beberapa foto Kegiatan Pengiriman Kafilah MTQ ke 45



Upacara pelepasan Kontingen MTQ Kecamatan Panyipatan



Kontingen Kecamatan Panyipatan yang meraih prestasi

b. Kegiatan Safari Ramadhan

Dalam rangka meningkatkan hubungan silaturahmi antara Umara dengan Ulama dan Masyarakat di Bulan Suci Ramadhan Tahun 1444 H/ 2023 M, bulan yang penuh dengan Rahmat dan Ampunan serta MagfirahNya, Pemerintah Kabupaten Tanah Laut melaksanakan kegiatan Safari Ramadhan Bupati dan Wakil Bupati Tanah Laut ke salah satu Masjid di masing-masing Kecamatan se Kabupaten Tanah Laut, di Kecamatan Panyipatan dilaksanakan di Masjid Jami Nurul Kautsar Desa Kandangan Lama pada hari Jum'at, 24 Maret 2023, dalam giat ini Bupati Tanah Laut menyerahkan bantuan berupa tikar ambal dari Bank Kalsel dan BRI Cabang Pelaihari ke

Masjid Jamiatul Khairat Desa Kandangan Baru dan Paket Ramadhan Bahagia dari Baznas ke Kaum Masjid (Marbot).

Berikut adalah beberapa foto Kegiatan Safari Ramadhan di Desa Kandangan Baru Kecamatan Panyipatan.



.kegiatan safari ramadhan di Desa Kandangan Baru



kegiatan penyerahan bantuan hibah pada acara safari ramadhan.



Salah satu pelaksanaan kegiatan hibah 1 M di Desa Kandangan Lama.

4) Analisis Program/kegiatan Penunjang Kinerja

Dalam mencapai sasaran meningkatkan seluruh sasaran strategis Kasi Kemasyarakatan kantor Kecamatan Panyipatan didukung oleh Program/Kegiatan penunjang dengan pagu anggaran Rp. 1.151.754.963 dan realisasi anggaran sebesar Rp. 1.044.100.000 atau sebesar 90,65 % dari pagu anggaran yang ditetapkan. Hal ini dikarenakan dalam pelaksanaannya dana hibah yang dapat direalisasikan sebanyak 11 organisasi kemasyarakatan dengan relisasi anggarannya sebesar Rp. 920.000.000,- sedangkan sebanyak 1 Organisasi Kemasyarakatan tidak dapat merealisasikan karena tidak terpenuhinya persyaratan yang diperlukan untuk pencairan dana hibah tersebut dengan anggaran sebesar Rp. 80.000.000,- yaitu Perkumpulan Pemuda Tangkas Desa Kandangan Baru (Turnamen olahraga, agama, seni dan budaya)

Secara keseluruhan realisasi anggaran pada Kasi kemasyarakatan dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel.22

Realisasi Program Penunjang pada Kasi Kemasyarakatan Kecamatan Panyipatan Tahun
Anggaran 2023

No	Program / Kegiatan/Sub Kegiatan	Anggaran (RP)	Realisasi (RP)	Capaian %
1	2	3	4	5
I	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	1,302,845,245	1,170,599,320	89.85
1.	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	1,302,845,245	1,170,599,320	89.85
1.1	Pembinaan Kerukunan Antarsuku dan Intrasuku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional	1,151,754,962	1,044,100,000	90.65
Jumlah		1.151.754.962	1.044.100.00	90,65

5) Analisis Sumberdaya Manusia

Untuk mencapai sasaran strategis Kasi Kemasyarakatan dalam meningkatkan Nilai sasaran strategisnya di dukung oleh staf 2 orang staf ASN dan 1 orang PTT namun lemahnya Sumber daya manusia yang ada di Kasi Kemasyarakatan menjadi penghambat tercapainya seluruh sasaran strategis yang ada.

6) Kendala dan rencana aksi

Adapun Kendala yang dihadapi oleh Kasi Kemasyarakatan adalah :

1. Kurangnya Pemahaman ASN tentang tugas dan fungsi dibidang Kasi Kemasyarakatan sehingga sering terjadi kesalahan dalam bekerja.
2. Kurangnya fasilitas yang ada di Kasi Kemasyarakatan yaitu hanya

terdapat 1 (satu) Leptop dan 1 (satu) PC dengan kondisi tersebut memperlambat terselesainya pekerjaan.

Adapun Rencana aksi yang akan dilakukan oleh Kasi Tata Pemerintahan adalah :

1. Memberikan Pemahaman ASN tentang tugas dan fungsi dibidang Kasi Kemasyarakatan melalui pelatihan atau bimtek yang sesuai dengan bidang masing - masing.
2. Menambah fasilitas yang ada di kasi Kemasyarakatan seyogyanya setiap ASN memegang satu PC / komputer atau penggantian leptop yang baru sehingga mempercepat terselesaikannya seluruh pekerjaan.

4. Kepala Seksi Ketentraman dan Ketertiban

Dalam Pelaksanaan dilapangan peran koordinasi mutlak diperlukan dengan stake holder terkait meliputi : Forkopimcam (Polsek Panyipatan, Danposramil Panyipatan, Danpos AL Batakan), Damkar Unit Panyipatan, FKDM, Tokoh Agama, Tokoh Masyarakat, Tokoh Pemuda dan Masyarakat kecamatan pada khususnya. Realisasi capaian kinerja Kasi Trantib kecamatan Panyipatan terhadap target rata rata seluruhnya mencapai 100% Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 23.

Realisasi Target Sasaran, indikator Program dan Kegiatan Seksi Trantib Tahun .2023

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Tahun 2022			Tahun 2023		
			Target	Realisasi	Capaian (%)	Target	Realisasi	Capaian (%)
1	Memfasilitasi penanganan gangguan ketentraman dan ketertiban masyarakat di Kecamatan	Jumlah kegiatan penanganan gangguan dan ketertiban masyarakat di kecamatan yang di fasilitasi	1 kegiatan	1 kegiatan	100%	1 kegiatan	1 kegiatan	100%
2	Membina kelompok masyarakat di bidang ketentraman dan ketertiban	Jumlah kelompok masyarakat di bidang ketentraman dan ketertiban yang aktif	2 Kelompok	2 Kelompok	100%	2 Kelompok	2 Kelompok	100%
3	Monitoring penanganan	Jumlah penanganan	12 kali	12 kali	100%	6 kali	6 kali	100%

	gangguan ketenteraman dan ketertiban masyarakat di kecamatan	gangguan dan ketertiban masyarakat di kecamatan yang di monitoring						
4	Meningkatkan Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Jumlah kegiatan Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	4 Kegiatan	4 Kegiatan	0%	4 Kegiatan	4 Kegiatan	100%

1) Perbandingan realisasi dengan target;

Realisasi Target indikator kinerja Kasi Ketenteraman dan Ketertiban pada tahun 2023 realisasi indikator kinerjanya keseluruhan memiliki rata – rata mencapai 100 % dari target yang telah ditetapkan.

2) Perbandingan realisasi dengan realisasi terkait ;

- a. Realisasi Target indikator kinerja Kasi Ketenteraman dan Ketertiban pada tahun 2023 rata – rata mencapai 100 %.
- b. Realisasi Target indikator kinerja kasi Ketenteraman dan Ketertiban pada tahun 2023 dibandingkan tahun sebelumnya mengalami penurunan dengan serapan realisasi sebesar 97,43 %.
- c. Realisasi kinerja sampai dengan tahun 2023 dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis dapat tercapai.

3) Analisis Peningkatan dan Penurunan Kinerja

Berikut ini adalah rangkaian kegiatan yang dilaksanakan oleh kasi Ketentraman dan Ketertiban sebagai berikut :

- 1.) Memfasilitasi penanganan gangguan ketentraman dan ketertiban masyarakat di Kecamatan merupakan salah satu penunjang sasaran strategis yang ke pertama selama tahun 2023 terealisasi 1 Kegiatan yaitu;
 - Memfasilitasi penyelesaian sengketa lokasi grencamping di Batakan Baru antara pengelola objek wisata dengan warga masyarakat RT. 15 Desa Batakan fasilitasi dilaksanakan di Kantor Kecamatan Panyipatan.



2.) Membina kelompok masyarakat di bidang ketentraman dan ketertiban merupakan salah satu penunjang sasaran strategis yang ke kedua selama tahun 2023 diantaranya adalah :

- Melakukan pembinaan/koordinasi terhadap kelompok masyarakat melalui Penguatan perlindungan.



- Melakukan pembinaan/koordinasi kepada masyarakat dengan melakukan kunjungan-kunjungan langsung ke masyarakat ke desa.



3.) Monitoring penanganan gangguan ketentraman dan ketertiban masyarakat di kecamatan, merupakan salah satu penunjang sasaran strategis yang ke ketiga selama tahun 2023 dengan melakukan :

- Melakukan monitoring keamanan dan kelancaran pelaksanaan Natal 2023 di Kecamatan Panyipatan



- Melakukan monitoring pengamanan kunjungan wisata di objek wisata terkait libur Natal dan Tahun Baru





4.) Melakukan Koordinasi upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum di Kecamatan Panyipatan.

- Melakukan Rapat Koordinasi Forum Koordinasi Pimpinan Kecamatan (FORKOPIMCAM) Panyipatan dengan dilaksanakannya rapat koordinasi sebanyak 10 kali pertemuan, membahas berbagai hal terkait ketentraman dan ketertiban di masyarakat serta memfasilitasi kasus2 perselisihan dimasyarakat dan perselisihan dengan berbagai pihak lainnya.







4) Analisis Program / Kegiatan penunjang Kinerja.

Untuk capaian realisasi anggaran pada kasi ketentraman dan ketertiban program Koordinasi ketentraman dan ketertiban umum sebesar Rp.0 atau 0 % dari anggaran yang telah ditetapkan sebesar Rp.0. hal ini dikarenakan terbatasnya pagu anggaran yang telah diberikan sehingga tidak memungkinkan untuk diadakanya kegiatan di kasi ketentraman dan ketertiban. Untuk memperjelas pernyataan tersebut dapat dilihat dari tabel berikut :

Tabel.25

Realisasi Program Penunjang Kasi Tantib pada Kecamatan Panyipatan Tahun Anggaran 2023

No	Program / Kegiatan/Sub Kegiatan	Anggaran (RP)	Realisasi (RP)	Capaian
1	2	3	4	5
1.	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	51.094.053	49.782.220	97,43%
	Jumlah	51.094.053	49.782.220	97,43%

5) Analisis Sumberdaya Manusia

Untuk mencapai sasaran strategis Kasi ketentraman dan ketertiban dalam meningkatkan Nilai sasaran strategisnya di dukung oleh staf dan 1 orang PTT namun lemahnya Sumber daya manusia yang ada di Kasi ketentraman dan ketertiban menjadi penghambat tercapainya seluruh sasaran strategis yang ada.

6) Kendala dan rencana aksi

Adapun Kendala yang dihadapi oleh Kasi ketentraman dan ketertiban adalah :

1. Kurangnya Pemahaman ASN tentang tugas dan fungsi dibidang Kasi ketentraman dan ketertiban sehingga sering terjadi kesalahan dalam bekerja.
2. Kurangnya fasilitas yang ada di Kasi ketentraman dan ketertiban yaitu hanya terdapat 1 (satu) Leptop dengan kondisi tersebut memperlambat terselesainya pekerjaan.

Adapun Rencana aksi yang akan dilakukan oleh Kasi Tata Pemerintahan adalah :

1. Menambah Pemahaman ASN tentang tugas dan fungsi dibidang Kasi ketentraman dan ketertiban melalui pelatihan atau bimtek yang sesuai dengan bidang masing - masing.
2. Menambah fasilitas yang ada di kasi ketentraman dan ketertiban seyogyanya setiap ASN memegang satu PC / komputer atau penggantian leptop yang baru sehingga mempercepat terselesaikannya seluruh pekerjaan.

5. Kepala Seksi Pelayanan

Realisasi capaian sasaran strategis dan realisasi anggaran pada kasi pelayanan capaian sasaran strategis rata - rata mencapai 100% sedangkan untuk capaian realisasi anggaran sebesar Rp.4.154.000 atau 99,59 % dari target sebesar Rp.4.171.240 untuk lebih jelasnya capaian realisasi kinerja dan realisasi anggaran Kasi Pelayanan dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 26.

Realisasi Target Sasaran, indikator Program dan Kegiatan Seksi Pelayanan

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Tahun 2022			Tahun 2023		
			Target	Realisasi	Capaian (%)	Target	Realisasi	Capaian (%)
1	Memfasilitasi Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan.	Jumlah Kegiatan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan	1 Kegiatan	1 kegiatan	100%	1 Kegiatan	1 kegiatan	100%
2	Memberikan Pelayanan Administrasi terpadu kecamatan (PATEN)	Jumlah produk Pelayanan Masyarakat Pelayanan Terpadu Kecamatan sesuai SOP	16 produk Layanan	11 Produk layanan	68,7 %	16 produk Layanan	12 Produk layanan	75%
3	Menyusun data informasi Pelayanan Administrasi terpadu kecamatan (PATEN)	Jumlah data informasi Pelayanan Administrasi terpadu kecamatan (PATEN)	1 dokumen	1 dokumen	100%	4 dokumen	4 dokumen	100%

1) Perbandingan realisasi dengan target;

Realisasi Target indikator kinerja Kasi Pelayanan pada tahun 2023 realisasi indikator kinerjanya rata – rata mencapai 100 % dari target yang telah ditetapkan. Meskipun ada satu indicator kinerja hanya mencapai 75 % yaitu indikator kinerja Memberikan Pelayanan Administrasi terpadu Kecamatan (PATEN).

2) Perbandingan realisasi dengan realisasi terkait ;

- a. Realisasi Target indikator kinerja Kasi Pelayanan pada tahun 2022 rata – rata mencapai 100 % Meskipun ada satu target indikator kinerja hanya mencapai 68,7% yaitu indikator kinerja Memberikan Pelayanan Administrasi terpadu kecamatan (PATEN).
- b. Realisasi Target indikator kinerja kasi Pelayanan pada tahun 2023 dibandingkan tahun sebelumnya mengalami kenaikan daripada tahun sebelumnya.
- c. Realisasi kinerja sampai dengan tahun 2023 dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis dapat tercapai.

3) Analisis Peningkatan dan Penurunan Kinerja

Berikut adalah seluruh kegiatan Penunjang tercapainya indikator kinerja Kasi Pelayanan tahun 2023 sebagai berikut :

- 1.) Memberikan Pelayanan Administrasi terpadu kecamatan (PATEN) merupakan salah satu penunjang sasaran strategis yang ke kedua selama tahun 2023 dengan melakukan oleh kasi pelayanan berupa :

- a. Memberikan pelayanan terhadap masyarakat

Untuk mencapai pelayanan yang memuaskan bagi masyarakat diperlukan ketangkasan dan pemahaman petugas pelayanan tentang berbagai produk layanan yang di perlukan oleh masyarakat.

Memberikan Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN) pada tahun 2023 sebanyak 12 Jenis Produk Pelayanan dapat terealisasi sepenuhnya (100%).

Adapun jenis pelayanan yang dimaksud sebagai berikut :

1. Pelayanan pembuatan IMB rumah tempat tinggal.
2. Pelayanan pembuatan Rekomendasi.
3. Pelayanan pengambilan KTP Elektronik/Manual.
4. Pelayanan pengambilan KK (Kartu Keluarga)
5. Pelayanan pengambilan kartu identitas anak (KIA).
6. Pelayanan legalisasi Surat Keterangan Ahli Waris.
7. Pelayanan legalisasi pembuatan SKCK.
8. Pelayanan legalisasi pembuatan Surat Keterangan Usaha (SKTU).
9. Pelayanan legalisasi pembuatan Surat Keterangan Domisili.
10. Pelayanan Surat Keterangan Pindah.
11. Pelayanan Surat Keterangan Kematian.
12. Pelayanan legalisasi pembuatan Surat Keterangan Tidak Mampu (SKTM).
13. Pelayanan legalisasi pembuatan Surat Ijin Keramaian.
14. Pelayanan pembuatan Surat Dispensasi Nikah
15. Pelayanan Akta Kelahiran
16. Pelayanan Surat keterangan lain-lain

PATEN telah menerapkan sistem pelayanan 1 (satu) pintu dimana Seksi Pelayanan menjadi pintu utama pendistribusian segala jenis administrasi pelayanan dan administrasi perkantoran di Kecamatan panyipatan.

Jumlah Pelayanan Terpadu Kecamatan (PATEN) sesuai SOP sebanyak 16 jenis pelayanan, yang telah memenuhi target indikator sebanyak 12 Jenis pelayanan tahun 2023 dengan capaian target 75 %. Volume / Jumlah Pelayanan administrasi kependudukan dan Legalisasi Surat, ditentukan oleh aktiviitas dan kebutuhan masyarakat di Kecamatan Panyipatan. Untuk lebih jelasnya jenis pelayanan dan realisasi pelayanan tahun 2023 dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 26.

Realisasi Pelayanan Kecamatan Panyipatan Tahun 2023

No	Jenis Pelayanan	Jumlah	Pelayanan
1	Pelayanan pembuatan IMB rumah tempat tinggal	0	Seksi PMD
2	Pelayanan pembuatan Rekomendasi	100	Seksi Pelayanan
3	Pelayanan KTP Elektronik/Manual.	700	Seksi tapem
4	Pelayanan KK (Kartu Keluarga)	860	Seksi tapem
5	Pelayanan kartu identitas anak (KIA)	450	Seksi Tapem
6	Pelayanan legalisasi Surat Keterangan Ahli Waris	60	Seksi Tapem
7	Pelayanan legalisasi pembuatan SKCK	-	Seksi Trantib
8	Pelayanan legalisasi pembuatan Surat Keterangan Usaha (SKTU)	4	Seksi PMD
9	Pelayanan legalisasi pembuatan Surat Keterangan Domisili	-	Seksi Tapem
10	Pelayanan Surat Keterangan Pindah	-	Seksi Tapem
11	Pelayanan Surat Keterangan Kematian.	4	Seksi Tapem
12	Pelayanan legalisasi pembuatan Surat Keterangan Tidak Mampu (SKTM)	320	Seksi Kemasyarakatan
13	Pelayanan legalisasi pembuatan Surat Ijin Keramaian	1	Seksi Trantib
14	Pelayanan pembuatan Surat Dispensasi Nikah	90	Seksi Kemasyarakatan
15	Pelayanan Surat Keterangan lainnya	4	Seksi pelayanan
16.	Pelayanan Akta Kelahiran	550	Seksi Tapem



Memberikan Pelayanan terhadap Masyarakat.



Memberikan Pelayanan terhadap Masyarakat

2.)Menyusun data informasi Pelayanan Administrasi terpadu kecamatan (PATEN) merupakan salah satu penunjang sasaran strategis yang ke ketiga selama tahun 2023 yang dilakukan oleh kasi pelayanan yaitu melakukan Penilaian Survei IKM.

Untuk mengetahui tingkat kinerja unit pelayanan secara berkala sebagai bahan untuk menetapkan kebijakan dalam rangka peningkatan kualitas pelayanan publik maka setiap 3 (bulan) bulan sekali dilaksanakan Survei Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) penyelenggaraan Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN).

Berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggara

Pelayanan Publik bahwa Survei Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) adalah pengukuran secara komprehensif kegiatan tentang tingkat kepuasan masyarakat yang diperoleh dari hasil pengukuran atas pendapat masyarakat dalam memperoleh pelayanan dari penyelenggara pelayanan publik.

Survei Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) menargetkan minimal 150 responden setiap 3 bulan sekali.



Mempersilahkan responden yang untuk mengisi *Form* kuesioner Survei Indeks Kepuasan Masyarakat.

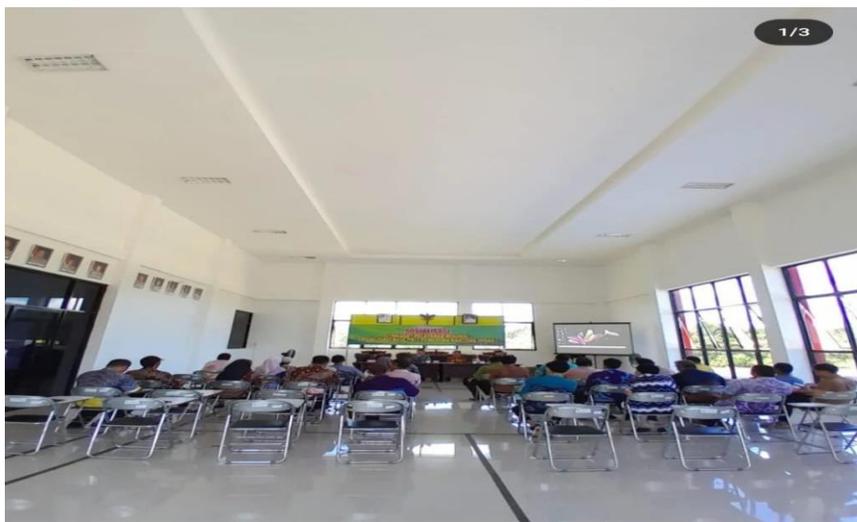


Mengumpulkan Data hasil Kuesioner Survei Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM).

- 3.) Memfasilitasi Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan

Oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan merupakan salah satu kegiatan penunjang sasaran strategis yang pertama selama tahun 2023 yaitu dengan melakukan kegiatan berupa:

- a. Sosialisasi Standar Pelayanan Minimal” Sosialisasi BPJS PBI (Penerima Bantuan Iuran)”, sosialisasi ini dilakukan pada hari kamis 11 Mei 2023 bertempat di Aula Sapaham Kecamatan Panyipatan dengan narasumber dari Dinas Sosial, yang dihadiri oleh seluruh Kepala Desa , Kasi Pelayanan dan kesejahteraan se Kecamatan Panyipatan. Sosialisasi ini bertujuan agar masyarakat mengetahui SOP tentang PBJS PBI (penerima bantuan iuran) sehingga akan mempermudah masyarakat jika ingin membuat BPJS PBI tersebut.



4) Analisis Program / Kegiatan penunjang kinerja

Untuk capaian realisasi anggaran pada kasi Pelayanan Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik sebesar Rp.4.154.000 atau 99,59 % dari anggaran yang telah ditetapkan sebesar Rp.4.171.240..Untuk memperjelas pernyataan tersebut dapat dilihat dari tabel berikut :

Tabel.27

Realisasi Program Penunjang Kasi Pelayanan pada Kecamatan Panyipatan
Tahun Anggaran 2023

No	Program / Kegiatan/Sub Kegiatan	Anggaran (RP)	Realisasi (RP)	Capaian
1	2	3	4	5
I.	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	4.171.240	4.154.000	99,5%
1	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan	4,171,240	4,154,000	99.59
1.1	Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan	4,171,240	4,154,000	99.59
Jumlah		4.171.240	4.154000	99,5%

5) Analisis Sumberdaya Manusia

Untuk mencapai sasaran strategis Kasi Pelayanan dalam meningkatkan Nilai sasaran strategisnya di dukung oleh staf 1 orang PTT namun lemahnya Sumber daya manusia yang ada di Kasi Pelayanan menjadi penghambat tercapainya seluruh sasaran strategis yang ada.

6) Kendala dan rencana aksi

Adapun Kendala yang dihadapi oleh Kasi Pelayanan adalah :

1. Kurangnya Pemahaman ASN tentang tugas dan fungsi dibidang Kasi Pelayanan sehingga sering terjadi kesalahan dalam bekerja.
2. Kurangnya fasilitas yang ada di Kasi Pelayanan yaitu hanya terdapat 1 (satu) Komputer/PC dengan kondisi tersebut memperlambat terselesainya pekerjaan.

Adapun Rencana aksi yang akan dilakukan oleh Kasi Pelayanan adalah :

1. Menambah Pemahaman ASN tentang tugas dan fungsi dibidang Kasi Pelayanan melalui pelatihan atau bimtek yang sesuai dengan bidang masing - masing.
2. Menambah fasilitas yang ada di kasi Pelayanan seyogyanya setiap ASN memegang satu PC / komputer atau penggantian leptop yang baru sehingga mempercepat terselesaikannya seluruh kegiatan yang ada di kasi Pelayanan.

6. Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian

Capaian sasaran strategis kasubbag umum dan kepegawaian rata – rata mencapai 100 % meski ada beberapa realisasi kinerja yang dibawah 100 % itu dikarenakan direalisasikan sesuai dengan kebutuhan. Sedangkan untuk capaian realisasi anggaran sebesar Rp.573.575.185 atau 95,19 % dari anggaran Rp. 602.577.034 untuk lebih jelasnya capaian realisasi kinerja dan realisasi anggaran kasubbag umum dan Kepegawaian dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 28.

Realisasi Target Sasaran, indikator Program dan Kegiatan Sub Bagian Umum dan kepegawaian

Tahun 2023

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Tahun 2022			Tahun 2023		
			Target	Realisasi	Capaian (%)	Target	Realisasi	Capaian (%)
1	Menyediakan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah.	Jumlah Orang Yang terlayani Administrasi Kepegawaian nya	27 Orang	26 Orang	96,29	26 Orang	24 Orang	96,29
2	Menyediakan pelayanan Administrasi Umum Perangkat Daerah.	Jumlah kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah.	8 Kegiatan	8 Kegiatan	100	8 Kegiatan	8 Kegiatan	100
3	menyediakan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah	2 Kegiatan	2 Kegiatan	100	2 Kegiatan	2 Kegiatan	100

		Daerah yang tersedia.						
4	Menyediakan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah.	1 kegiatan	1 kegiatan	100	1 kegiatan	1 kegiatan	100
5	Menyelenggarakan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	4 Kegiatan	4 Kegiatan	100	3 Kegiatan	3 Kegiatan	100
6	Memberi pelayanan administrasi umum dan kepegawaian.	Jumlah Dokumen Administrasi Kepegawaian	11 Dokumen	4 Dokumen	36,36	11 Dokumen	7 Dokumen	63,64 %

1) Perbandingan realisasi dengan target;

Realisasi Target indikator kinerja Kasubbag Umum dan Kepegawaian pada tahun 2023 realisasi indikator kinerjanya rata – rata mencapai 100 % dari target yang telah ditetapkan Meskipun ada satu target indikator kinerja hanya mencapai 63,64 % yaitu indikator kinerja Memberi pelayanan administrasi umum dan kepegawaian.

2) Perbandingan realisasi dengan realisasi terkait ;

- a. Realisasi Target indikator kinerja Kasubbag Umum dan Kepegawaian pada tahun 2023 keseluruhan indikator kinerja rata – rata mencapai 100 % dari

target kinerja yang telah ditetapkan.

- b. Realisasi Target indikator kinerja Kasubbag Umum dan Kepegawaian pada tahun 2023 dibandingkan tahun sebelumnya mengalami kenaikan yaitu sebesar 4,55 % dari rata rata 88,77 menjadi 93,32.
- c. Realisasi kinerja sampai dengan tahun 2023 dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis dapat tercapai.

3) Analisis Peningkatan dan Penurunan Kinerja

Berikut adalah seluruh kegiatan Penunjang tercapainya indikator kinerja Kasubbag Umum dan Kepegawaian tahun 2023 sebagai berikut :

Berikut merupakan salah satu penunjang sasaran strategis yang ke kesatu yaitu Menyediakan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah.

Jumlah pegawai dilingkup Kantor Kecamatan Panyipatan sebanyak 24 (dua Puluh Empat) orang yaitu 14 (Enam belas) orang ASN dan 10 (delapan) orang PTT. Terdapat dua kekosongan jabatan eselon yaitu jabatan Sekcam dan Kasi Kemasyarakatan dikarenakan ASN tersebut telah purna Tugas. Semua kebutuhan administrasi perkantoran terlayani dengan baik. Realisasi Target indikator kinerja mencapai rata rata 93,32 %.

- 1.)Berikut merupakan salah satu penunjang sasaran strategis yang ke kedua, tiga, empat dan lima yaitu Menyediakan pelayanan Administrasi Umum Perangkat Daerah, menyediakan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah, Menyediakan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah dan Menyelenggarakan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah.

Secara keseluruhan capaian realisasi sasaran strategis mencapai 100 % .baik itu kegiatan pengadaan alat kebersihan,alat listrik,pemeliharaan barang milik daerah maupun seluruh kegiatan penunjang urusan kecamatan.

- 2.)Berikut merupakan salah satu penunjang sasaran strategis yang ke keenam yaitu Memberi pelayanan administrasi umum dan kepegawaian.

Jumlah dokumen administrasi kepegawaian sampai dengan per 31 Desember 2023 sebanyak 14 (empat belas) ASN. Administrasi kepegawaian saat ini sudah menggunakan aplikasi SIMPeg yang memudahkan proses pencatatan dan pengolahan data dan informasi kepegawaian yang diminta.

Pada Tahun 2023 Jumlah pegawai naik gaji berkala sebanyak 4 (orang) orang dan kenaikan pangkat sebanyak 5 (lima) orang, usul pensiun 2 (dua) orang, mutasi masuk 0 (nol) orang mutasi Keluar 0 (nol) orang yang mengajukan Cuti Tahunan 2 (dua) orang. Realisasi Sasaran Kinerja Pegawai (SKP) tahun 2023 telah menerapkan aplikasi E-Kinerja yang memudahkan pegawai dalam membuat SKP Tahun masing – masing ASN Kecamatan Panyipatan.

Berikut beberapa kegiatan yang ada disubbagian umum dan kepegawaian.

- a. Kegiatan Rapat Staf evaluasi kinerja pegawai pada Kecamatan panyipatan Kabupaten Tanah Laut.

Untuk melakukan evaluasi kinerja pegawai maka kasubbag umum kepegawaian melakukan rapat staf guna memperbaiki kinerja pegawai baik itu pegawai ASN maupun PTT, kegiatan ini kami lakukan setiap 3 bulan sekali, Dengan sasaran seluruh pegawai kecamatan panyipatan tanpa terkecuali. rapat staf juga dilakukan untuk hal – hal yang dianggap perlu.



Kegiatan Rapat Staf valuasi kinerja pegawai pada Kecamatan panyipatan Kabupaten Tanah Laut

b. Kegiatan Apel pagi dan Apel Sore pegawai kantor kecamatan panyipatan

Kegiatan ini dilakukan setiap pagi dan sore demi meningkatkan kedisiplinan pegawai kecamatan panyipatan.



Kegiatan Apel pagi



Kegiatan Apel Sore

4) Analisis Program / Kegiatan penunjang kinerja

Untuk capaian realisasi anggaran pada Kasubbag Umum dan kepegawaian Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota dengan pagu anggaran sebesar Rp. 602.577.034 sedangkan

realisasi anggarannya sebesar Rp.573.575.185 atau 95,19 % dari anggaran yang telah ditetapkan. Untuk memperjelas pernyataan tersebut dapat dilihat dari tabel berikut :

Tabel.29

Realisasi Program Penunjang Kasubbag Umum dan kepegawaian pada Kecamatan Panyipatan
Tahun Anggaran 2023

No	Program / Kegiatan/Sub Kegiatan	Anggaran(Rp)	Realisasi (Rp)	Capaian
1	2	3	4	5
I	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	602.577.034	573.575.185	95,19 %
1	Administrasi Umum Perangkat Daerah	235,842,844	231,009,456	97.95
1.1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	2,968,114	2,908,000	97.97
1.2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	31,343,631	30,589,000	97.59
1.3	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	4,982,769	4,808,000	96.49
1.4	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	6,559,350	3,548,000	54.09
1.5	Penyediaan Bahan/Material	9,988,980	9,967,000	99.78
1.6	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	180,000,000	179,189,456	99.55
2	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	277,597,360	255,381,329	92.00
2.1	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	32,500,000	11,030,250	33.94
2.2	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	245,097,360	244,351,079	99.70
3	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	85,850,000	84,124,900	97.99
3.1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	30,000,000	29,999,600	100

3.2	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	46,000,000	45,487,300	98.89
3.3	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	9,850,000	8,638,000	87.70
Jumlah		602.577.034	573.575.185	95,19

5) Analisis Sumberdaya Manusia

Untuk mencapai sasaran strategis Kasubbag Umum dan kepegawaian dalam meningkatkan Nilai sasaran strategisnya di dukung oleh staf 1 orang ASN dan 1 orang staf PTT .

6) Kendala dan rencana aksi

Adapun Kendala yang dihadapi oleh Kasubbag Umum dan kepegawaian adalah :

1. Karena banyaknya kegiatan-kegiatan yang bertumpu pada kesubag umum kepegawaian yang mana dalam belanja – belanja yang dari penyusunan awal sampai belanja yang hampir semuanya menggunakan system aplikasi sehingga hal tersebut membutuhkan pemahaman yang komprehensif disamping kebutuhan akan tenaga pendukung yang kurang memadai, sehingga hal ini dapat menghambat target realisasi dalam bekerja.

Adapun Rencana aksi yang akan dilakukan oleh Kasubbag Umum dan kepegawaian adalah :

1. Meningkatkan Pemahaman akan semua kegiatan dan system informasi dalam hal melaksanakan kegiatan dibidang Kasubbag Umum dan kepegawaian melalui pelatihan atau bimtek yang sesuai dengan bidang masing - masing.
2. Meningkatkan semangat dan disiplin kerja Pegawai

7. Kepala Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan

Capaian realisasi sasaran strategis kasubbag perencanaan dan keuangan kecamatan panyipatan rata – rata mencapai 100% sedangkan pada capaian realisasi anggaran sebesar .2.093.175.040 atau 77,73 % dari anggaran Rp. 2.918.015.591 hal ini terealisasi sesuai keperluan yang ada di kasubbag Perencanaan dan Keuangan terutama di sub bagian gaji dan tunjangan ASN dikarenakan ada 2 jabatan yang kosong yaitu jabatan sekcam dan kasi kemasyarakatan sehingga tidak dapat mencapai 100 % .Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 30.

Realisasi Target Sasaran, indikator Program dan Kegiatan Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan Ta. 2023

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Tahun 2022			Tahun 2023		
			Target	Realisasi	Capaian (%)	Target	Realisasi	Capaian (%)
1	Menyusun Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Tersusunnya Dokumen Perencanaan, dan Penganggaran	6 Dokumen	6 Dokumen	100	6 Dokumen	6 Dokumen	100
2	Mengkoordinasi dan Menyusun Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Tersusunnya Dokumen Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	2 Dokumen	2 Dokumen	100	2 Dokumen	2 Dokumen	100

3	Menyusun Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Tersusunnya Dokumen LKPJ dan LPPD Perangkat Daerah	1 Dokumen	1 Dokumen	100	1 Dokumen	1 Dokumen	100
4	Melakukan Implementasi Reformasi Birokrasi.	Jumlah Refom penilaian mandiri Reformasi Birokrasi .	8 Refom	8 Refom	100	8 Refom	8 Refom	100
5	Menyediakan Gaji dan Tunjangan ASN	Terbayaran Gaji dan Tunjangan Serta TambahanPen gasilan ASN	12 Bulan	12 Bulan	100	12 Bulan	12 Bulan	100
6	Mengkoordinasi dan Menyusun Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	JumlahTersusunnya Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 Laporan	1 Laporan	100	1 Laporan	1 Laporan	100
7	Mengkoordinasi dan Menyusunan Laporan Keuangan Bulanan /Triwulanan /Semesteran SKPD	Jumlah Tersusunnya Dokumen Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulan/ Semesteran SKPD	18 laporan	18 laporan	100	18 laporan	18 laporan	100
8	Memberi pelayanan administrasi Keuangan	Jumlah Layanan Administrasi Keuangan	6 layanan	6 layanan	100	6 layanan	6 layanan	100

1) Perbandingan realisasi dengan target;

Realisasi Target indikator kinerja Kasubbag Perencanaan dan Keuangan pada tahun 2023 realisasi keseluruhan indikator kinerja rata – rata mencapai 100 % dari target kinerja yang telah ditetapkan.

2) Perbandingan realisasi dengan realisasi terkait ;

- a. Realisasi Target indikator kinerja Kasubbag Perencanaan dan Keuangan pada tahun 2023 keseluruhan indikator kinerja rata – rata mencapai 100 % dari target kinerja yang telah ditetapkan.
- b. Realisasi Target indikator kinerja Kasubbag Perencanaan dan Keuangan pada tahun 2023 meningkat dibandingkan tahun 2022.
- c. Realisasi kinerja sampai dengan tahun 2023 dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis dapat tercapai.

3) Analisis Peningkatan dan Penurunan Kinerja

Berikut adalah seluruh kegiatan Penunjang tercapainya indikator kinerja Perencanaan dan Keuangan tahun 2023 sebagai berikut :

- 1.) Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah merupakan salah satu penunjang sasaran strategis ke satu yaitu Menyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah.

Kegiatan ini dilaksanakan 3 kali dalam setahun yaitu penyusunan Dokumen RKA murni dan perubahan, Dokumen DPA murni dan perubahan dan penyusunan Dokumen Renja murni dan renja Perubahan, Jumlah Dokumen Perencanaan target 6 Dokumen realisasi 6 dokumen realisasi 100 %, adapun dokumen yang tersusun pada tahun 2023 yaitu :

1. Dokumen Renja Murni
2. Dokumen Renja Perubahan
3. Dokumen RKA murni
4. Dokumen RKA Perubahan
5. Dokumen DPA Murni
6. Dokumen DPA Perubahan

Berikut adalah beberapa foto kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah



Asistensi DPA-Perubahan 2023 Kecamatan panyipatan dengan Tim TAPD di Aula BPKAD Kabupaten



- 2.) Kegiatan penyusunan Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Tahun 2023 merupakan salah satu penunjang sasaran strategis ke dua yaitu Mengkoordinasi dan Menyusun Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja.

Kegiatan ini disusun bertujuan untuk meevaluasi kinerja perangkat daerah di tahun yang telah lalu demi kemajuan kecamatan Panyipatan, untuk menyusun laporan Lakip ini perlu dilakukan koordinasi dengan para pejabat / para kasi untuk mengetahui sejauh mana realisasi kinerja yang telah mereka laksanakan ditahun 2023 tersebut. Dokumen yang disusun adalah dokumen Lakip /LKPJ kecamatan panyipatan.



Rapat Koordinasi Penyusunan Laporan Kinerja(LAPKIN) tahun 2023

- 3.) Rapat laporan hasil reviu Rancangan Akhir Renja Rencana Kerja Pemerintah Kabupaten Tanah Laut Tahun Anggaran 2023 merupakan salah satu penunjang sasaran strategis ke tiga yaitu Menyusun Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah.

Kegiatan Rapat laporan hasil reviu Rancangan Akhir Renja Rencana Kerja Pemerintah Kabupaten Tanah Laut Tahun Anggara 2023 dilaksanakan oleh Bapedda untuk mereviu hasil penyusunan Renja akhir seluruh SKPD yang ada di kabupaten Tanah Laut, kegiatan tersebut untuk menyamakan persepsi tentang penyusunan Renja SKPD.



Rapat laporan hasil reviu Rancangan Akhir Renja Rencana Kerja Pemerintah Kabupaten Tanah Laut Tahun Anggaran 2023

- 4.) Melakukan Implementasi Reformasi Birokrasi merupakan salah satu penunjang sasaran strategis ke empat yaitu Menyusun Perjanjian Kinerja ASN tahun 2023.

Sebagai bentuk dari salah satu Implementasi Reformasi Birokrasi yang dilakukan kecamatan panyipatan adalah adanya penadatangan perjanjian kinerja bagi seluruh karyawan / karyawan di kantor kecamatan panyipatan terutama pejabat eselon beserta staf.



Penandatanganan Perjanjian kinerja untuk Pejabat Tahun Anggaran 2023



Penandatanganan Perjanjian kinerja untu staf Tahun Anggaran 2023

4) Analisis Program / Kegiatan penunjang kinerja

Untuk capaian realisasi anggaran pada Kasubbag Perencanaan dan Keuangan Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Dengan pagu anggaran sebesar Rp. 2.918.015.591 sedangkan realisasi anggarannya sebesar Rp. 2.093.175.040 atau 71,73 % dari anggaran yang telah ditetapkan. Untuk memperjelas pernyataan tersebut dapat dilihat dari tabel berikut :

Tabel.31

Realisasi Program Penunjang Kasubbag Perencanaan dan Keuangan pada Kecamatan Panyipatan Tahun Anggaran 2023

No	Program / Kegiatan/Sub Kegiatan	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Capaian %
1	2	3	4	5
I	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	3.517.305.795	2,663,690,725	75.73
1	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	3.286.830	3,059,500	93.08
1.1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2,211,805	1,997,000	90.29
1.2	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1,075,025	1,062,500	98.83
2	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	2,914,728,761	2,090,115,540	71,71
2.1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	2,914,228,761	2,089,763,540	71.71
2.2	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	500,000	352,000	70,40

5) Analisis Sumberdaya Manusia

Untuk mencapai sasaran strategis Kasubbag Perencanaan dan Keuangan dalam meningkatkan Nilai sasaran strategisnya di dukung oleh 2 orang staf ASN dan 2 orang staf PTT namun lemahnya Sumber daya manusia yang ada di Kasubbag Perencanaan dan Keuangan menjadi penghambat tercapainya seluruh sasaran strategis yang ada.

6) Kendala dan rencana aksi

Adapun Kendala yang dihadapi oleh Kasubbag Perencanaan dan Keuangan adalah :

1. Kurangnya Pemahaman ASN tentang tugas dan fungsi dibidang Perencanaan dan Keuangan sehingga sering terjadi kesalahan dalam bekerja.

Adapun Rencana aksi yang akan dilakukan oleh Perencanaan dan Keuangan adalah

:

1. Menambah Pemahaman ASN tentang tugas dan fungsi dibidang Kasubbag Perencanaan dan Keuangan melalui pelatihan atau bimtek yang sesuai dengan bidang masing - masing.

Secara keseluruhan rata-rata capaian realisasi terhadap target tahun 2023 untuk eselon IV mencapai 88,15 %. Untuk lebih jelasnya Realisasi Target Indikator Kinerja eselon IV tahun 2023 secara keseluruhan dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel. 32

Realisasi Target Indikator Eselon IV tahun 2023

No	Indikator Kinerja	Tahun 2023		
		Target	Realisasi	Capaian
1	Tingkat kepuasan Masyarakat terhadap pelayanan Umum yang ada di kecamatan.	Baik (87)	Baik (85,86)	98,68 %
2	Nilai RB	70 (Baik)	Sangat Baik (85,18)	122 %
	Nilai SAKIP	75(Baik)	73,7 (baik)	98,26 %
3	Persentase layanan administrasi umum dan kepegawaian yang tertib	100 %	100 %	100 %
4	Jumlah kegiatan dibidang sosial, keagamaan, kebudayaan dan olahraga yang sesuai SOP	1 Kegiatan	1 Kegiatan	100%
5	Jumlah Desa yang terfasilitasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahannya.	10 desa	10 desa	100 %
6	Jumlah desa yang di fasilitasi dengan baik pada penyelenggaraan pemilu, pilkada, dan pemilihan kepala desa serta penjarangan aparat desadan BPD.	5 desa	5 Desa	100 %
7	Jumlah desa yang data kependudukannya terverifikasi dengan akurat	10 desa	10 desa	100 %
8	Jumlah kegiatan pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhineka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	1 kegiatan	1 kegiatan	100 %
9	Jumlah desa yang berhasil menyusun profil desa dengan baik	10 Desa	10 Desa	100 %

10	Jumlah Desa yang terfasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa.	10 Desa	10 Desa	100 %
11	Jumlah Kegiatan Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	1 Kegiatan	1 Kegiatan	100 %
12	Jumlah Pembinaan kelompok organisasi masyarakat di bidang kemasyarakatan	12 Kelompok	11 kelompok	92 %
13	Jumlah Kegiatan pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intrasuku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional	3 Kegiatan	3 Kegiatan	100 %
14	Jumlah masyarakat tidak mampu yang di fasilitasi penyaluran bantuannya	3.678 KPM	3.430 KPM	93,26%
15	Jumlah kegiatan penanganan gangguan dan ketertiban masyarakat di kecamatan yang di fasilitasi	1 kegiatan	1 kegiatan	100%
16	Jumlah kelompok masyarakat di bidang ketenteraman dan ketertiban yang aktif	2 Kelompok	2 Kelompok	100%
17	Jumlah penanganan gangguan dan ketertiban masyarakat di kecamatan yang di monitoring	6 kali	6 kali	100%
18	Jumlah kegiatan Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	4 Kegiatan	4 Kegiatan	100%
19	Jumlah Kegiatan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan	1 Kegiatan	1 kegiatan	100 %
20	Jumlah produk Pelayanan Masyarakat Pelayanan Terpadu Kecamatan sesuai SOP	16 produk Layanan	13 Produk layanan	75%
21	Jumlah data informasi Pelayanan Administrasi terpadu kecamatan (PATEN) kecamatan (PATEN)	4 dokumen	4 dokumen	100%
22	Jumlah Orang Yang terlayani Administrasi Kepegawaiannya	26 Orang	24 Orang	96,29%
23	Jumlah kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah.	8 Kegiatan	8 Kegiatan	100 %
24	Jumlah Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah yang tersedia.	2 Kegiatan	2 Kegiatan	100 %

25	Jumlah Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah.	1 kegiatan	1 kegiatan	100 %
26	Jumlah kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	3 Kegiatan	3 Kegiatan	100 %
27	Jumlah Dokumen Administrasi Kepegawaian	11 Dokumen	7 Dokumen	63,64 %
28	Jumlah Tersusunnya Dokumen Perencanaan, dan Penganggaran	6 Dokumen	6 Dokumen	100 %
29	Jumlah Tersusunnya Dokumen Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	2 Dokumen	2 Dokumen	100 %
30	Jumlah Tersusunnya Dokumen LKPJ dan LPPD Perangkat Daerah	1 Dokumen	1Dokumen	100 %
31	Jumlah Refom penilaian mandiri Reformasi Birokrasi .	8 Refom	8 Refom	100 %
32	Terbayaran Gaji dan Tunjangan Serta TambahanPengasilan ASN	12 Bulan	12 Bulan	100 %
33	JumlahTersusunnya Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 Laporan	1 Laporan	100 %
34	Jumlah Tersusunnya Dokumen Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulan/ Semesteran SKPD	18 laporan	18 laporan	100 %
35	Jumlah Layanan Administrasi Keuangan	6 layanan	6 layanan	100 %
Rata – Rata Capaian				85,80 %

1) Perbandingan realisasi dengan target;

Dari hasil realisasi target sasaran dan indikator kinerja eselon IV tahun 2023 dibandingkan tahun 2022 ada beberapa capaian yang menurun yaitu Jumlah masyarakat tidak mampu yang di fasilitasi penyaluran bantuan sosialnya hanya terealisasi sebesar 85,80 %.Capaian kinerja sasaran berdasarkan rata-rata capaian tahun 2022 sebesar 85,80% mengalami penurunan dibandingkan tahun 2022 sebesar 88,15 sebanyak 2.35 % Walau masih ada kegiatan yang capaian kinerja terhadap realisasi target rendah karena sebagian besar Realisasi tidak tercapai akibat terbatasnya anggaran yang tersedia. Walaupun demikian pencapaian di beberapa kegiatan yang melampaui target mampu mendongkrak pencapaian target rerata.

2) Perbandingan Realisasi dengan Realisasi Terkait;

Realisasi kinerja berdasarkan rata-rata capaian tahun 2023 dibandingkan dengan tahun 2022 untuk kinerja eselon IV mengalami Penurunan dari 85,80 % menjadi 87,97 % hal ini di karenakan beberapa kegiatan tidak dapat dilaksanakan sesuaikan kondisi lapangan.

3) Analisis Peningkatan dan Penurunan Kinerja

Penurunan capaian kinerja pada indikator kinerja Jumlah masyarakat tidak mampu yang di fasilitasi penyaluran bantuan sosialnya dikarenakan adanya pengurangan jumlah bantuan sosial yang dikeluarkan oleh pemerintah mengingat mulai dicabutnya pemberlakuan pembatasan aktifitas masyarakat akibat COVID 19..

4) Analisis Program/Kegiatan Penunjang Kinerja

Dari 3 (Tiga) program, 7 (Tujuh) kegiatan dan 15 (Lima belas) Sub Kegiatan pada Kecamatan Panyipatan Kabupaten Tanah Laut total APBD Murni sebesar Rp. 3.059.127.929,-, kemudian setelah adanya APBD perubahan maka jumlah total APBD Perubahan sebesar Rp 4.204.061.128,- Terjadi Kenaikan anggaran sebesar 37,42 %. sampai akhir tahun anggaran realisasi belanja Daerah sebesar Rp 3.827.762.632,- atau 91,04 %, untuk lebih jelas dapat dilihat pada tabel berikut:

Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel. 33

Anggaran dan Realisasi Berdasarkan Program Dan Kegiatan Yang Dilaksanakan Kantor Kecamatan Panyipatan Tahun 2023

No	Program / Kegiatan/Sub Kegiatan	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Capaian %
1	2	3	4	5
I	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	3.517.305.795	2,663,690,725	75.73
1	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	3.286.830	3,059,500	93.08
1.1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2,211,805	1,997,000	90.29
1.2	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1,075,025	1,062,500	98,83
2	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	2,914,728,761	2,090,115,540	71,71
2.1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	2,914,228,761	2,089,763,540	71.71
2.2	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	500,000	352,000	70,40
3	Administrasi Umum Perangkat Daerah	235,842,844	231,009,456	97.95
3.1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	2,968,114	2,908,000	97.97
3.2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	31,343,631	30,589,000	97.59
3.3	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	4,982,769	4,808,000	96.49
3.4	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	6,559,350	3,548,000	54.09
3.5	Penyediaan Bahan/Material	9,988,980	9,967,000	99.78

3.6	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	180,000,000	179,189,456	99.55
4	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	277,597,360	255,381,329	92.00
4.1	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	32,500,000	11,030,250	33.94
4.2	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	245,097,360	244,351,079	99.70
5	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	85,850,000	84,124,900	97.99
5.1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	30,000,000	29,999,600	100
5.2	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	46,000,000	45,487,300	98.89
5.3	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	9,850,000	8,638,000	87.70
II.	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	4,171,240	4,154,000	99.59
1	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan	4,171,240	4,154,000	99.59
1.1	Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan	4,171,240	4,154,000	99.59
III.	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	48,439,400	39,757,000	82.08
1	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	48,439,400	39,757,000	82.08

1.1	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	48,439,400	39,757,000	82.08
IV.	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	1,302,845,245	1,170,599,320	89.85
1	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	1,302,845,245	1,170,599,320	89.85
1.1	Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	99,996,230	76,717,100	76.72
1.2	Pembinaan Kerukunan Antarsuku dan Intrasuku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional	1,151,754,962	1,044,100,000	90.65
1.3	Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	51,094,053	49,782,220	97.43
V.	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	9,936,650	6,422,000	64.63
1	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	9,936,650	6,422,000	64.63
1.1	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	9,936,650	6,422,000	64.63
1.2	Fasilitasi Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa	-	-	0.00
1.3	Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa	-	-	0.00
	Jumlah	4.882.698.330	3.884.623.045,	79.56

B. Akuntabilitas Keuangan

1. Anggaran dan Realisasi APBD Tahun 2023

Realisasi keuangan APBD Kecamatan Panyipatan berdasarkan Laporan Realisasi Anggaran (LRA) tahun 2023 adalah sebagai berikut :

a. Pendapatan

Realisasi pendapatan Kecamatan Panyipatan pada tahun 2023 tidak dapat memenuhi target yaitu sebesar Rp.0 ,-dari target Rp 0,-, atau 0%.

b. Belanja

Realisasi Belanja Kecamatan Panyipatan pada tahun 2023 dapat dijelaskan sebagai berikut :

1) Belanja Operasi

Realisasi Belanja Operasi Kecamatan Panyipatan tahun 2023 sebesar Rp. 3.884.623.045, atau 79,56 % dari total anggaran tahun 2023 sebesar Rp. 4.882.698.330,-

2) Belanja Belanja Modal

Realisasi Belanja Belanja Modal Kecamatan Panyipatan tahun 2023 sebesar Rp. 16.050.000 atau sebesar 97,24% dari total anggaran tahun 2023 sebesar Rp. 16.505.700,

Belanja operasi merupakan belanja pegawai,Belanja Barang dan Jasa dan Belanja Hibah, sedangkan Belanja modal adalah belanja modal peralatan dan mesin yang dilakukan pada tahun 2023.

Realisasi belanja Kecamatan Panyipatan Tahun 2023 dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 34**Anggaran dan Realisasi Belanja Kecamatan Panyipatan Tahun 2023**

No	Belanja	Anggaran	Realisasi	Persentase %
		(Rp)	(Rp)	
1	2	3	4	5
I.	BELANJA OPERASI	Rp.4.866.192.630	Rp. 3.868.573.045	79,50
1	Belanja Pegawai	Rp.2.914.228.761	Rp.2.089.763.540,	71,71
2	Belanja Barang dan Jasa	Rp. 951.963.869	Rp. 877.229.505	92,15
3	Belanja Hibah	Rp.1.000.000.000	Rp. 901.580.000	90,16
II	BELANJA MODAL	Rp. 16.505.700	Rp. 16.050.000,	97,24
1	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	Rp. 16.505.700	Rp. 16.050.000,	97,24
	Jumlah	Rp.4.882.698.330	Rp.3.884.623.045,	79,56

Untuk Realisasi belanja operasi berdasarkan rincian Belanja Pegawai, belanja Barang dan jasa belanja Hibah serta belanja modal peralatan dan mesin dapat dilihat dari tabel sebagai berikut:

1.) Belanja Pegawai

Tabel.35

Anggaran dan Realisasi Belanja Pegawai kecamatan panyipatan Tahun 2023

No	Uraian Jenis Belanja Pegawai	Anggaran	Realisasi	(%)
1	Belanja Pegawai	2.914.228.761	2.089.763.540	71,71
2	Gaji pokok ASN	1.075.602.306	721.263.300,	64,55
3	Belanja Gaji Pokok PPPK	41.766.400	0,00	0,00
4	Tunjangan keluarga ASN	97.499.472	84.249.942,	86,41
5	Tunjangan jabatan ASN	103.110.000	71.500.000,	69,34
6	Tunjangan Fungsional ASN	0,	0,	0
7	Tunjangan fungsional umum ASN	23.462.250,	17.860.000,,	76,12
8	Tunjangan beras ASN	55.763.400	44.755.560,	80,26
9	Tunjangan PPh/ tunjangan khusus ASN	96.863.943	61.588.717	63,58
10	Pembulatan gaji ASN	34.354	10.227,	29,77
11	Iuran Jaminan Kesehatan ASN	96.070.829	63.040.492	65,62
12	Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja ASN	5.764.250	1.480.081,	25,68
13	Iuran Jaminan Kematian ASN	17.292.749	4.440.283,	25,68
14	Iuran simpanan peserta tabungan perumahan Rakyat ASN	12.008.854	0	0
15	- Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PNS	1.017.239.717	839.895.412	100,
	- Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PPPK	78.249.209	0	0
16	- Tambahan Penghasilan berdasarkan Kondisi Kerja PNS	179.679.526	179.679.526,	100
	- Tambahan Penghasilan berdasarkan Kondisi Kerja PPPK	13.821.502	0	0

2.) Belanja Barang dan Jasa

Tabel.36

Anggaran dan Realisasi Belanja Barang dan Jasa kecamatan panyipatan Tahun 2023

No.	Uraian	Anggaran 2023 (Rp.)	Realisasi 2023 (Rp.)	Persentase (%)
1	Belanja Bahan-Bahan Bangunan dan Konstruksi	3.122.754	2.040.000,	65,33
2	Belanja Bahan-Bahan Lainnya	2.836.272	2.480.000,	87,44
3	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	20.856.521	13.457.600	64,52
4	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover	4.722.710	4.540.000	96,13
5	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer	9.585.365	9.500.000,	99,11
6	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perabot Kantor	4.982.769	4.808.000,	96,49
7	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Listrik	2.968.114	2.908.000,	97,97
8	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perlengkapan Pendukung Olahraga	5.509.474	3.405.000,	61,80
9	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Suvenir/Cendera Mata	750.000	750.000	100
10	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya	6.901.320	6.405.000,	92,81
11	Belanja Persediaan untuk Dijual/Diserahkan- Persediaan untuk Dijual/Diserahkan Lainnya	1.458.980	1.437.000,	98,49
12	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	45.975.000	45.225.000,	98,37
13	Belanja Makanan dan Minuman Aktivitas Lapangan	131.235.000	122.673.000,	93,48
14	Belanja Pakaian Dinas	5.772.000	5.148.000,	89,19

	Harian (PDH)			
15	Belanja Pakaian Dinas Upacara (PDU)	28.860.000	13.000.000,	45,05
16	Belanja Pakaian Batik Tradisional	18.000.000	18.000.000,	100
17	Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia	22.500.000	20.000.000,	88,89
18	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan	12.000.000	12.000.000,	100
19	Honorarium Rohaniwan	1.250.000	1.250.000,	100
20	Belanja Jasa Tenaga Administrasi	159.600.000	159.600.000	100
21	Belanja Jasa Tenaga Ahli	2.800.000	2.800.000	100
22	Belanja Jasa Tenaga Kebersihan	45.600.000	45.600.000	100
23	Belanja Jasa Tenaga Keamanan	22.800.000	22.800.000	100
24	Belanja Jasa Pelaksanaan Transaksi Keuangan	500.000	352.000,	70,40
25	Belanja Jasa Penyelenggaraan Acara	10.750.000	7.600.000	70,70
26	Belanja Tagihan Telepon	6.000.000,	0,	0
27	Belanja Tagihan Air	1.500.000,	0,	0
28	Belanja Tagihan Listrik	25.000.000	11.030.250	44,12
29	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi Non ASN	15.119.880	15.119.880,	100
30	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN	878.880	547.199	62,26
31	Belanja Iuran Jaminan Kematian bagi Non ASN	1.098.600	684.000	62,26
32	Belanja Sewa Kendaraan Bermotor Penumpang	12.150.000	12.150.000	100
33	Belanja Sewa Alat Kantor Lainnya	6.530.150	6.480.000	99,23
34	Belanja Sewa Mebel	890.080	768.000	86,28
35	Belanja Sewa Peralatan Studio Audio	2.800.000	2.800.000	100
36	Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan	60.000.000	59.999.400,	100

37	Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Beroda Dua	16.000.000	15.487.500	96,80
38	Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Pendingin	4.000.000	3.814.000,	95,35
39	Belanja Pemeliharaan Komputer-Komputer Unit-Personal Computer	4.050.000	3.474.000	85,78
40	Belanja Pemeliharaan Komputer-Peralatan Komputer-Peralatan Personal Computer	1.800.000	1.350.000,	75,00
41	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	131.130.000	128.506.676,	98,00
42	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	91.680.000	87.240.000,	95,16
JUMLAH		Rp 951.963.869	Rp 877.229.505	91,95

3.) Belanja Hibah

Tabel.37

Anggaran dan Realisasi Belanja Hibah kecamatan panyipatan Tahun 2023

No.	Uraian	Anggaran 2023 (Rp.)	Realisasi 2023 (Rp.)	Persentase (%)
1	Belanja Hibah Uang kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela Bersifat Sosial Kemasyarakatan	1.000.000.000	2.040.000,	90,16
Jumlah		1.000.000.000	2.040.000,	90,16

4.) Belanja Modal

Tabel.38

Anggaran dan Realisasi Belanja Pegawai kecamatan panyipatan Tahun 2023

No.	Jenis Belanja Modal	Anggaran 2023 (Rp)	Realisasi 2023 (Rp)	Persentase (%)
1	Belanja Modal Personal Computer	13.179.030	13.150.000,	99,78
2	Belanja Modal Peralatan Komputer Lainnya	3.326.670	2.900.000,	87,17
Jumlah Belanja Modal		16.505.700	16.050.000,	97,24

2. Anggaran dan Realisasi menurut Sasaran dan Program.

Sedangkan rincian realisasi Anggaran dan Realisasi menurut Sasaran dan Program untuk Kecamatan Panyipatan tahun 2023 dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 39

Anggaran dan Realisasi Berdasarkan Program Dan Kegiatan Yang Dilaksanakan Kecamatan Panyipatan Tahun 2023

No	Program / Kegiatan/Sub Kegiatan	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Capaian %
1	2	3	4	5
I	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	3.517.305.795	2,663,690,725	75.73
1	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	3.286.830	3,059,500	93.08
1.1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2,211,805	1,997,000	90.29
1.2	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1,075,025	1,062,500	98,83
2	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	2,914,728,761	2,090,115,540	71,71
2.1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	2,914,228,761	2,089,763,540	71.71

2.2	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	500,000	352,000	70.40
3	Administrasi Umum Perangkat Daerah	235,842,844	231,009,456	97.95
3.1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	2,968,114	2,908,000	97.97
3.2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	31,343,631	30,589,000	97.59
3.3	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	4,982,769	4,808,000	96.49
3.4	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	6,559,350	3,548,000	54.09
3.5	Penyediaan Bahan/Material	9,988,980	9,967,000	99.78
3.6	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	180,000,000	179,189,456	99.55
4	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	277,597,360	255,381,329	92.00
4.1	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	32,500,000	11,030,250	33.94
4.2	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	245,097,360	244,351,079	99.70
5	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	85,850,000	84,124,900	97.99
5.1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	30,000,000	29,999,600	100
5.2	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	46,000,000	45,487,300	98.89
5.3	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	9,850,000	8,638,000	87.70
II.	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	4,171,240	4,154,000	99.59
1	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan	4,171,240	4,154,000	99.59
1.1	Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan	4,171,240	4,154,000	99.59

III.	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	48,439,400	39,757,000	82.08
1	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	48,439,400	39,757,000	82.08
1.1	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	48,439,400	39,757,000	82.08
IV.	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	1,302,845,245	1,170,599,320	89.85
1	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	1,302,845,245	1,170,599,320	89.85
1.1	Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	99,996,230	76,717,100	76.72
1.2	Pembinaan Kerukunan Antarsuku dan Intrasuku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional	1,151,754,962	1,044,100,000	90.65
1.3	Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	51,094,053	49,782,220	97.43
V.	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	9,936,650	6,422,000	64.63
1	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	9,936,650	6,422,000	64.63
1.1	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	9,936,650	6,422,000	64.63
1.2	Fasilitasi Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa	-	-	0.00
1.3	Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa	-	-	0.00
	Jumlah	4.882.698.330	3.884.623.045	79.56

3. Perbandingan Program dan Kegiatan Tahun 2022 dan tahun 2023

Pada tahun 2023 ada 5 Program dan 9 kegiatan, sedangkan di tahun 2022 ada 3 Program dan 7 kegiatan. Demikian juga dengan jumlah anggaran 2022 untuk seluruh belanja sebesar Rp. 4.204.061.128.-. Dibandingkan tahun 2023 jumlah anggaran belanja naik yaitu sebesar Rp 4.882.698.330,- dari anggaran Perubahan. Untuk lebih jelasnya perbandingan jumlah Program dan Kegiatan dan pagu 2022 – 2023 sebagai berikut :

Tabel 40.

Perbandingan Program dan Kegiatan Serta Pagu Anggaran Kecamatan Panyipatan Tahun 2022-2023

No	2022		2023	
	Program	Kegiatan	Program	Kegiatan
1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
		Administrasi Umum Perangkat Daerah		Administrasi Umum Perangkat Daerah
		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

2	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan
3	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa
			PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah
			PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa
Total				
	3	6	5	9
	Total Anggaran		Total Anggaran	
	Rp.4.204.061.128,-		Rp. 4.882.698.330,-	

Adapun realisasi Belanja 2022 dibandingkan tahun 2023 mengalami kenaikan yaitu pada tahun 2022 sebesar Rp. 3.831.532.054,- dibandingkan tahun 2023 sebesar Rp. 3.884.623.045, Sedangkan untuk belanja pegawai pada belanja Oprasi Anggaran 2023 mengalami penurunan yaitu sebesar Rp.2,089,763,54 dibanding tahun anggran 2022 sebesar Rp. 2.366.350.809, Belanja Modal meningkat di tahun 2023 sebesar Rp. 16.050.000, namun untuk pendapatan dari retribusi daerah tahun 2022 sebesar Rp. 2.960.000 Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 41.

Perbandingan Realisasi Belanja Langsung pada Kecamatan Panyipatan
Tahun 2022-2023

No.	2022		2023	
	BELANJA OPERASI	Jumlah	BELANJA OPERASI	Jumlah
1	Belanja Oprasi	Rp.2.366.350.809,	Belanja Oprasi	Rp. 3.868.573.045,
2	Belanja Barang dan Jasa	Rp. 573.321.823,-	Belanja Barang dan Jasa	Rp. 877.229.505,-
3	Belanja Hibah	Rp. 885.130.000,-	Belanja Hibah	Rp. 901.580.000,-
BELANJA MODAL		Jumlah	BELANJA MODAL	Jumlah
4	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	Rp. 2.960.000	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	Rp. 16.050.000
Total		Rp.3.831.532.054	Total	Rp 3.884.623.045,

BAB IV

PENUTUP

A. Simpulan

Laporan Kinerja Tahun 2023 ini merupakan pertanggung jawaban atas Kinerja Kecamatan Panyipatan dalam mencapai tujuan dan Sasaran, Pencapaian sasaran di ukur berdasarkan Capaian Indikator Kinerja Utama sebagaimana telah ditetapkan dalam Peraturan Bupati Tanah Laut Nomor 197 Tahun 2019 tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama Satuan Kerja Perangkat Daerah Lingkup Kabupaten Tanah Laut yang mana Kecamatan Panyipatan ada 1 (satu) sasaran Strategis dan 1 (satu) Indikator Kinerja Utama.

Berdasarkan hasil pengukuran Realisasi kinerja berdasarkan rata-rata capaian tahun 2023 dibandingkan dengan tahun 2022 untuk kinerja eselon IV mengalami Penurunan dari 88,6 % menjadi 85,80% pada kriteria **“Memuaskan”** meskipun beberapa kegiatan tidak dapat dilaksanakan karena keterbatasan anggaran yang telah ditetapkan Pemerintah.

Sedangkan Persentase tingkat capaian indikator sasaran berdasarkan kinerja program dan kegiatan pada tahun 2023 secara umum dari sisi keuangan sudah tercapai yaitu 79,56 %, dan sisanya 20,44 % yang tidak terealisasi, atau terealisasi sebesar Rp.3.884.623.045,- dari total anggaran sebesar Rp.4.882.698.330,-.

Secara umum dapat disimpulkan bahwa Kecamatan Panyipatan telah dapat merealisasikan Program dan Kegiatan Tahun 2023 dengan baik, hal ini dapat terlihat dari Capaian Kinerja Kecamatan Panyipatan yaitu 85,80 %. meskipun Capaian tersebut menurun dari tahun 2022 yaitu dari capaian realisasi sebesar 88,15 % (Sangat Baik) namun diharapkan ke depannya dapat lebih ditingkatkan lagi meski Capaian tersebut belum berhasil melebihi target yang sudah ditetapkan sebelumnya yaitu sebesar 100 %.

B. Strategi Peningkatan Kinerja

Kinerja Kecamatan Panyipatan Tahun 2023 sudah menunjukkan hasil yang baik, akan tetapi harus tetap dibenahi dari kelemahan-kelemahan yang ada. Strategi yang akan dilakukan dalam peningkatan kinerja adalah dengan mengidentifikasi permasalahan dan tantangan yang dihadapi. Kecamatan Panyipatan merupakan salah satu instansi penyelenggara pelayanan kepada masyarakat, baik pelayanan langsung maupun tidak langsung. Salah satu penunjang yang sangat mendukung dalam hal pelayanan adalah sarana dan prasarana yang baik. Pada Kecamatan Panyipatan telah terbangun ruang Pelayanan Terpadu Kecamatan (PATEN) dalam rangka meningkatkan kualitas pelayanan kepada

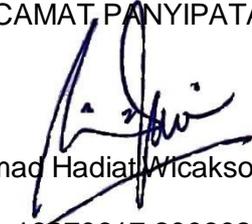
masyarakat, adanya kekompakan dan saling kerjasama yang baik antar sesama aparat. Namun masih ada beberapa kekurangan/ permasalahan serta tantangan yang dihadapi kedepannya, yaitu:

1. Sumberdaya manusia yang kurang berkompeten untuk pelayanan kepada masyarakat yang lebih maksimal. Kedepannya diharapkan dapat melakukan pelatihan / bimtek untuk meningkatkan kompetensi baik PNS maupun tenaga honorer.
2. Kekurangan fasilitas sarana dan prasarana bagi aparat terutama Jaringan internet yang kurang memadai karena selama ini menggunakan jaringan internet seadanya serta perangkat komputer yang masih kurang, untuk tahun kedepannya akan dilakukan pengadaan terkait hal tersebut.
3. Tantangan yang dihadapi juga berkaitan dengan peningkatan kualitas aparat desa dalam pengelolaan keuangan desa dan pelayanan terhadap masyarakat sehingga perlu adanya pelatihan peningkatan kompetensi aparat Desa oleh instansi terkait.
4. Terdapat kendala dalam proses pengadaan melalui aplikasi.
5. Kekurangan fasilitas sarana dan prasarana bagi aparat terutama jaringan internet yang sangat membantu baik dari segi pelayanan maupun kinerja pegawai karena semua kegiatan mulai perencanaan sampai dengan evaluasi sudah bersifat elektronik.
6. Tantangan yang dihadapi juga berkaitan dengan peningkatan kualitas aparat desa dalam pengelolaan keuangan desa karena aparat telah secara mandiri mengemban dan mengelola keuangan desanya.
7. Masih kurangnya minat masyarakat untuk berwirausaha. Tantangan ini masih belum maksimal teratasi karena berkaitan dengan karakter masyarakat dan wawasan yang dimiliki.
8. Tantangan bagi aparat kecamatan panyipatan adanya pelimpahan kewenangan dalam mengevaluasi rancangan APBDesa dengan memaksimalkan keadaan dan pengetahuan yang dimiliki aparat kecamatan panyipatan.

Dengan melihat permasalahan dan tantangan di atas, maka dapat menentukan strategi yang harus dilakukan Kantor Kecamatan Panyipatan dalam meningkatkan kinerja diantaranya dengan meningkatkan SDM yaitu dengan menambah ASN yang berkompeten. Selain itu juga memaksimalkan sarana dan prasarana yang ada untuk menunjang pelayanan publik dan terus menjaga serta meningkatkan peran aktif dan komitmen dari semua aparat kecamatan, aparat desa, serta masyarakat untuk berperan aktif dan turut serta dalam membangun kecamatan khususnya dan daerah pada umumnya.

Demikian Laporan Kinerja Kecamatan Panyipatan ini disusun dan dibuat berdasarkan kondisi yang ada saat ini, tidak lupa juga kami mengucapkan terimakasih kepada semua pihak yang terlibat langsung maupun tidak langsung dalam partisipasinya sehingga tersusunnya laporan ini sesuai waktu yang ditentukan.

CAMAT PANYIPATAN,



Muhammad Hadiat Wicaksono, SSTP, M.I.P

NIP. 19870617 200602 1 001

LAMPIRAN LAKIP TAHUN 2023

KECAMATAN PANYIPATAN

IKU

PERNYATAAN HASIL REVIU

PERNYATAAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023

POHON KINERJA

CAPAIAN PER TRIWULAN

MONEV RENSTRA

MATRIK KESELARASAN